Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 15 No 1 Maret 2016
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Penanganan Anak Autis dalam Interaksi Sosial 1 - 8
   Autism Children Handling on Social Interaction
   Asrizal

2. Analisis Implementasi Model Pelayanan Sosial Pandu Gempita 9 - 24
   Analisys on the Implemetation of Integrated Social Service Model
   Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati

3. Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat 25 - 34
   Teaching and Local Culture Strategy on Strengthening Populous Economy
   Mahmuddin

4. Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Gelandangan Eks-psikotik 35 - 46
   The Degree of Success on Ex-psychotic Homeless Rehabilitation
   Chulaifah dan Sri Prastyowati

5. Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 47 - 56
   Social Organization Participation on Inhabitable House Rehabilitation
   Setyo Sumarno

6. *Trauma Healing* Anak-anak Korban Erupsi Gunung Sinabung 57 - 64
   Children Victims Trauma Healing of Sinabung Mountain Eruption
   Ameilia Zuliyanti Siregar dan Husmiati

7. Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak 65 - 76
   The Role of Social Worker Dedicating Unit on Children Social Welfare Program
   Suryani dan Enni Hardiati

8. Analisis terhadap *Masterplan* Penanganan Anak Jalanan 77 - 88
   Analysis on the Masterplan Model of Street Children Handling
   Soetji Andari

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 15 nomor 1, memulai sajian dengan mengungkapkan Penanganan Anak Autis dalam Interaksi Sosial, ditulis oleh Asrizal disusul dengan hasil penelitian Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati dalam judul Analisis Implementasi Model Pelayanan Sosial Pandu Gempita, merupakan hasil penelitian ujicoba di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Mahmuddin mengemukakan tentang Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam memperkuat Ekonomi Rakyat di Desa Bira, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, diikuti Chulaifah dan Sri Prasetyowati dalam analisis Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Gelandang Eks-psikotik di Kota Medan, Sumatera Utara. Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, diungkap oleh Setyo Sumarno dari hasil penelitiannya di Kecamatan Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, disusul Ameilia Zuliyanti Siregar dan Husmiati dalam *Trauma Healing* Anak-anak Korban Erupasi Gunung Sinabung. Suryani dan Enni Hardiati menulis tentang Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak, buah hasil penelitian di Kota Jambi, disusul Soetji Andari yang sekaligus menutup edisi ini dalam Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman, DIY.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451 **Vol 15 No 1 Maret 2016**

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Asrizal (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Penanganan Anak Autis dalam Interaksi Sosial
Autism Children Handling on Social Interaction
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 1 - 8

This paper offers solutions for social workers in the treatment of autism in terms of social interaction problem. Social workers can practice it on the field in an attempt to deal with autism in social interaction through performing several approaches. Currently, many social workers do not know how to deal with autism who have problems in their social interactions, whereas the responsibility of social workers tasks are relegating autists in the community. This paper offers two forms of treatment of autism, early treatment and integratedhandling. This has become the focus of discussion in this paper to guide social workers no longer face trouble in handling social interaction of children with autism, which usually has been a problem in the fieldfor social workers.

Keywords: autis; interaction; social workers

Tulisan ini menawarkan solusi bagi pekerja sosial dalam penanganan autisme yang bermasalah dalam hal interaksi sosialnya. Pekerja sosial dapat mempraktekkannya di lapangan. Dalam upaya untuk menangani autisme dalam interaksi sosial, pekerja sosial dapat melakukan beberapa pendekatan. Perkembangan saat ini, banyak pekerja sosial tidak tahu cara menangani autisme yang bermasalah dalam interaksi sosialnya, padahal menjadi tanggungjawab serta tugas mereka ketika diturunkan dimasyarakat. Tulisan ini menawarkan dua bentuk penanganan autisme, yaitu penanganan dini dan penangan terpadu. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Konsep dasar yang ditawarkan adalah melalui dua bentuk penanganan yang ditawarkan, pekerja sosial tidak kesulitan lagi menangani permasalahan interaksi sosial anak autis, yang selama ini menjadi problem di lapangan.

Kata kunci: autisme; interaksi; pekerja sosial

Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati (B2P3KS)
Analisis Implementasi Model Pelayanan Sosial Pandu Gempita
Analisys on the Implemetation of Integrated Social Service Model
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 9 - 24

The current social services as present are still sectoral, fragmented, limited outreach, respond only actual problem, output based on budget absorbtion, they have not yet

Pelayanan sosial yang dilakukan berbagai lembaga selama ini masih bersifat sektoral, fragmentaris, jangkauan terbatas, hanya merespons masalah aktual, dan *output* atas dasar

reached outcome and impact. Law No 11, 2009 and Government Regulation No 39, 2012 state that social service should be acted orientically, integratedly, and continously by government and community. Social Ministry Decree No 50/HUK/2013 on, integrated social service and movement toward regency/ municipality welfare, answers the need of integrity and community participation. An implementation of integrated social service in Payakumbuh Municipality is a program use action research approach that took three years (2013-2015)of implmentation. The first year, was to shape Anak Nagari social service unit (UPT-KAN). The second year was focused on the implementation of social service as community claims began. Guidance and advocation in the third year succesfully set social welfare institution (LKS), named Mitra Kenanga, functioned as an institution that diburse community fund as UPT-KAN operationalitation, targeted data base making, and socialization on the institution existence. Fun resources of UPT-KAN hailed from social and menpower and health agency, BAZ, Mitra Kenanga, and CSR. The existence of UPT-KAN in its application has proved poor community and people with social welfare problem easily to get base social service especially those have been untouched by regular social service program.

Keywords: Implementation; integrated social service; analisys

serapan anggaran, belum sampai pada *outcome* dan *impact*. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 mengamanatkan pelayanan sosial harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten/Kota Sejahtera menjawab kebutuhan keterpaduan dan peranserta masyarakat. Implementasi model Pandu Gempita di Kota Payakumbuh merupakan penelitian dengan pendekatan *action research* dan membutuhkan waktu tiga tahun, mulai 2013–2015. Tahun pertama, kelompok kerja berhasil membentuk Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Refleksi di tahun kedua difokuskan pada mekanisme layanan karena UPT-KAN telah mulai menerima pengaduan masyarakat dan berhasil direalisasikan. Pendampingan dan advokasi di tahun ketiga berhasil mendirikan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Mitra Kenanga yang difungsikan sebagai lembaga penerima dan penyalur dana masyarakat bagi operasional UPT-KAN, pembuatan *database* sasaran, dan sosialisasi keberadaan lembaga. Sumber anggaran UPT-KAN dari Dinsosnaker, Dinkes, BAZ, LKS Mitra Kenanga, dan CSR. Keberadaan UPT-KAN dalam aplikasinya terbukti mempermudah masyarakat miskin dan PMKS yang belum tersentuh program dalam mengakses layanan sosial dasar.

Kata Kunci: implementasi; model layanan sosial; Pandu Gempita

Mahmuddin (UIN Alauddin Makassar)
Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat
Teaching and Local Culture Strategy on Strengthening Populous Economy
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 25 - 34

This study is to know the local culture and teaching strategies on strengthening the economy of the people in Bira village. The research question is how economic portrait of Bira village people and how is the role

Penelitian ini mengkaji strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana potret ekonomi rakyat di Desa Bira dan mengapa memerlukan strategi

of local cultural and teaching strategies on strengthening the economy? The method used is qualitative research, through sociological approach, an approach that analyzes the social condition of the society as a whole among and its relation among the members in the community. Data premier source are women of Bira community, religous, local formal and informal, tourism figures, and related books as secondary data. Data are gathered through observation, interviews and document documentary analysis, data then analyzed through qualitative technique. The research shows that women are the backbone of the economy, after losing their husbands, through a weaving economic activity. There are two types of weaving apparels, namely Traditional Looms (TL) and Manual Looms (ML). The role of local culture and propagation strategies in strengthening the economy of Bira village people is sincere intention to be introduced in work, strengthen work ethic as part of Islamic teachings, teaches the importance of the honesty value and trustworthiness, instill values mandate in work and push to manufacture in woven gloves periodically as part of the local culture that needs to be preserved.

Key words: teaching and local culture strategies; people's economy; Bira

dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat? Metode penelitian yang digunakan kualitatif, dengan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menganalisis kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan antara orang-orang dalam masyarakat bersangkutan. Sumber data primer adalah wanita yang bekerja di sektor penenunan, tokoh agama, tokoh pariwisata, dan tokoh masyarakat setempat, dan buku-buku yang terkait sebagai data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa wanita-wanita atau isteri menjadi tulang punggung perekonomian setelah ditinggal suami melalui bertenun. Alat tenun yang digunakan masyarakat ada dua jenis yaitu Alat Tenun Tradisional (ATT) dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di desa Bira adalah memperkenalkan niat yang tulus dalam bekerja, memperkuat etos kerja sebagai bagian dari ajaran Islam, mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan, menanamkan nilai-nilai amanah dalam bekerja dan mendorong dalam pembuatan sarung tenun secara berkala sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu dipertahankan.

Kata kunci: strategi dakwah dan budaya lokal; ekonomi rakyat; Bira

Chulaifah dan Sri Prastyowati (B2P3KS)
Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Gelandangan Eks-psikotik
The Degree of Success on Ex-psychotic Homeless Rehabilitation
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 35 - 46

This research done to know the degree of success on homeless expsychotic rehabilitation seen from misconduct behavior aspect. Research location was at Pojoreken Homeless Institution, Medan Municipality, North Sumatera Province. Data gathered through documentary analysis of 15 files of moderate ex-homeless psychotic at the institution. Data are analysed through qualitatif-descriptive

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku. Lokasi penelitian di Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Psikotik Pojoreken, Medan, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen terhadap 15 *file* dari gelandangan eks psikotik dengan kadar sakit jiwa sedang. Analisis

technique, on the degree of success of guidance, self and social realization, social integration, work skill and vocation seen from misconduct behavior during rehabilitation. The research found that the ability of self and social realization, social integration after rehabilitation was not significant, execpt in work and vocational skills. The degree of fequency of misconduct behaviors do not immidiately change the ability of self and social realizations, social integration, except in work and vocational skills. Those because there was psychological and social problems, indicated in continously labil emotion that manifested through "smiling", talk with him/ herself, angry without any reason, retreat, easy-go, egoism, rage violently, confused, rejection, reluctant, strained, self hurting, lazy, steal, seek for rejected things, litering, silence, do not want bathing, talk all times, hurt others, and go anywhere. The research recommends that the guidance should be held continously, aspecially after rehabilitation and back to the community. Guidance should be given by those who understand on characteristic of homeless psichotic. It needs socialization among communities on homeless psichotic characteristic and services they need.

Keywords: ex- psychotic homeless; rehabilitation; degree of success.

data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan tingkat keberhasilan bimbingan; realisasi diri dan sosial, integrasi sosial, kemampuan keterampilan kerja kejuruan ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku selama masa rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemampuan realisasi diri, relasi dan integrasi sosial hasilnya sangat kecil, kecuali pada keterampilan kerja dan kejuruan. Tingkat keseringan penyimpangan perilaku gelandangan eks-psikotik tidak serta merta dapat mengubah kemampuan realisasi diri dan sosial, integrasi sosial, kecuali pada kemampuan keterampilan kerja kejuruan. Hal ini karena adanya masalah sosial psikologis, yang ditandai dengan emosi labil yang berkelanjutan dan terejawantah dalam bentuk penyimpangan perilaku tertawa, bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, menarik diri, *semau gue*, egois, mengamuk, kebingungan, penolakan, tegang, keengganan, penyangkalan, melukai diri sendiri, bermalas-malasan, mencuri, mencari dan menyimpan barang bekas, buang air besar dan kecil di sembarang tempat, bungkam, tidak mau mandi, bicara terus menerus, menyakiti orang lain, dan mengembara. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan bimbingan terus-menerus, terutama pada pascarehabilitasi dan kembali ke masyarakat. Bimbingan hendaknya dilakukan oleh orang yang memahami tentang karaktaristik gelandangan psikotik. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri gelandangan psikotik dan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi.

Kata kunci:penyimpangan perilaku; rehabilitasi; gelandangn eks-psikotik.

Setyo Sumarno (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial)
Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Social Organization Participation on Inhabitable House Rehabilitation
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 47 - 56

House is one the basic of need, as a place of rest and refuge from a variety of situations and threats. House is as well as a medium for the creation of social interaction,

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagai tempat untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman. Rumah juga sebagai

cultural tranfer, implementattion of family education, and even becomes a status symbol. For the moyority of people considered a poor family, house is just as a given regardless of its feasibility in terms of physical, mental and social. Jam'iyyah foundation ar Rahmah Kuwait, one of social organization helped Indonesian government in overcoming poverty through ininhabitable home repairement. Aid amounting to Rp 650 million for 65 housing units concentrated in rural districts Sidorejo, Bandongan, Magelang Regency, Central Java Province. Activities came out with the involvement of cadres of disaster preparedness, youth, social workers (PSM), social workers districts (TKSK) and scouts. Community participation were in the form of money, goods, energy, and mind. This success can not be separated from the role of village offials; community leaders, who facilitated for formation of the committee and mobilize communities to work together; Camat (district leader) role in facilitating the proposal; and local goverment in funding home improvements and refining. Home improvement which was originally planned only for impermanent purpose, became permanent new home with tiled floors and walls.

Keywords: inhabitable house; Jam'iyyah ar Rahmah foundations; rehabilitation

media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait salah satu organisasi sosial telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan sebesar Rp 650.000.000,- untuk 65 unit rumah dikonsentrasikan pada desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka. Partisipasi masyarakat dalam bentuk, uang, barang, tenaga, ataupun pikiran. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta aparat desa; tokoh masyarakat yang telah memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong; camat berperan dalam memfasilitasi proposal dan usulan; dan pemerintah daerah membantu dalam penambahan dana perbaikan rumah. Perbaikan rumah yang semula direncanakan hanya tambal sulam, menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok.

Kata kunci: Rumah tidak layak huni; Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah; rehabilitasi

Ameilia Zuliyanti Siregar[1] dan Husmiati[2] ((1) Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial)
***Trauma Healing* Anak-anak Korban Erupsi Gunung Sinabung**
Children Victims Trauma Healing of Sinabung Mountain Eruption
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 57 - 64

This essay writen based on research on trauma healing among children victims of Sinabung eruption in North Sumatra. Research method was survey and sixty children victims of Sinabung eruption were chosen as

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang pemulihan trauma di kalangan anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, 60 anak dipilih

respondents. Trauma healing handling done by a coordinated and integrated between the involvement of the whole society, NGOs, businesses and government agencies. The research found that 60 respondents 47.69 persen were boys and 52.31 persen were girls. Level of education, from primary school 76.93 persen, junior high school 15.38 persen and senior high school was 7.68 persen. The distributed questioaires answered by respondents showed there were three sacales, namely children stress symtom, children traumatic symtom, and violent symptom at refugees camps which were still be tolerated in numbers. Availability of psychological treatments were trauma healing, like singing, dancing, and drawing. It is suggested to the goverment, especially Ministry of Education, Ministry of Social Affairs, and related agencies in providing assistance to the victims should conduct an analysis on the rght benefit and target.

Keywords: eruption; children victims; trauma healing

menjadi responden. Hasil penelitian menemukan, 60 responden anak-anak terdiri atas, 47.69 persen anak laki-laki dan 52.31 persen anak perempuan, dengan tingkat pendidikan SD 76.93 persen, SMP 15.38 persen, dan SMA 7.68 persen. Hasil jawaban responden menunjukkan, terdapat skala stress anak, skala gejala trauma anak, dan skala kekerasan di pengungsian dalam jumlah yang masih ditoleransi. Pemenuhan kebutuhan psikis untuk menghilangkan trauma (*trauma healing*), dengan cara menyanyi, menari, melukis, materi edukasi, pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatan mental keagamaan, informasi dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan sosial psikologis di pengungsian masih terbatas. Disarankan kepada pemerintah, khususnya kementerian pendidikan dan kementerian sosial, dan lembaga terkait, agar dalam memberi bantuan kepada korban bencana erupsi Gunung Sinabung terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan yang tepat guna dan sasaran.

Kata Kunci: erupsi; anak-anak korban; trauma pemulihan

Suryani dan Enni Hardiati (B2P3KS)
Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak
The Role of Social Worker Dedicating Unit on Children Social Welfare Program
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 65 - 76

This research is to describe the role of social worker dedicating unit on giving guidance children social welfare program (PKSA), as national priority through presidential instruction No 3, 2010 on justifiable development. PKSA is designed to protect and give services for children basic right, covering love, protection, sustainable live, grow and develop, that of several reasons their family could not fulfil them. The PKSA implementator is social worker dedicating unit or volounteer, graduated from bachelor or full degree of social work school, through selection, education, and appointment as contract social worker. Research location

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) dalam memberi pendampingan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), merupakan program Kementerian Sosial sebagai prioritas nasional, ditetapkan dalam Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. PKSA ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak, yang meliputi kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, yang karena berbagai sebab keluarga tidak dapat memenuhi. Pelaksanaan PKSA adalah sakti peksos dan tenaga sukarela, yang lulus D

in Jambi Municipality, because in that municipality found many children problems and social worker that guide in solving the problem. Data are analised with qualitative technique. The research finds that the exixtence of social worker as children problem solving guidance is diterminative on the succes of the program. The role of social worker is helpful in giving service and guidance to the children. The handicap factor is the location that far in distance and found only one social worker in one municipality, not in balance with the quantity and quality of the problem. The salary also too small and coming late, no motorbike facility that makes social worker working with less enthusiasm. The supporting factor is sinergy among stakeholders commited to children problem. It recommended to the ministry of social affairs, especially the directorate of children affairs, should keep the existence of social worker and add its quantity in every municipality given the number of the increasing children problem.

Keywords: social worker; guidance;children problem.

IV/S1 jurusan pekerja sosial dan terseleksi, dididik dan diangkat sebagai pekerja sosial dengan status kontrak. Lokasi penelitian di Kota Jambi, karena di kota tersebut terdapat sakti peksos dan masalah anak yang cukup tinggi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan, bahwa keberadaan sakti peksos dalam melaksanakan peran sebagai pendamping anak sangat menentukan keberhasilan program. Peran sakti peksos sangat membantu dalam memberi pelayanan dan pendampingan anak. Faktor penghambat jangkauan wilayah yang sangat luas dan jauh, sehingga sakti peksos kesulitan melakukan pendampingan karena di setiap Kota/ Kabupaten hanya terdapat seorang pekerja sosial, tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi. Gaji yang diterima juga selalu terlambat dan kurang memadai, tidak ada fasilitas sepeda motor sehingga membuat sakti peksos tidak semangat dalam melakukan tugas. Faktor pendukung adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan satuan bakti pekerja sosial dalam memberi pendampingan bagi anak. Rekomendasi bagi Kementerian Sosial khususnya direktorat anak agar mempertahankan keberadaan sakti peksos di setiap daerah khususnya di Kota Jambi dan jumlah ditambah, tidak hanya satu setiap kota/ kabupaten, mengingat permasalahan anak yang cukup banyak.

Kata kunci: sakti peksos; pendampingan; masalah anak.

Soetji Andari (B2P3KS)
Analisis terhadap *Masterplan* Penanganan Anak Jalanan
Analysis on the Masterplan Model of Street Children Handling
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 1 Maret 2016, hal 77 - 88

The existence of street children in various areas need special handling, problems related with them are education, abandonment, violence, discrimination and child labor. The local government of Sleman Regency initiates street children handling through a masterplan made through assessment, focus group

Fenomena anak-anak jalanan merupakan salah satu masalah di daerah yang memerlukan perhatian sendiri, permasalahan anak-anak tersebut berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, keterlantaran, kekerasan, diskriminasi, dan pekerja anak. Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, berupaya menangani

discussion held with stakeholders related to street children handling, and comparative study in order to make a coprehensive masterplan. The research uses qualitative-descriptive approach. Data are gathered throuh interviews with numbres of street children, stakeholders related to street children (government and non-government), and street children guides. The masterplan is designed to handle and overcome streetchildren problems totally, coordinated, continue, and functioned as guidance for stakeholders related to children issues having the same perception toward street children.

Keywords: masterplan; handling; street children

anak jalanan melalui *masterplan* yang disusun melalui *assessment, focus group discussion* dengan berbagai pemangku kepentingan, dan studi banding untuk mendapat model penanganan anak jalanan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan anak jalanan, pemangku kepentingan peduli anak jalanan (pemerintah dan LSM), dan pendamping anak jalanan. Tujuan dari *masterplan* penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman agar dapat menangani masalah dan mengatasi anak jalanan secara menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, dan panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dan lembaga peduli anak yang terlibat dalam melakukan perlindungan anak sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Kata kunci: *masterplan;* penanganan; anak jalanan

1

Penanganan Anak Autis dalam Interaksi Sosial

Autism Children Handling on Social Interaction

Asrizal
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Jln. Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta, 55281. HP 085225951270 <asrizalsaiin@gmail.com>.
Diterima 24 Oktober 2015, diperbaiki 10 Februari 2016, disetujui 21 Februari 2016.

Abstract

This paper offers solutions for social workers in the treatment of autism in terms of social interaction problem. Social workers can practice it on the field in an attempt to deal with autism in social interaction through performing several approaches. Currently, many social workers do not know how to deal with autism who have problems in their social interactions, whereas the responsibility of social workers tasks are relegating autists in the community. This paper offers two forms of treatment of autism, early treatment and integratedhandling. This has become the focus of discussion in this paper to guide social workers no longer face trouble in handling social interaction of children with autism, which usually has been a problem in the fieldfor social workers.

Keywords: autis; interaction; social workers

Abstrak

Tulisan ini menawarkan solusi bagi pekerja sosial dalam penanganan autisme yang bermasalah dalam hal interaksi sosialnya. Pekerja sosial dapat mempraktekkannya di lapangan. Dalam upaya untuk menangani autisme dalam interaksi sosial, pekerja sosial dapat melakukan beberapa pendekatan. Perkembangan saat ini, banyak pekerja sosial tidak tahu cara menangani autisme yang bermasalah dalam interaksi sosialnya, padahal menjadi tanggungjawab serta tugas mereka ketika diturunkan dimasyarakat. Tulisan ini menawarkan dua bentuk penanganan autisme, yaitu penanganan dini dan penangan terpadu. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Konsep dasar yang ditawarkan adalah melalui dua bentuk penanganan yang ditawarkan, pekerja sosial tidak kesulitan lagi menangani permasalahan interaksi sosial anak autis, yang selama ini menjadi problem di lapangan.

Kata kunci: autisme; interaksi; pekerja sosial

A. Pendahuluan

Fakta menyebutkan kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial.[1] Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan miskin, artinya lahir dalam kekurangan, seperti cacat atau tidak sempurna baik fisik maupun mental. Orang tua, kadang juga tidak dapat menerima anaknya menderita autis, karena orang tua mempunyai beban yang berat dan menjadi aib keluarga. Orang tua yang mau menerima anaknya mengalami gejala autis memerlukan biaya yang cukup besar untuk dapat mengobati dan memasukkan anaknya ke yayasan atau lembaga yang dapat menangani masalah anak autis.

Autisme bukan sekedar kelemahan mental tetapi gangguan perkembangan mental, sehingga penderita mengalami kelambanan dalam kemampuan, perkembangan fisik dan psikisnya pun tidak mengikuti irama dan tempo perkembangan yang normal.[2] Hakekatnya anak penderita autis juga memerlukan pendidikan dan bimbingan sebagaimana anak normal lainnya, karena sebenarnya anak berkelainan itu juga mempunyai potensi untuk dikembangkan, potensi tersebut akan dapat dikembangkan semaksimal mungkin

apabila mendapat pengaruh-pengaruh atau bimbingan.[3] Penanganan anak autis harus dilakukan terapi dini dengan melibatkan ahli dari berbagai multidisiplin dan orang tua. Faktor waktu menjadi penentu bagi penyembuhan kasus autisme, artinya semakin cepat seorang anak terdekteksi terkena penyakit autis, semakin mudah mengatasinya, karena keberhasilan terapi tergantung pada berat ringannya gejala yang ada, umur memulai terapi dan dukungan orang tua.[4]

Sejatinya penanganan anak autis harus dilakukan dengan melibatkan ahli dari berbagai multidisiplin, salah satunya adalah pekerja sosial. Profesi yang memberi pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan keberfungsian sosial dan membantu memecahkan masalah sosial disebut dengan pekerjaan sosial. Pekerja sosial adalah seorang yang memiliki profesi dalam membantu memecahkan masalah dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat serta mendekatkan mereka dengan sistem sumber.[5] Pekerja sosial dalam menjalankan tugas berada dalam naungan badan-badan sosial yang bergerak dalam pelayanan sosial, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dalam memberikan layanan sosial.

Pekerja sosial dituntut dapat mengenal kecenderungan-kecendrungan negatif yang terjadi pada anak. Pekerja sosial juga harus memiliki *basic skill* dalam berkomunikasi, pengetahuan serta sikap yang baik dalam membina dan memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak. Pekerja sosial membutuhkan peran orang-orang yang dekat dengan anak, seperti peran orang tua, teman dan lingkungan yang dijadikan sebagai faktor pembentuk dan penentu kematangan sosial anak. Suatu kerjasama dapat diwujudkan apabila pekerja sosial dengan pelaku interaksi saling berhubungan dan melakukan interaksi sosial, sehingga dibutuhkan adanya seorang pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial pada anak.

Anak dalam pertumbuhannya sangat membutuhkan kasih-sayang, memaafkan, dan mencintai. Keseimbangan antara kasih-sayang dan memaafkan-mencintai merupakan kombinasi konsep dalam membangun struktur awal guna menciptakan cinta suci dalam keluarga.[6] Termasuk dilingkungan masyarakat, harus adanya belas kasihan dan saling berbagi kasih antara satu orang dengan yang lainnya. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya lahir dalam keadaan sempurna (normal), ketika kenyataan yang dihadapi lain (anaknya lahir dalam keadaan autis), orang tua seharusnya tetap bisa menganggap anak sebagaimana mestinya dia bertanggung jawab bahkan mungkin lebih mendapatkan perhatian, agar penanganan terhadap kelainan yang terjadi pada anak juga tidak mengalami kesalahan. Peranan orang tua anak autis dalam membantu anak untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan optimal sangatlah menentukan, sebab orang tua adalah pembimbing dan penolong yang paling baik dan berdikasi tinggi.[7]

Dari beberapa hambatan perkembangan anak autis yaitu hambatan emosional dan interaksi sosial, penulis hanya berfokus pada interaksi sosial pada anak autis, karena seperti yang telah diterangkan sebelumnya, anak autis memiliki hambatan komunikasi sosial, sehingga penelitian yang mengkaitkan anak autis dengan interaksi sosial menjadi sangat penting.

Dari permasalan di atas, membuat penulis tertarik untuk mengakaji ulang mengenai permasalahan interaksi sosial pada anak autis. Melihat realitas yang ada, anak autis akan selalu ada dan memerlukan pemecahan permasalahan, yaitu ketika anak autis melakukan interaksi sosial. Bagaimana upaya penanganan yang sesuai dan seharusnya diterapkan pada penyandang autis, khususnya tentang penanganan interaksi sosial anak autis. Tujuan dan manfaat dari penulisan ini: *pertama*, untuk menjelaskan serta mengetahui tingkat keberfungsian pekerja sosial dalam menangani persoalan anak autis, terutama persoalan interaksi sosial anak. Dengan cara mengetahui gejala-gejala yang timbul dalam

diri anak autis, diharapkan dapat mengatasi dan menangani ketidakberfungsian interaksi sosial pada anak autis. *Kedua,* dapat menjadi tolak ukur yang komprehensif mengenai upaya yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam penanganan sosial anak, sehingga dapat menjadi acuan dalam memacu kemampuan pekerja sosial. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah sebagai jawaban atas permasalahan sosial bagi anak autis dalam menentukan kemampuan sosial dan memberi solusi untuk menangani anak autis dalam berinteraksi di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima anak autis dengan semestinya.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library reserch*) atau studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsep kebijakan teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penulisan pendahulu yang berkaitan dengan objek telaah penulisan ini berupa literatur karya tulis ilmiah. Riset pustaka yang membatasi kegiatan hanya kepada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja sedangkan data-data wawancara dipergunakan untuk mengkonfirmasi dan memperjelas (klarifikasi) data-data yang diperoleh dari pustaka tersebut.[8] Wawancara digunakan jika data yang dibutuhkan berhubungan dengan interaksi sosial anak autis tidak terpenuhi dengan maksimal.

Penulisan ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis tindakan pekerja sosial terhadap permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sosial anak, dan menganalisis tentang upaya pekerja sosial dalam mengenalkan kemampuan sosial anak. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus.

C. Interaksi Sosial Anak Autis

Pengertian anak autis memiliki banyak makna (multi tafsir), tergantung dari sudut mana pengertian tersebut diambil. Anak autis sering juga disebut dengan Autisme atau golongan autis. Secara terminologi, autisme dapat diartikan sebagai, (1) gejala menyendiri atau menutup diri secara total dari dunia riil dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan dunia luar, (2) ialah cara berfikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri, (3) menanggapi dunia berdasarkan penglihatan, harapan sendiri dan menolak realitas, dan (4) keasyikan ekstrim dengan fikiran dan fantasi sendiri.[9]

Ditinjau dari segi perilaku, anak-anak penderita autis cenderung untuk melukai dirinya sendiri, tidak percaya diri, bersikap agresif, menanggapi secara kurang atau berlebihan terhadap stimulasi eksternal, dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya secara tidak wajar.[10] Autisme memiliki gejala-gejala utama yang menonjol pada diri anak autis, sehingga bagi orang lain dapat mengenali bahwa anak tersebut adalah anak autis atau autisme. Gejala-gejala tersebut meliputi gangguan atau keanehan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Autisme juga memiliki gangguan dalam kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun anverbal. Selain itu juga autisme memiliki gangguan keanehan dalam berperilaku.[11]

Penyebab autis belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli dan dokter di dunia masih memperdebatkannya. Beberapa peneliti mengungkapkan terdapat gangguan biokimia, ahli lain berpendapat bahwa autisme disebabkan oleh gangguan jiwa. Ahli lainnya lagi berpendapat karena kombinasi makanan yang salah atau lingkungan yang terkontaminasi zat-zat beracun sehingga mengakibatkan kerusakan pada usus besar, kemudian mengakibatkan masalah dalam tingkah laku dan fisik, termasuk autis.[12] Widyawati mengemukakan bahwa ada berbagai macam teori tentang penyebab autis, yaitu teori psikososial, teori biologis dan teori imunologi.[13] Gangguan autisme menyebabkan anak-anak pe-

nyandang autis semakin jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan anak-anak non-autis yang sebaya ketika usia mereka semakin bertambah. Apabila dibandingkan dengan anak normal, anak-anak autis jauh lebih sedikit belajar dari lingkungannya.

Anak-anak autis tidak belajar dengan cara yang sama seperti anak yang lain seusianya. Anak autis menunjukkan kegagalan membina hubungan interpersonal yang ditandai dengan kurangnya respons terhadap lingkungan atau kurangnya minat kepada orang atau anak di sekitarnya. Kekhususan pada anak autis adalah sulitnya berkonsentrasi, memiliki dunia sendiri, sehingga anak auis sulit berinteraksi dengan lingkungan. Anak autis memiliki cara berfikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, menolak realitas dan memiliki keasyikan yang ekstrim dengan pikiran dan fantasinya sendiri.

Berdasarkan kajian teori yang diangkat serta paradigma terhadap teori tersebut, selanjutnya penulis akan sedikit mengupas dan mengulas masalah interaksi sosial bagi anak autis, bagaimana penanganan interaksi sosial terhadap anak autis dan solusi yang ditawarkan untuk pekerja sosial, melihat hal ini merupakan ladang garapan atau tugas sosial yang diemban oleh pekerja sosial. Dengan harapan pekerja sosial tidak kaku dalam menangani anak autis ketika terjun di lapangan.

1. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.[14] Interaksi menurut H. Bonner dalam bukunya "Sosial Psikologi", mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih. Satu individu manusia dimana kelakuan individu tersebut dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya.[15]

Interaksi sosial dalam karya tulis ini adalah sebagai hubungan, keterlibatan, ketertarikan timbal balik personalitas anak autis terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau gerakan-gerakan untuk mengutarakan kepada orang lain. Pada interaksi sosial ini anak autis tidak mampu menjalin hubungan dengan baik, baik dengan menunjukkan suatu perilaku atau ciri khusus, seperti kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak gerik yang tertuju, menangis atau tertawa tanpa sebab, tidak bisa bermain dengan teman sebaya, tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain dan kurangnya hubungan sosial (tidak mampu bersosialisasi) dan beradaptasi dengan lingkungan, maupun keterlibatan emosional secara timbal balik.

2. Hambatan Kualitatif dalam Interaksi Sosial Anak Autis

Dalam pencarian data penulisan karya ilmiah ini, didapati minimal ada dua gejala yang timbul dari gejala-gejala berikut yang terjadi pada anak yang mengalami gangguan interaksi sosial, yakni:[16] Kontak mata sangat kurang, ekspresi wajah yang kurang hidup, gerak gerik yang kurang fokus; Tidak bisa bermain dengan teman sebaya; Tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain; Kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik.

Pendapat lain, gangguan interaksi sosial pada anak autisme dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:[17] Menyendiri (*Aloof*), banyak terlihat pada anak-anak yang menarik diri, acuh tak acuh dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan perilaku serta perhatian yang terbatas (tidak hangat); Pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya; Aktif tapi aneh, secara spontan akan mendekati anak lain, namun interaksi ini sering kali tidak sesuai dan sering hanya sepihak.

Beberapa gangguan interaksi sosial pada anak autisme yang telah disebutkan, menimbulkan hambatan sosial bagi anak autis. Hambatan sosial anak autis akan berubah sesuai dengan perkembangan usia. Biasanya, dengan bertambahnya usia maka hambatan akan tampak berkurang. Adapun hambatan yang dialami anak autis adalah sebagai berikut:[18] Sejak tahun pertama, anak autis mungkin telah menunjukkan adanya gangguan pada interaksi sosial yang timbal balik, seperti menolak untuk disayang atau dipeluk, tidak menyambut ajakan ketika akan diangkat dengan mengangkat kedua lengannya, kurang dapat meniru pembicaraan atau gerakan badan, gagal menunjukkan suatu objek kepada orang lain, serta adanya gerakan pandangan mata yang abnormal; Permainan yang bersifat timbal balik mungkin tidak akan terjadi.

Sebagian anak autis tampak tidak acuh atau tidak beraksi terhadap pendekatan orang tuanya, sebagian lainnya malahan merasa cemas apabila berpisah dan melekat pada orang tuanya. Anak autis gagal dalam mengembangkan permainan bersama teman-temannya, mereka lebih suka bermain sendiri. Keinginan untuk menyendiri yang sering tampak pada masa kanak-kanak akan makin menghilang dengan bertambahnya usia, walaupun mereka berminat untuk mengadakan hubungan dengan teman, sering kali terdapat hambatan karena ketidakmampuan mereka untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam interaksi sosial. Kesadaran sosial yang kurang inilah yang mungkin menyebabkan mereka tidak mampu untuk memahami ekspresi wajah orang, ataupun untuk mengekspresi perasaannya, baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah. Kondisi tersebut menyebabkan anak autis tidak dapat berempati kepada orang lain yang merupakan suatu kebutuhan penting dalam interaksi sosial yang normal.

3. Penanganan pada Anak Autis

Umumnya, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih berat lagi untuk dapat mengatasinya.[19] Pada kondisi tertentu, pekerja sosial juga mengalami kesulitan ketika menangani anak autis. Menurut Mirza Maulana dalam bukunya "Anak Autis", penanganan autisme mencakup dua hal, yaitu penanganan dini dan penanganan terpadu. Untuk penanganan dini, terdiri dari beberapa cara:

a. Intervensi dini:[20] Autisme memang merupakan gangguan neurobioligis yang menetap. Gejalanya tampak pada gangguan bidang komunikasi, interaksi dan perilaku. Gangguan neurobiligis tidak bisa diobati, tetapi gejala-gejalanya bisa dihilangkan atau dikurangi, sampai orang awam tidak lagi dapat membedakan mana anak non-autis dan mana anak autis. Semakin dini terdiagnosis dan terintervensi, semakin besar kesempatan untuk "sembuh". Penyandang autisme dinyatakan sembuh bila gejalanya tidak kentara lagi sehingga ia mampu hidup dan berbaur secara normal dalam masyarakat luas. Intervensi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang penting berusaha merangsang anak secara intensif sedini mungkin agar ia mampu keluar dari dunianya sendiri.
b. Dibantu Terapi di Rumah:[21]Salah satu metode intervensi dini yang banyak diterapkan di Indonesiaa adalah modifikasi atau lebih dikenal ABA (*aplied behavior analysis*), yang ditemukan oleh psikolog asal Amerika, O. Ivar Lovaas di tahun 1964.[22] Melalui metode ini, anak dilatih melakukan berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup bermasyarakat, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, berbahasa dan seterusnya. Namun terutama yang perlu diterapkan adalah latihan kepatuhan. Hal ini sangat penting agar mereka dapat mengubah perilaku seenaknya sendiri menjadi perilaku yang lazim dan diterima masyarakat. Kelebihan metode intervensi ini adalah pendekatannya yang sistematis, terstruktur dan terukur pada penyandang autisme untuk mengetahui ketidakmampuannya.

c. Masuk Kelompok Khusus:[23] Biasanya setelah 1-2 tahun menjalani intervensi dini dengan baik, si anak siap untuk masuk kekelompok kecil, bahkan ada yang siap untuk masuk kekelompok bermain. Mereka yang belum siap masuk kekelompok bermain, bisa diikutsertakan kekelompok khusus. Dikelompok ini mereka mendapatkan kurikulum yang khusus dirancang secara individual, disini pula anak akan mendapatkan berbagai tenaga ahli, seperti psikiater, psikolog, terapis wicara, terapis okupasi dan *ortopedagog.*

Menurut Abdul Hadis dalam bukunya "Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik" mengistilahkan dengan layanan pendidikan, yaitu meliputi layanan pendidikan awal dengan program intervensi dini, dengan program terapi penunjang dan layanan pendidikan lanjutan.[24] Depdiknas dalam hal memberikan layanan pendidikan awal dengan program penanganan dini, mengemukakan bahwa program penanganan dini untuk anak autis mencakup:[25] *Discrete Trial Training (DTT)* dari lovaas, program yang didasari oleh model perilaku "*operant conditioning*" yaitu pemberian hadiah atau penguatan terhadap perilaku positif yang terjadi dan dikehendaki oleh guru, orang tua dan masyarakat, agar perilaku baik itu diulang-ulang atau dipertahankan. Intervensi *learning experience and alternative program for preschooler and parent (LEAP).* Program *LEAP* adalah perkembangan sosial anak (kekurangan sosial yang dialami anak autistik). Model *LEAP* menggunakan teknik pengajaran *reinforcement* (penguatan) dan kontrol terhadap stimulus.

a. *Floor time,* yaitu berdasar pada teori perkembangan keterampilan kognitif dalam 4-5 tahun pertama kehidupan yang didasarkan pada emosi dan *relationship.* Greenspan dkk mengembangkan suatu pendekatan perkembangan terpadu untuk intervensi anak yang mempunyai kesulitan besar dalam berhubungan, berkomunikasi dan teknik intervensi interaktif yang sistematik. Inilah yang disebut *floor time.*

b. *Treatment and Education of autistik and Related Comunication Handicapped Children (TEACH).* Penanganan dalam program ini termasuk diagnosa, terapi, konsultasi, kerjasama dengan masyarakat sekitar, karena telah dipandang sebagai keluarga dan komunitas yang hamonis,[26] tunjangan hidup dan tenaga kerja dan berbagai pelayanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang khusus para terapis, dalam program *TEACH* harus memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang termasuk *speech pathology,* lembaga kemasyarakatan, intervensi dini, pendidikan luar biasa dan psikologi. Konsep pembelajaran dari model atau pendekatan *TEACH* berdasarkan pada tingkah laku, perkembangan dan dari sudut pandang teori ekologi yang berhubungan dengan dasar autisme.

Penanganan kedua yang dilakukan adalah penangan terpadu. Penanganan terpadu bagi anak autis merupakan sebuah keharusan apabila penanganan dini tidak berhasil secara objektif, apalagi orang tua menginginkan anaknya dapat sembuh dari gangguan autis. Selain pekerja sosial, orang tua memiliki peran penting karena dibutuhkan pemahaman, kasabaran dan konsistensi dalam upaya penyembuhan anak dari gangguan autis. Proses pendidikan dan pengajaran yang didapatkan oleh anak dari orang tua, sekolah, dan lingkungan sangat berpengaruh pada keberhasilan penanganan autis pada anak.[27]

Berdasarkan penelitian, untuk mendukung penanganan terpadu bagi anak autis, orang tua dapat memakai produk-produk herbal yang mengandung buah noni. Buah noni terbukti efektif dapat menyembuhkan autis pada anak. Produk herbal tersebut diharapkan mengandung buah noni yang memiliki lebih dari dua ratus kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.[28]

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bahwa seorang pekerja sosial dalam menangani anak autis yang

bermasalah terhadap interaksi sosialnya, dapat dilakukan dengan berbagai penangan. Dalam penulisan ini, memberikan dua bentuk penanganan, yang sebelumnya diketahui terlebih dahulu gejala yang timbul pada anak yang mengalami gangguan interaksi sosial. Setidaknya perlu diketahui terlebih dahulu dua gejala pada anak yang mengalami gangguan interaksi sosial. Dari gangguan interaksi sosial tersebut, barulah dapat diketahui anak tersebut mengalami hambatan sosial. Hambatan sosial anak autis yang timbul akan berubah sesuai dengan perkembangan usia. Biasanya, dengan bertambahnya usia maka hambatan akan tampak berkurang.

Penanganan autisme mencakup dua hal, yaitu penanganan dini dan penanganan terpadu. Untuk penanganan dini, terdiri dari beberapa cara, seperti intervensi dini, dibantu terapi di rumah, dan masuk kelompok khusus. Adapun penanganan terpadu bagi anak autis menjadi sebuah keharusan apabila penanganan dini tidak berhasil secara objektif. Apalagi orang tua menginginkan anaknya dapat sembuh dari gangguan autis. Berdasarkan penelitian, penanganan terpadu bagi anak autis dapat dilakukan dengan cara memakai produk-produk herbal yang mengandung buah noni. Buah noni terbukti efektif dapat menyembuhkan autis pada anak.

Pustaka Acuan

Dayakisni, Tri dan Hadaniah. (2003). *Psikologi Sosial,* Malang: UMM Press,

Hadis, Abdul. (2006). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik,* Bandung: Alfabeta

Huri, Daman, dkk. (2008). *Demokrasi dan Kemiskinan,* Malang: Averroes Press

Kartini, Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Bandung: CV. Mandar Maju

Maulana, Mirza. (2007). *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat,* Yogyakarta: Kata Hati

Mulder, Niels. (2004). *Individual, Society and History According to Indonesia School Texts,* terj. A. Widyamartaya, *Individu, Masyarakat, dan Sejarah,* cet.5, Yogyakarta: Kanisius

Salam, Kang YS. (2013). *Terapi Cinta; Metode Menciptakan Cinta Suci Dalam Keluarga,* Yogyakarta: Bintang Motivasi

Shomad, Abd. (2011). Nuansa Islami Pada Perawatan Anak Penderita Autisme*, Jurnal Penelitian Agama,* Vol.X, No. 3,

Tim Dosen PPB FIB UNY. (1993). *Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah,* Yogyakarta: UUP-UNY

Walgito, Bimo. (1990). *Psikologi Sosial,* edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi

Yusak S. (2008). *Introduksi Pada Anak Berkelainan,* Yogyakarta: SGPIB Negeri Yogyakarta

Zed, Mestetika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Ferizal Mesra. (2013). *Autisme: Gangguan Perkembangan Anak,* (www.tempo.com), diakses pada tanggal 27 September 2013

Wawachayo. (2014). *Pengertian Fungsi dan Peran Pekerjaan Sosial.* HTML Document. (http//www.wawachayoo.blogspot.com), diakses pada tanggal 4 maret 2014.

Widodo Judarwanto. (2014). *Penyebab autis belum diketahui secara pasti.* diakses tanggal 7 Juni 2014

Julia Maria Van Tiel. (2013). *Gejala Awal Autisme,* (www.balita-anda.com), diakses pada tanggal 27 Oktober 2013

Hardiono D. Pusponegoro. (2013). *Autisme: Gangguan Perkembangan Anak,* (www.tempo.com), diakses pada tanggal 27 September 2013

Sofiatun. (2014). *Penanganan Terpadu Bagi Anak Autis Sebuah Keharusan.* (www.penangananautis.com), diakses pada 17 Oktober 2015

Footnotes

[1]) Daman Huri, dkk, *Demokrasi dan Kemiskinan,* Malang: Averroes Press, 2008.

[2]) Abdul Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik,* Bandung: Alfabeta, 2006.

[3]) Yusak S, *Introduksi Pada Anak Berkelainan,* Yogyakarta: SGPIB Negeri Yogyakarta, 2008.

[4]) Abd. Shomad, *Nuansa Islami Pada Perawatan Anak Penderita Autisme, Jurnal Penelitian Agama* vol.x no. 3, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

[5]) Wawachayo, *Pengertian Fungsi dan Peran Pekerjaan Sosial.* HTML Document http://wawachayoo.blogspot.com, akses pada tanggal 4 maret 2014.

[6]) Kang Salam YS, *Terapi Cinta; Metode Menciptakan Cinta Suci Dalam Keluarga,* Yogyakarta: Bintang Motivasi, 2013.

[7]) Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat,* Yogyakarta: Kata Hati, 2007.

[8]) Mestetika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

[9]) Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.

[10]) Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat,* Yogyakarta: Kata Hati, 2007.
[11]) Abd. Shomad, *Nuansa Islami Pada Perawatan Anak Penderita Autisme.*
[12]) Widodo Judarwanto, diakses tanggal 7 Juni 2014.
[13]) Abdul Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik,* Bandung: Alfabeta, 2006.
[14]) Bimo Walgito, *Psikologi Sosial,* edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1990.
[15]) Tri Dayakisni, Hadaniah, *Psikologi Sosial,* Malang: UMM Press, 2003.
[16]) Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis.*
[17]) *Ibid.*
[18]) Ferizal Mesra, *Autisme: Gangguan Perkembangan Anak,* www.tempo.com, akses pada tanggal 27 September 2013.
[19]) Tim Dosen PPB FIB UNY, *Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah,* Yogyakarta: UUP-UNY, 1993.
[20]) Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis.*
[21]) Julia Maria Van Tiel, *Gejala Awal Autisme,* www.balita-anda.com, akses pada tanggal 27 Oktober 2013.
[22]) Hardiono D. Pusponegoro, *Autisme: Gangguan Perkembangan Anak,* www.tempo.com, akses pada tanggal 27 September 2013.
[23]) Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis.*
[24]) Abdul Hadis, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik.*
[25]) *Ibid.*
[26]) Niels Mulder, *Individu, Masyarakat, dan Sejarah,* diterjemahkan dari *Individual, Society and History According to Indonesia School Texts,* oleh A. Widyamartaya, cet.5, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
[27]) Lihat penanganan autis.com, *http://penangananautis.com/penanganan-terpadu-bagi-anak-autis-sebuah-keharusan,* akses pada 17 Oktober 2015
[28]) *Ibid.*

2

Analisis Implementasi Model Pelayanan Sosial Pandu Gempita

Analisys on the Implemetation of Integrated Social Service Model

Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
Jl Kesejahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Telpon (0274) 377265.
HP 08157934607 Email: <diyanasasongko@yahoo.com>.
Diterima 7 Maret, diperbaiki 14 Maret, disetujui 24 Maret 2016.

Abstract

The current social services as present are still sectoral, fragmented, limited outreach, respond only actual problem, output based on budget absorbtion, they have not yet reached outcome and impact. Law No 11, 2009 and Government Regulation No 39, 2012 state that social service should be acted orientically, integratedly, and continously by government and community. Social Ministry Decree No 50/HUK/2013 on, integrated social service and movement toward regency/ municipality welfare, answers the need of integrity and community participation. An implementation of integrated social service in Payakumbuh Municipality is a program use action research approach that took three years (2013-2015)of implmentation. The first year, was to shape Anak Nagari social service unit (UPT-KAN). The second year was focused on the implementation of social service as community claims began. Guidance and advocation in the third year succesfully set social welfare institution (LKS), named Mitra Kenanga, functioned as an institution that diburse community fund as UPT-KAN operationalitation, targeted data base making, and socialization on the institution existence. Fun resources of UPT-KAN hailed from social and menpower and health agency, BAZ, Mitra Kenanga, and CSR. The existence of UPT-KAN in its application has proved poor community and people with social welfare problem easily to get base social service especially those have been untouched by regular social service program.

Keywords: Implementation; integrated social service; analisys

Abstrak

Pelayanan sosial yang dilakukan berbagai lembaga selama ini masih bersifat sektoral, fragmentaris, jangkauan terbatas, hanya merespons masalah aktual, dan *output* atas dasar serapan anggaran, belum sampai pada *outcome* dan *impact*. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 mengamanatkan pelayanan sosial harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten/ Kota Sejahtera menjawab kebutuhan keterpaduan dan peranserta masyarakat. Implementasi model Pandu Gempita di Kota Payakumbuh merupakan penelitian dengan pendekatan *action research* dan membutuhkan waktu tiga tahun, mulai 2013–2015. Tahun pertama, kelompok kerja berhasil membentuk Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Refleksi di tahun kedua difokuskan pada mekanisme layanan karena UPT-KAN telah mulai menerima pengaduan masyarakat dan berhasil direalisasikan. Pendampingan dan advokasi di tahun ketiga berhasil mendirikan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Mitra Kenanga yang difungsikan sebagai lembaga penerima dan penyalur dana masyarakat bagi operasional UPT-KAN, pembuatan *database* sasaran, dan sosialisasi keberadaan lembaga. Sumber anggaran UPT-KAN dari Dinsosnaker, Dinkes, BAZ, LKS Mitra Kenanga, dan CSR. Keberadaan UPT-KAN dalam aplikasinya terbukti mempermudah masyarakat miskin dan PMKS yang belum tersentuh program dalam mengakses layanan sosial dasar.

Kata Kunci: implementasi; model layanan sosial; Pandu Gempita

A. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Pada dasarnya setiap orang sebagai individu dan warga masyarakat mempunyai kebutuhan dasar, dan sudah sewajarnya apabila mencoba dan berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat menjadikan mereka dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, atau dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 menyebutkan, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun dalam kenyataannya, masih ada warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial, atau tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dilakukan melalui pelayanan sosial, yakni suatu aktivitas terorganisir yang bertujuan menolong orang-orang agar terdapat suatu penyesuaian timbal balik antara individu dan lingkungan sosial (Syarif Muhidin, 1981). Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang mengarah pada terciptanya kondisi sosial sasaran garap yakni memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sianipar (1999) hakekat pelayanan sosial meliputi: Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan sosial; Mendorong efektivitas sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan sosial dapat diselenggarakan secara lebih berdaya dan berhasil guna; Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peranserta warga masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan sosial dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengintegrasikan penyandang masalah sosial kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial, melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Rehabilitasi sosial, pada dasarnya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin antara lain fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial juga diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan dan kepedulian

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas menejemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan implementasi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan harus didukung dengan kebijakan dan program pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Menurut Suharto (2009) ".... *welfare* (kesejahteraan) secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas menyejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang tidak beruntung". Hal tersebut menunjukkan, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya untuk mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Mengingat permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, maka membutuhkan penanganan yang tepat dan terintegrasi, lintas sektor serta dengan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini masih bersifat sektoral, jangkauan pelayanan terbatas, dan hanya merespons masalah aktual secara reaktif. Penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan berbagai lembaga selama ini terkesan hanya memikirkan *output* atas dasar serapan anggaran, belum sampai pada *outcome* dan *impact* yang terjadi pada penerima layanan. Masing-masing lembaga memiliki prosedur dan mekanisme pelayanan sendiri yang belum tentu penerima layanan/*target system* memahami. Dalam hal data sasaran, masing-masing lembaga memiliki *data base* sendiri, yang mengacu pada instansi vertikal masing-masing, menjadikan pelayanan masih terpencar dan belum terintegrasi, sasaran sama-sama orang miskin, tetapi dengan berbagai metode *targeting* dan *data base* berbeda, peraturan juga berbeda dan sulit mengukur efektivitas program, bahkan membingungkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengakses layanan dimaksud.

Sebagai upaya dalam mendukung perubahan paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang terarah kepada sasaran pelayanan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu adanya keterpaduan dalam proses penanganan masalah sosial. Alasan yang mendasari perlunya keterpaduan karena sasaran pelayanan sebagai *target system* adalah sama. Keterpaduan tersebut tidak hanya dengan melakukan jejaring, kerjasama, dan koordinasi, tetapi harus dilakukan kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaannya. Pelayanan sosial terpadu (*social services integration*) diperlukan karena, pertama sebagai upaya dalam meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan sosial. Kedua, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sosial, sehingga dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Ketiga, mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peranserta masyarakat dalam pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Tujuan akhir dari pelayanan sosial terpadu adalah merespons kebutuhan sasaran layanan secara efektif untuk pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pelayanan sosial sebagai manifestasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pelayanan terpadu idealnya dilaksanakan melalui kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, lembaga sosial, dunia

usaha, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat menuju Kabupaten/Kota Sejahtera. Keputusan Menteri tersebut sebagai payung hukum program/kegiatan pembentukan unit pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (Pandu Gempita). Program tersebut dimaksudkan untuk menyinergikan segenap potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menuju kabupaten/kota sejahtera. Utamanya untuk menjadikan kabupaten/kota yang ramah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan menerapkan model satu atap dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai sasaran strategis itu, diperlukan koordinasi serta dukungan kerjasama pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan maksud tersebut, untuk membangun kesepahaman dan mengukuhkan komitmen aksi bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU)) antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terpilih, terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu. Tahap awal MoU dilakukan di lima lokasi, yakni Kabupaten Sragen, Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bantaeng. Dalam MoU tersebut, kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota tersebut.

Kebijakan strategis melalui MoU dalam rangka mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terpadu (*one stop services*), sangat diperlukan untuk menyelaraskan berbagai upaya dalam menciptakan sebuah sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pandu Gempita diharapkan dapat menjadi kebijakan strategis, sehingga secara nyata mampu menyetimuli dan mengerakkan pilar-pilar partisipasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Model Pandu Gempita dengan sistem layanan dan rujukan terpadu dapat diterapkan dengan syarat adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah didukung oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diimplementasikan dalam: Peraturan bupati/walikota sebagai legalitas keberadaan; Sumber potensi yang dapat didayagunakan; penyusunan rencana kegiatan menyangkut jenis, bentuk, dan mekanisme layanan serta karakteristik sasaran; Pembagian kerja yang jelas pada semua elemen yang terlibat; *Database* sasaran dan program yang terkoneksi pada semua *stakeholder* dengan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat; sarana prasarana yang memadai; Anggaran yang mendukung pembiayaan, dan; Mekanisme pelaporan termasuk monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian "Menggagas Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera (Pandu Gempita)". Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai *setting* lokasi penelitian, karena merupakan satu di antara lima lokasi *pilot project*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana implementasi Model Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?. Kedua, bagaimana bentuk gerakan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menuju kota sejahtera. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang proses implementasi Model Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, danpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terpadu menuju kota sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan penanganan permasalahan sosial melalui pelayanan terpadu, dan untuk menambah atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (a*ction research*). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, menginterprestasi, dan menjelaskan situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Menurut pandangan tradisional, *Action Research* adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah, yakni terjadinya kolaborasi antara peneliti dan klien dalam mencapai tujuan (Kurt Lewin dalam Sulaksana, 2004). Penelitian tindakan menurut Burn merupakan penerapan temuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial tertentu dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti, praktisi, dan orang awam. Penelitian tindakan dipilih karena menyediakan cara kerja yang mengaitkan antara teori dan praktik menjadi kesatuan utuh dalam tindakan. Penelitian ini menggunakan desain satu kelompok Model Stephen Kemmis and Robin Mc. Taggart yang secara rinci memiliki empat langkah tindakan, yakni Perencanaan Tindakan; Tindakan; Observasi; dan Refleksi (dalam Endro Winarno, dkk, 2013).

Sumber data penelitian ini 30 orang berasal dari unsur tokoh masyarakat, dan aparat lembaga, baik pemerintah maupun swasta, penyelenggara kesejahteraan sosial yang kemudian ditetapkan sebagai kelompok kerja. Data dalam penelitian tindakan berfungsi sebagai landasan refleksi yang memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, pengumpulan data merupakan sarana untuk membukukan amatan sebagai jembatan antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam putaran penelitian tindakan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pedoman wawancara terstruktur untuk menggali informasi secara detail mengenai situasi dan permasalahan yang dihadapi serta kesiapan lokasi penelitian.

Observasi, dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan permasalahan yang dihadapi serta kesiapan lokasi dalam rangka penerapan model Pandu Gempita melalui pembentukan dan persiapan operasionalisasi unit pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera. Dengan teknik ini, memungkinkan peneliti mengetahui situasi kehidupan nyata, melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencacat perilaku dan kejadian apa adanya. Telaah dokumen, untuk memperoleh data pendukung yang masih ada relevansinya dengan masalah penelitian seperti data PMKS dan PSKS, program pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial yang bersumber dari arsip dan dokumen resmi berbagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha.

Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007). Analisis tersebut terdiri atas tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu reduksi data (data *reduction*), beberan data (*display* data), dan penarikan kesimpulan (*conclusian drawing and verification*). Setelah direduksi, data siap dibeberkan secara rapi, tertata, dan sistematik dalam bentuk narasi, sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Data yang dikumpulkan tidak terbatas pada data tentang perubahan yang diharapkan, tetapi juga data tentang peningkatan dan perubahan yang tidak diharapkan (di luar rencana).

C. Analisis terhadap Implementasi Pandu Gempita di Kota Payakumbuh

1. Proses Implementasi Model

Penyelenggaraan pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (Pandu Gempita) di Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sosial, dengan menyinergikan segenap potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial menuju kota sejahtera. Sinergi segenap potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan membangun kerjasama dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pelayanan terpadu serta menggerakkan kepedulian masyarakat untuk kesejahteraan kota. Sudamaryanti (2004) mengungkapkan, bahwa membangun pelayanan prima harus dimulai dari mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga program dan kegiatannya dilakukan melalui proses atau tahapan yang sistematis. Kegiatan penelitian pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota dengan pendekatan *action research* dapat digambarkan dalam bagan 1.

Tahun pertama penyelenggaraan Pandu Gempita di Kota Payakumbuh dilakukan melalui tahapan yang diawali dengan *mapping* dan *assesment* tentang permasalahan dan sumber potensi yang memungkinkan untuk didayagunakan. Kegiatan ini dilakukan setelah Kementerian Sosial melakukan sosialisasi tentang Pandu Gempita yang dihadiri beberapa gubernur, walikota, dan bupati di Jakarta. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu, antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor 11/HUK/2013 dan 6/MOU/2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu menuju Kota Sejahtera, yang ditandatangani oleh Walikota Payakumbuh dan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.

Hasil *mapping* dan *assesment* dipakai sebagai dasar penyusunan rencana menyangkut layanan lembaga yang memungkinkan untuk dipadukan program kegiatannya. Ditemukan bahwa layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya ditambah dengan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin, relevan untuk dipadukan. Kemudian dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pandu Gempita yang berasal dari wakil berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga yang mempunyai program kegiatan yang akan dipadukan. Pokja bertugas untuk menyiapkan segala keperluan pembentukan unit pelayanan terpadu. Pokja sebanyak 30 orang terdiri dari 24 orang pejabat eselon III dan atau IV Bidang Program dari SKPD terkait, 5 orang dari Seksi

Bagan 1
Action Research Model Kemmis (1988)

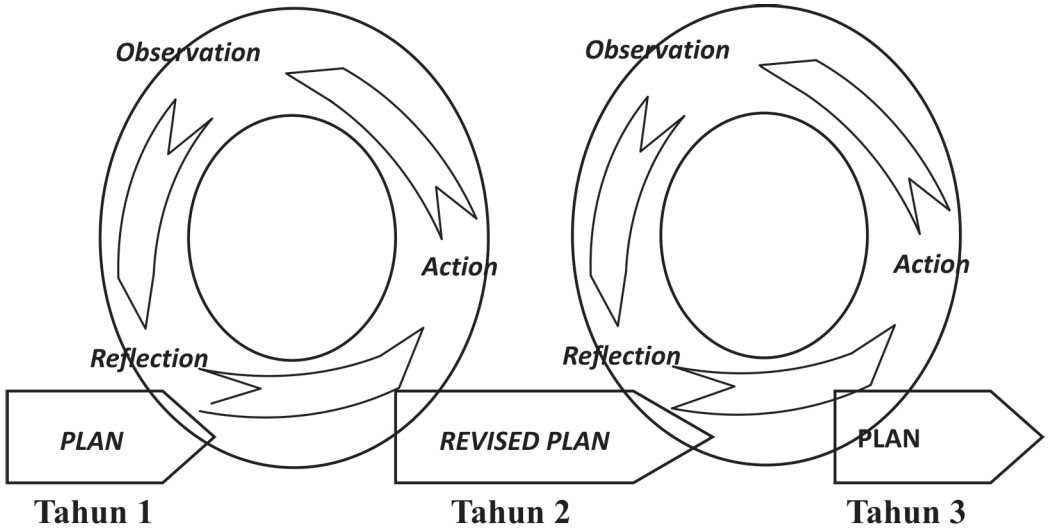

yang ada di 5 kecamatan,dan seorang dari lembaga adat (LKAM).

Pokja dipahamkan tentang berbagai model pelayanan terpadu melalui kegiatan bimbingan teknis (bintek) selama lima hari yang dilakukan peneliti bekerjasama dengan narasumber yang kompeten sesuai materi yang dijadwalkan. Materi bintek meliputi: Jenis dan model pelayanan terpadu; Kerangka konseptual pandu gempita; Kebijakan, strategi, dan program pandu gempita; Tahapan dan jenis kegiatan pandu gempita; dan organisasi pelaksana, mekanisme kerja, kebutuhan SDM, pengendalian dan pelaporan.

Dalam bintek tersebut kelompok kerja berhasil menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang berisi agenda kegiatan penyiapan pembentukan unit pelayanan terpadu. Model pelayanan terpadu yang dipilih berupa model satu pintu, banyak meja, banyak fungsi dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Pokja berhasil menyusun struktur organisasi, mekanisme pelayanan, identifikasi berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan personil pengelola, dan *launching* keberadaan UPT-KAN saat HUT Kota Payakumbuh 17 Desember 2013. Sementara regulasi (Peraturan Walikota), SOP layanan, pembuatan *database* sasaran dan program merupakan agenda rencana tindak lanjut (RTL).

Tahun 2013 UPT-KAN belum melakukan pelayanan karena masih dalam rangka pembenahan organisasi. Pada tahun 2013 Pokja telah menyelesaikan *draft* peraturan walikota tentang pembentukan UPT-KAN dan *draft* tentang surat keputusan walikota tentang penunjukkan personil pelaksana UPT-KAN. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial diimplementasikan dengan ditandatanganinya kedua *draft* tersebut. Legalitas keberadaan UPT-KAN berupa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Status UPT-KAN adalah sebagai lembaga non-struktural dengan penganggaran sementara dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh. UPT-KAN menempati gedung eks Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang berada di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Kubu Gadang.

Kegiatan penelitian pada tahun 2014 berupa refleksi, penyusunan rencana lanjutan, advokasi, dan pendampingan pada Pokja yang telah terbentuk dan berhasil mendapatkan legalitas bagi UPT-KAN. Kelembagaan pelayanan terpadu telah terbentuk dan mendapatkan legalitas, akan tetapi belum dapat melakukan kegiatan pelayanan karena terkendala belum adanya pengelola. Tim peneliti melakukan advokasi dan pendampingan pada Pokja untuk menyusun kebutuhan personil beserta kompetensi yang diperlukan bagi operasional UPT-KAN. Hasil advokasi dan pendampingan berupa Surat Keputusan Walikota Nomor 460.3/349/Wk-Pyk/2014 tentang Penunjukan Personil Pelaksana UPT-KAN Kota Payakumbuh. Nama-nama pengelola UPT-KAN berdasarkan usulan kepala SKPD yang tergabung dalam UPT-KAN, juga diterbitkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 460. 5/369/Wk-Pyk/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Payakumbuh yang terdiri dari Tim Pengarah dan Pokja.

Susunan personil Tim Pengarah dan Pokja mayoritas sama dengan Pokja yang dibentuk peneliti di tahun 2013. Pembentukan Tim ini dalam rangka mendorong percepatan kinerja Pokja agar UPT-KAN segera dapat melakukan pelayanan sesuai yang diharapkan. Tim Pengarah Program bertugas: Memberikan arahan dan petunjuk kepada UPT-KAN dan Pokja tentang sasaran yang harus dicapai dalam pelayanan penaganan dan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejateraan sosial; Memfasilitasi UPT-KAN dan Pokja untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Memberikan solusi dari setiap permasalahan yang timbul menyangkut operasionalisasi UPT-KAN dan Pokja; Memprakarsai

terjalinnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antar lembaga SKPD dalam pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya di Kota Payakumbuh; Meminta dan menerima laporan pelaksanaan tugas dari UPT-KAN setiap tiga bulan dan laporan tahunan.

Tugas kelompok kerja pendataan, informasi, dan pengaduan: Bersinergis dengan tugas Sub Unit Data, Informasi,dan Pengaduan Masyarakat UPT-KAN dalam penyusunan program; Melakukan verifikasi dan validasi data dari PPLS 2011 dengan memasukkan penduduk yang memenuhi kriteria ke dalam daftar dan mengeluarkan penduduk yang tidak memenuhi kriteria dari dalam daftar; Melakukan verifikasi ke lapangan bagi penduduk yang melapor, tapi tidak termasuk dalam data PPLS 2011; Melayani pengaduan masyarakat miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk disalurkan sesuai permintaan dan kebutuhan; Menyajikan data penduduk miskin dan PMKS yang mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, baik secara elektronika maupun manual.

Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat bertugas: Bersinergis dengan tugas Sub Unit Pemberdayaan Masyarakat UPT-KAN dalam penyusunan program; Menghimpun sumber potensi termasuk kemampuan dana lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang ada; Menyalurkan kebutuhan masyarakat miskin dan PMKS untuk ditanggulangi melalui wadah potensi yang ada di masyarakat; Memberdayakan kepedulian dan keikutsertaan potensi panti sosial, lembaga infak, sedekah atau Bazis dan potensi lainnya untuk membantu masyarakat miskin dan PMKS sesuai bidang dan kemampuan masing-masing.

Tugas kelompok kerja pendidikan: Bersinergis dengan tugas Sub Unit Pendidikan UPT-KAN dalam penyusunan program; Menginventarisir program bantuan pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nasional dan swasta; Menghimpun data untuk layanan pemberian bea siswa miskin (BSM) yang disediakan oleh pemerintah dan swasta kepada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi; Menghimpun data untuk layanan pemberian dana BOS, BOP dan layanan pendidikan lainnya yang disediakan oleh pemerintah untuk kebutuhan peserta didik; Menghimpun data pemberian latihan kerja bagi yang dikelola pemerintah dan swasta untuk pelatihan anak pengangguran dan putus sekolah; Menyalurkan peserta didik yang telah memenuhi kriteria untuk berakses dengan kebutuhan sebagaimana tersebut di atas.

Kelompok kerja kesehatan bertugas: Bersinergis dengan tugas Sub Unit Kesehatan UPT-KAN dalam penyusunan program; Menginventarisir program bantuan layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh lembaga kesehatan pemerintah dan swasta; Melakukan verifikasi dan validasi data dari PPLS 2011 dengan memasukkan penduduk yang memenuhi kriteria ke dalam daftar dan mengeluarkan penduduk yang tidak memenuhi kriteria dari dalam daftar; Melakukan verifikasi ke lapangan bagi penduduk yang melapor, tapi tidak termasuk dalam data PPLS 2011; Dapat merekomendasikan layanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin setelah mendapat persetujuan walikota; Menyajikan data penduduk miskin dan PMKS yang mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan gratis, baik secara elektronika maupun manual.

Tugas kelompok kerja sosial budaya: Bersinergis dengan tugas Sub Unit Sosial Budaya UPT-KAN dalam penyusunan program; Mensinkronkan data penduduk miskin dan data PMKS dengan data kelompok kerja lainnya di lingkungan UPT-KAN; Menginventarisir program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat; Memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) beserta Orsos, PSM, dan TKSK untuk penanggulangan kemiskinan dan pelayanan PMKS; Menyalurkan penduduk miskin yang telah memenuhi kriteria setelah mendapat persetujuan walikota untuk akses dengan kebutuhan sosial sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Kegiatan penelitian dengan pendekatan *action research* tahun pertama dan kedua berhasil membentuk UPT-KAN lengkap baik dengan mekanisme layanan, *database* sasaran dan program. Awal tahun 2014 sudah banyak masyarakat yang mengadukan masalahnya pada UPT-KAN tetapi karena mekanisme kerja dan SOP belum tersusun, pengaduan tersebut masih terhenti sampai proses verifikasi. Keberadaan mayoritas personil pengelola yang berasal dari Pokja kurang optimal kinerjanya karena rata-rata pejabat struktural dari dinas terkait. Kurang optimalnya kinerja pengelola, belum tersusunnya SOP layanan, dan belum dilakukannya sosialisasi keberadaan UPT-KAN merupakan problem yang akan dicari pemecahannya dalam penelitian tahun 2015.

Advokasi pada pengelola yang dilakukan peneliti berhasil disusun rencana tindak lanjut (RTL) berupa pengusulan personil pengelola baru yang bisa lebih fokus melakukan pelayanan, SOP layanan dan sosialisasi keberadaan lembaga. Hasil yang diperoleh berupa menetapkan personil baru untuk pengelola UPT-KAN berdasar Surat Keputusan Nomor 460.5/204/Wk-Pyk/2015, kemudian juga ditindakanjuti dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh tentang Penugasan Personil UPT-KAN. Pengelola UPT-KAN sebanyak 13 orang yang berasal dari dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, BAZ, ditambah 2 orang Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang dikirim Kementerian Sosial. Pengelola UPT-KAN yang berasal dari SKPD selain mendapatkan gaji (yang melekat pada instansi induk), juga mendapatkan insentif honor dari walikota.

Mekanisme kerja yang tertuang dalam SOP layanan berhasil disusun. UPT-KAN merupakan lembaga pelayanan yang memadukan dan mengintegrasikan layanan bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial. Lembaga ini tidak secara langsung melaksanakan program-program pelayanan seperti tersebut di atas, tetapi hanya bertanggung jawab dan berwenang terkait dengan data, bertanggung jawab dan berwenang dalam hal keterpaduan data. Penanganan lebih lanjut tetap menjadi tugas dan wewenang masing-masing SKPD, sehingga fungsi UPT-KAN adalah sebagai lembaga referal yang melakukan verifikasi data, pelayanan sosial tetap menjadi tugas dan wewenang SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh membentuk pelayanan terpadu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan memberi kemudahan dalam pelayanan sosial juga diarahkan pada penumbuhan gerakan masyarakat peduli kota sejahtera atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menuju kota sejahtera. Gerakan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh sebetulnya sudah cukup baik, adanya Badan Amil Zakat (BAZ), yakni lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang bergerak dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dan sodaqoh telah memberi santunan kepada anak yatim-piatu, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dan pendidikan keagamaan melalui TPA. Selain BAZ, partisipasi masyarakat yang menonjol adalah melalui Lembaga Kekerabatan Anak Nagari (LKAN) yaitu lembaga adat yang beranggotakan tokoh adat, agama, dan masyarakat. Keberadaan LKAN dimaknai sebagai dewan pertimbangan Pemerintah Kota Payakumbuh, sehingga setiap pengambilan kebijakan selalu dilibatkan, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

UPT-KAN telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya mulai bulan Maret 2014 dengan menerima pengaduan masyarakat. Layanan UPT-KAN tahun 2014 sebatas rujukan, yakni pengaduan yang sudah diverifikasi selanjutnya dirujuk pada dinas terkait dan BAZ yang memiliki program sesuai kebutuhan pengadu. Mengingat semakin hari jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan semakin banyak, pada tahun 2015 pengelola berinisiatif membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang di-

fungsikan sebagai penerima dan penyalur dana sumbangan masyarakat. Ide ini sejalan dengan Gempita, yakni gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera. Upaya menggerakkan masyarakat dilakukan dengan membentuk atau mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga. Keberadaan LKS ini dimaksudkan untuk menjadi mitra UPT-KAN dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat Kota Payakumbuh (masyarakat yang ber-KTP Kota Payakumbuh), yang tidak terakomodir dalam sasaran program bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

LKS Mitra Kenanga dikelola oleh sebuah tim, yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Sekretariat LKS Mitra Kenanga berada dalam satu lokasi dengan UPT-KAN. Sebagai langkah awal dalam penggalangan dana, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Payakumbuh mulai dari pimpinan sampai staf, diimbau untuk memberikan sumbangan. Dana yang dapat digalang sekitar Rp 40.000.000,- setiap bulannya. Diharapkan ke depannya dapat menarik dan memicu masyarakat lain di luar PNS untuk ikut berpartisipasi dalam membantu menangani masalah kemiskinan dan masalah sosial di Kota Payakumbuh.

2. Model Pandu Gempita Kota Payakumbuh

Model yang dipilih dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu penanganan masalah sosial di Kota Payakumbuh adalah model pelayanan satu atap banyak loket dan banyak fungsi (*One Stop Office Multi Desk Multi Function*). UPT-KAN mulai berdiri Desember 2013, merupakan lembaga non-struktural dengan penganggaran sementara masih melekat pada dinas sosial dan tenaga kerja, dengan struktur organisasi seperti tergambar dalam bagan 2.

Keberadaan UPT-KAN Kota Payakumbuh mendapat legalitas dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh berbentuk Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013. UPT-KAN memadukan data sasaran dan sekaligus program pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai SKPD dan lembaga terkait dengan visi terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pelayanan terpadu kesejahteraan anak nagari di Kota Payakumbuh. Dalam mewujudkan visi tersebut, disusun misi sebagai berikut: Memutuskan kemiskinan, pengangguran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial; Melaksanakan kesejahteraan sosial yang terintegrasi; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Kemitraan dengan dunia usaha.

Slogan UPT-KAN "Pelayanan terbaik untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah komitmen kami". Mekanisme pelayanan yang dilakukan di UPT-KAN adalah semua pengaduan masyarakat diterima oleh petugas jaga pada UPT-KAN untuk dilakukan pencatatan. Data pengadu akan dicek dalam *da-*

Bagan 2
Struktur Organisasi UPT-KAN

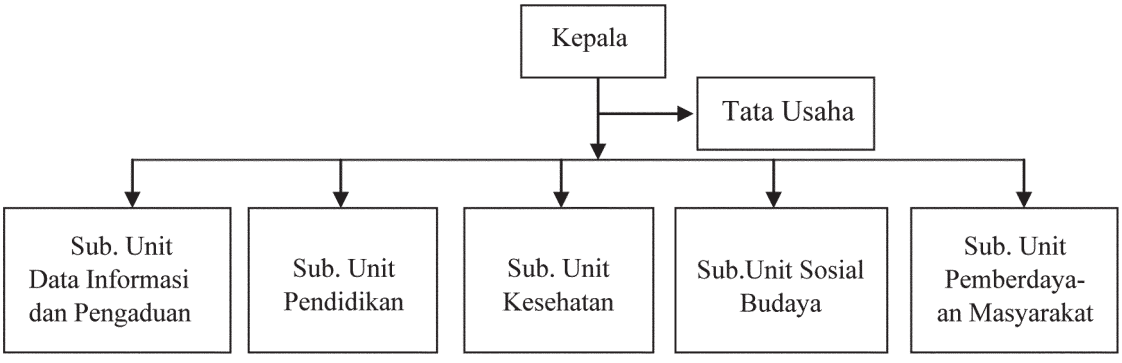

tabase UPT-KAN. Apabila telah tercatat dalam *database* formulir pengaduan akan diteruskan untuk ditelaah sesuai kategori permasalahan yang ditangani oleh SKPD terkait. Akan tetapi jika data pengadu belum masuk dalam *data base*, petugas UPT-KAN akan melakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi apabila pengadu masuk dalam kategori masyarakat miskin, data yang bersangkutan akan dimasukkan dalam *data base* dan lembar pengaduan akan diteruskan ke SKPD sesuai permasalahan untuk ditelaah. SKPD memiliki wewenang untuk verifikasi pengaduan yang masuk disesuaikan dengan program yang ada. Apabila program masih berjalan maka penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Akan tetapi apabila program sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dan sudah tidak ada dukungan anggaran lagi, maka penanganan masalah bisa diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. Alur penaganan pengaduan masyarakat pada UPT-KAN tergambar dalam bagan 3.

Standar operasional prosedur (SOP) layanan UPT-KAN telah tersusun, akan tetapi belum dipahami oleh semua personil pengelola. Sangat mungkin kondisi ini karena tidak semua nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 460.5/204/Wk-Pyk/2015, kemudian juga ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh tentang Penugasan Personil UPT-KAN aktif melakukan pelayanan di UPT-KAN. Hasil wawancara dan pengamatan menemukan bahwa hanya tiga orang yang aktif memberikan layanan, yakni dua orang Sakti Peksos dan seorang yang berasal dari dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Ketiga orang tersebut yang menjalankan operasional UPT-KAN, mulai dari penerimaan pengaduan, pencatatan, survey lapangan, membuat dan mengantarkan rujukan pada lembaga terkait untuk minta persetujuan dan eksekusi layanan. Minimnya keterlibatan personil pengelola pada operasional UPT-KAN merupakan kendala yang dihadapi dalam implementasi model Pandu Gempita.

Dilema lain yang harus dihadapi pengelola yang berasal dari PNS, mereka dituntut harus presensi kehadiran dan kepulangan dan memenuhi sasaran kinerja pegawai (SKP) di SKPD induk, sementara mereka mendapat tugas tambahan

Bagan 3
Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UPT-KAN

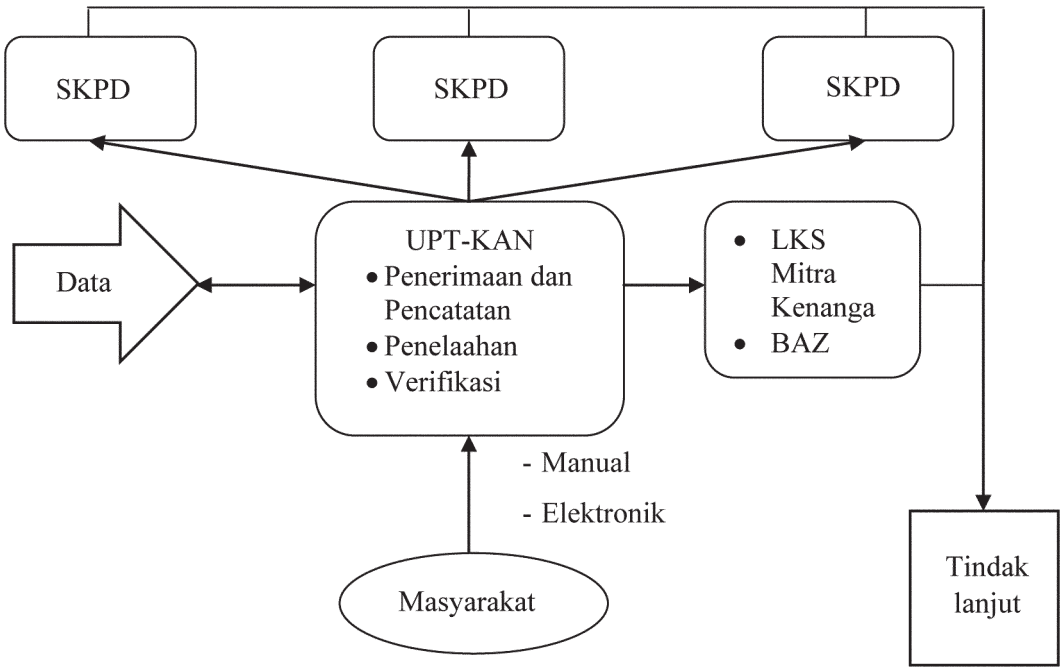

di UPT-KAN (SK Walikota) dan mendapatkan insentif honor. Terkait dengan hal ini, mereka berharap adanya penugasan khusus dengan surat tugas yang jelas. Mengingat kendala di atas, perlu penunjukkan personil yang tidak rangkap jabatan di instansi induk untuk operasional di UPT-KAN mulai dari penerima pengaduan, survei lapangan sampai dengan penulisan rujukan. Personil pengambil keputusan karena membutuhkan koordinasi dan kewenangan yang lebih, seyogyanya dijabat oleh pejabat dari dinas terkait (*double job*). Dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan terpadu, masih diperlukan asistensi berupa *workshop* ataupun bimbingan teknis terkait menejemen layanan terpadu, sedangkan untuk menjaga keberlanjutan UPT-KAN diperlukan pendampingan yang menurut struktur kelembagaan dan mekanisme kerja menjadi kewenangan BBPPKS Padang.

Capaian hasil UPT-KAN sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat 213 pengaduan masyarakat. Verifikasi yang dilakukan tim di UPT-KAN berkoordinasi dengan pihak terkait, berhasil direalisasikan 62 pengaduan masyarakat, berupa 48 untuk mendapatkan bantuan pendidikan, empat bantuan kesehatan, lima bantuan rumah tinggal layak huni (Rutilahu), dan lima bantuan modal usaha. Realisasi tersebut dilakukan dinas terkait dengan BAZ. Tahun 2015 sampai dengan akhir Oktober, jumlah layanan dan rujukan yang ditangani UPT-KAN 319 kasus, terdiri dari bidang pendidikan 198 kasus, kesehatan 12 kasus, dan sosial budaya 105 kasus. Pembiayaan berasal dari anggaran DSTK, Dinas Kesehatan, BAZ, LKS Mitra Kenangan, dan CSR (BRI). Daftar tunggu yang sudah mendapat rekomendasi UPT-KAN untuk bidang pendidikan 88 kasus, dan kesehatan (alat bantu bagi disabilitas) 5 kasus.

LKS Mitra Kenanga sebagai lembaga baru telah menyalurkan layanan sebanyak 98 kasus terdiri dari bidang pendidikan 88 kasus, kesehatan 9 kasus, dan satu kasus bidang sosial. Kasus bidang pendidikan pada umumnya menyangkut pengadaan peralatan sekolah dan tunggakan pembayaran yang tidak mampu dilunasi orang-tua. Kasus bidang kesehatan menyangkut pendampingan, yakni biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien yang berasal dari KK miskin yang berobat atau rawat inap ke rumah sakit. Pasien sudah dijamin dengan Jamkesmas dan Jamkesda, tetapi untuk keperluan transpor dan biaya hidup pengantar tidak ter-*cover* jaminan. Kedua jenis pengeluaran ini diputuskan mendapat bantuan UPT-KAN melalui LKS Mitra Kenangan. Besaran bantuan untuk bidang pendidikan Rp 400.000,- sampai dengan Rp 750.000,-, dan untuk kesehatan Rp 1.500.000,- sampai dengan Rp 2.500.000,-. Bantuan ekonomis produktif Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,-. Terobosan ini merupakan inovasi kebijakan dalam menuntaskan pelayanan sosial bagi KK miskin, khususnya dalam hal perawatan kesehatan.

3. Analisis terhadap Model Pelayanan Sosial Pandu Gempita

Dalam upaya penanganan masalah sosial berbagai program telah diselenggarakan, tetapi seringkali program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang masalah sosial, sehingga tidak dapat merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah sosial yang perlu diperhatikan atau dilakukan adalah memahami kebutuhan nyata penyandang masalah sosial, yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga intervensi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Menyikapi kebutuhan tersebut diperlukan pengungkapan masalah dan kebutuhan (*need asessment*) sebelum program kegiatan dilaksanakan.

Masalah dan kebutuhan penyandang masalah sosial tidak hanya satu, tetapi beragam. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi seorang penyandang masalah sosial bisa tidak hanya kemiskinan, tetapi juga masalah kecacatan dan memiliki rumah tidak layak huni. Mengingat hal tersebut, program pelayanan yang diberikan tidak hanya menyangkut masalah kemiskinan saja, tetapi

juga menyangkut masalah kecacatan dan bantuan rumah. Dampak pemberian pelayanan yang beragam tersebut, permasalahan dan kebutuhan penyandang masalah sosial dapat dipenuhi dan ditangani dengan tuntas. Hal tersebut merupakan alasan perlunya pelayanan terpadu yaitu pelayanan sosial yang terintegrasi dalam satu atap (*one stop services*) yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah sosial.

Pelayanan terpadu atau pelayanan sosial yang terintegrasi dalam satu atap menjadi solusi tepat dalam merealisasikan pelayanan sosial yang berpusat pada penyandang masalah sosial (*clients-centered*). Pertama, penyandang masalah sosial mengetahui berbagai informasi pelayanan yang diberikan, karena informasi yang diberikan sifatnya menyeluruh, menyangkut semua program dari berbagai lembaga penyedia pelayanan, sehingga informasi tentang layanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, penyandang masalah sosial mudah mengakses atau menjangkau layanan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Ketiga, adanya koordinasi yang baik, sehingga penyandang masalah sosial mendapatkan layanan tepat waktu dan tuntas. Hal inilah yang membuat penyandang masalah sosial akan tertangani dengan cepat, tepat, dan tuntas sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Setelah mengetahui pentingnya pelayanan sosial yang berpusat pada warga miskin dan penyandang masalah sosial, dalam mengimplementasikan pelayanan terpadu diperlukan komitmen semua pihak terutama pimpinan daerah. Komitmen pimpinan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kota Payakumbuh telah dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kementerian Sosial. Komitmen pimpinan daerah dan *stakeholder* diimplementasikan dalam bentuk dukungan berupa legalitas, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaranbagi penyelenggaraan pelayanan terpadu melalui UPT-KAN.

Pelayanan terpadu adalah sistem pelayanan sosial yang terkoordinasi dan menyinergikan program kegiatan dari berbagai lembaga terkait. Tujuan pembentukan unit pelayanan terpadu adalah pengintegrasian data warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keluhan masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga miskin dan PMKS yang mengalami kesulitan mendapatklan layanan. Pelayanan sosial terpadu akan lebih efektif apabila dilakukan dalam satu atap (*single point access*), karena dapat merespons kebutuhan penyandang masalah sosial secara cepat dan tuntas. Pelayanan sosial terpadu mempunyai beberapa kelebihan: Pelayanan yang diberikan lebih komprehensif, sehingga kebutuhan dasar penyandang masalah dapat terpenuhi dengan maksimal dan cepat; Keterpaduan staf dan program pada tingkat pemberian pelayanan; Spesialisasi beban kasus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi penyandang masalah; Terdapat tim yang terpadu dalam memberikan pelayanan untuk melakukan assesmen kasus (*case assesment*) yang didukung oleh multidisipliner staf pelaksana pelayanan, baik mitra internal maupun eksternal; Multiple program pelayanan yang terintegrasi; Mengurangi duplikasi pelayanan yang sama, dan memberi peluang bagi penerima pelayanan untuk berpartisipasi dalam penentuan perencanaan penanganan kasus, koordinasi dalam memfasilitasi kebutuhan klien sebagai sasaran pelayanan; Sisten informasi yang terintegrasi; Mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam penyelenggaraan memerlukan tahapan yang dimulai dengan memotivasi berbagai pihak terkait tentang pentingnya penyelenggaraan pelayanan terpadu. Pembentukan tim perumus yang mengidentifikasikan kebutuhan dan sumber potensi yang dapat didayagunakan, termasuk faktor yang bisa jadi penghambat. Penerbikan legalitas kebijakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan, menentukan jenis layanan, menentukan dan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia pengelola, merealisasikan infrastruktur pendukung, dan menyosialisasikan keberadaan pelayanan terpadu pada masyarakat. Strategi administratif dalam implementasi sistem pelayanan terpadu, meliputi: Mengkonsolidasikan struktur pemerintahan; Keterpaduan aliran pendanaan; Kolaborasi dan integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penentuan indikator keberhasilan; Integrasi dalam sistem informasi.

Strategi operasional meliputi: Penggabungan berbagai layanan sejenis dari berbagai lembaga terkait; Penyusunan mekanisme dan prosedur layanan (SOP); Penggabungan dan konsolidasi fungsi staf pelaksana pelayanan; Pengintegrasian *intake* dan *assesment*; Konsolidasi manajemen kasus. Dalam mengembangkan pendekatan pelayanan yang terintegrasi (pelayanan terpadu) membutuhkan perubahan organisasi yang fokus pada pelayanan prima untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang masalah sosial secara mudah, cepat, dan tuntas, serta berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, yang menjadi kendala dalam implementasi pelayanan terpadu adalah adanya konflik kepentingan di antara berbagai lembaga yang memberi pelayanan sejenis. Kesulitan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan terpadu, antara lain karena budaya organisasi (*cultural of organization*) yang tidak fokus pada penyelesaian pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah penyandang masalah sosial. Pelayanan yang diberikan hanya sebatas kewajiban pelaksanaan tugas sesuai dengan pendanaan dan program yang tersedia. Mengingat pengelola UPT-KAN adalah PNS yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab di SKPD induknya, mereka tidak bisa fokus melaksanakan tugas di UPT-KAN.

Untuk menuju kota sejahtera bukan hanya tugas dan peran pemerintah saja, tetapi juga dukungan penuh dari masyarakat. Inisiatif masyarakat untuk mendorong perubahan terhadap pemberian layanan dirasakan belum optimal dilakukan. Diperlukan adanya gerakan sosial (*social movement*) sebagai fenomena partisipasi sosial (masyarakat) dalam hubungannya dengan entitas eksternal untuk menuju kota sejahtera. Istilah gerakan sosial memiliki beberapa definisi, tetapi secara umum dapat dilihat sebagai instrumen hubungan kekuasaan antara masyarakat dan entitas yang lebih berkuasa (*powerfull*). Masyarakat cenderung memiliki kekuatan yang relatif lemah (*powerless*) dibandingkan entitas-entitas yang dominan, seperti negara atau swasta (dunia usaha). Gerakan sosial menjadi instrumen yang efisien dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, sebagai pengeras suara masyarakat sehingga kepentingan dan keinginan mereka dapat terdengar.

Implementasi model pandu gempita di Kota Payakumbuh dinilai berhasil karena memenuhi persyaratan, yakni komitmen pimpinan daerah didukung oleh *stakeholders* berupa: Terbitnya peraturan walikota sebagai legalitas keberadaan; Dukungan personil dan anggaran bagi UPT-KAN; Rencana kegiatan menyangkut jenis, bentuk, dan mekanisme layanan serta karakteristik sasaran; Pembagian kerja yang jelas pada semua elemen yang terlibat; *Database* sasaran dan program meski belum terkoneksi pada semua *stakeholder*; Sarana prasarana yang memadai; dan; Mekanisme pelaporan.

D. Penutup

Terbentuknya unit pelayanan terpadu dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) merupakan komitmen pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model yang dipilih dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu penanganan masalah sosial di Kota Payakumbuh adalah model pelayanan satu atap banyak loket dan banyak fungsi (*One Stop Office Multi-Desk Multi-Function*). Keberadaan UPT-KAN di-*launch* pada tanggal Desember 2013, dengan dasar hukum Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013. Peraturan walikota tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 460.3/349/Wk-Pyk/2014 tentang Penunjukan

Personil Pelaksana UPT-KAN Kota Payakumbuh. Pada tahun 2015 walikota menetapkan personil baru untuk pengelola UPT-KAN dengan Surat Keputusan Nomor 460.5/204/Wk-Pyk/2015, kemudian juga ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh tentang Penugasan Personil UPT-KAN.

Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh membentuk pelayanan terpadu dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan memberi kemudahan dalam pelayanan sosial (membantu menangani masalah kemiskinan dan masalah sosial, dalam pelaksanaan kegiatannya tidak hanya melibatkan pemerintah (SKPD terkait) tetapi juga melibatkan masyarakat atau menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi mendukung kegiatan UPT-KAN dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Upaya menggerakkan masyarakat dilakukan dengan membentuk atau mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga. Keberadaan LKS ini dimaksudkan untuk menjadi mitra UPT-KAN dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat Kota Payakumbuh yang tidak terakomodir sebagai sasaran program bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pustaka Acuan

Endro Winarno, dkk, (2013). *Pengembangan Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.* Yogyakarta: B2P3KS Press.

Johnson, HW. (1986). *Social Services an Introduction. Second Edition*. Itasca, Illonius: F.E. Peacock Publisher.

Kemmis, Stephen and Taggart, Robin Mc. (1988), *The Action Research Planner*. 3 rd ed. Victoria: Deakin University.

Kementerian Pedayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014). *Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta

Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/3013 tentang *Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten/Kota Sejahtera.*

Khan, A. J. (1979). *Social Policy and Social Services*. New York: Random House.

Madya, Suwarsih (2009). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.

Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory.* Second Edition. London: MacMillan Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Ragan. M. (2003). *Building Better Human Service Systems: Integration Services for Income Support and Related Programs.* Albany, NY: The Nelson A. Rockefeller Institure of Government.

Sianipar, (1999). *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sudamaryanti, (2004). *Good Gavernance* (Kepemerintahan yang Baik) : Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Gavernance* (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharto, (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR* (*Corporate Social Responsibility*). Bandung: Alfabeta.

Sulaksono, (2004). *Managemen Perubahan*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Syarif Muhidin, (1981). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*

Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

3

Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

Teaching and Local Culture Strategy on Strengthening Populous Economy

Mahmuddin
Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,
Jl HM Jasin Limpo 36, Samata-Gowa, Sulawesi Selatan. E-mail <mahmudu94@gmail.com> HP: 081242477798.
Diterima 16 November 2015, diperbaiki 4 Januari 2016, disetujui 15 Februari 2016.

Abstract

This study is to know the local culture and teaching strategies on strengthening the economy of the people in Bira village. The research question is how economic portrait of Bira village people and how is the role of local cultural and teaching strategies on strengthening the economy? The method used is qualitative research, through sociological approach, an approach that analyzes the social condition of the society as a whole among and its relation among the members in the community. Data premier source are women of Bira community, religous, local formal and informal, tourism figures, and related books as secondary data. Data are gathered through observation, interviews and document documentary analysis, data then analyzed through qualitative technique. The research shows that women are the backbone of the economy, after losing their husbands, through a weaving economic activity. There are two types of weaving apparels, namely Traditional Looms (TL) and Manual Looms (ML). The role of local culture and propagation strategies in strengthening the economy of Bira village people is sincere intention to be introduced in work, strengthen work ethic as part of Islamic teachings, teaches the importance of the honesty value and trustworthiness, instill values mandate in work and push to manufacture in woven gloves periodically as part of the local culture that needs to be preserved.

Key words: teaching and local culture strategies; people's economy; Bira

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana potret ekonomi rakyat di Desa Bira dan mengapa memerlukan strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat? Metode penelitian yang digunakan kualitatif, dengan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menganalisis kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan antara orang-orang dalam masyarakat bersangkutan. Sumber data primer adalah wanita yang bekerja di sektor penenunan, tokoh agama, tokoh pariwisata, dan tokoh masyarakat setempat, dan buku-buku yang terkait sebagai data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa wanita-wanita atau isteri menjadi tulang punggung perekonomian setelah ditinggal suami melalui bertenun. Alat tenun yang digunakan masyarakat ada dua jenis yaitu Alat Tenun Tradisional (ATT) dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di desa Bira adalah memperkenalkan niat yang tulus dalam bekerja, memperkuat etos kerja sebagai bagian dari ajaran Islam, mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan, menanamkan nilai-nilai amanah dalam bekerja dan mendorong dalam pembuatan sarung tenun secara berkala sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu dipertahankan.

Kata kunci: strategi dakwah dan budaya lokal; ekonomi rakyat; Bira

A. Pendahuluan

Istilah strategi (Anwar Arifin, 201: 227), dipakai dalam perspektif militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat. Samiang Katu (2012; 28) menyadari perlunya taktik dan strategi dalam usaha mencapai tujuan, termasuk menyebarluaskan informasi atau ajaran agama (dakwah), maka pemahaman tentang taktik

dan strategi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Moh. Ali Azis sebagaimana dikutip oleh Mahmuddin menyebutkan bahwa segala persoalan bisa dilihat atau dipahami dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang inilah yang disebut pendekatan. Sebuah pendekatan melahirkan sebuah strategi yaitu semua cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap strategi menggunakan beberapa metode dan setiap metode membutuhkan teknik, yaitu cara yang lebih spesifik dan lebih operasional. Selanjutnya setiap teknik membutuhkan taktik, yaitu cara yang lebih spesifik lagi dari teknik (Mahmuddin, 2013: 38).

Sedangkan tujuan suatu strategi ialah untuk merebut kemenangan atau meraih suatu hasil yang diinginkan (Mahmuddin, 2013: 37). Dakwah (Muhammad Abu Zahrah, tt. 8) adalah upaya para ulama mengajarkan kepada segenap umat tentang apa yang mereka pandang sebagai urusan agama dan urusan dunia mereka menurut kemampuannya. Islam adalah agama dakwah. Thomas W. Arnold, sebagaimana dikutip oleh A. Ilyas Ismail menuturkan bahwa istilah agama dakwah ialah agama yang di dalamnya ada usaha-usaha menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya, dan dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya atau oleh para penggantinya (A. Ilyas Ismail, 201[1]: 1[1)]. Agama tersebut selalu mendorong pemeluknya untuk melakukan kegiatan dakwah.

Maju mundurnya umat Islam, sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan dan pengamalan bagi umatnya. Oleh sebab itu, Islam dan dakwah merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebutuhan dakwah boleh dibilang sebagai "investasi berjangka" umat manusia. Dakwah diperlukan saat sekarang, demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Apabila kebutuhan manusia diklasifikasikan ke dalam primer, sekunder dan tersier, maka kebutuhan kepada dakwah digolongkan sebagai kebutuhan primary primar yang mengatasi segala kebutuhan fisik yang temporal (A. Ilyas Ismail, 2011: 42-43).

Berdasar dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami pemaknaan istilah strategi dakwah adalah suatu upaya atau kegiatan, siasat yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat, maka Jack Rothman sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto menyebutkan bahwa ada tiga model pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial (Adi Suharto, 2010: 42). Dijelaskan bahwa ekonomi merupakan penopang kehidupan yang menjadi modal dasar dalam suatu pergerakan kehidupan dan menjadi tolok ukur kesejahteraan sosial.

Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi rakyat adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi rakyat ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun (sistem-ekonomi-kerakyatan, 18 Maret 2014). Ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat (Sistem Ekonomi Kerakyatan, 1-4-2014). Ekonomi rakyat erat kaitannya dengan pengaturan pengelolaan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Adapun sistem ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat (Sistem Ekonomi Kerakyatan, 1 April 2014).

Sasaran pokok ekonomi rakyat dalam garis besarnya meliputi lima hal yaitu tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk

mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi (San Afri Awang, 2014).

Budaya atau kebudayaan kaitannya dengan manusia dapat dipahami bahwa sebenarnya manusia mempunyai dua segi atau sisi kehidupan yaitu material dan spiritual. Sisi material mengandung *karya* yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda atau yang lainnya berwujud materi. Sisi spiritual manusia mengandung *cipta* yang menghasilkan ilmu pengetahuan, *karsa* yang menghasilkan kaidah, kepercayaan, kesusilaan, kesopanan hukum serta *rasa* yang menghasilkan keindahan (Hamzah Junaid, 2013: 58).

Oleh karena itu, budaya yang tinggi, akan mencitrakan masyarakat maju, budaya yang rendah mencitrakan masyarakat yang masih terbelakang. Pandangan tersebut sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat lingkungan (Adi Fahruddin, 2012: 10). Uang merupakan media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapapun bila ia ditetapkan oleh Negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek dan selainnya (Adiwarman A. Karim, 2014: 81). Uang inilah yang dijadikan salah satu tumpuan masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki uang, maka mereka memandang dirinya sebagai manusia yang tidak sejahtera dan termasuk orang yang berekonomi lemah.

Pendangan tersebut dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Desa Bira Bulukumba. Itulah sebabnya mereka dengan sungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarganya melalui usaha tenun dan kerang-kerangan sebagai wadah dalam memperkuat ekonomi mereka. Desa Bira Bulukumba merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu, Bira memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata dengan penguatan budaya lokal, seperti kerajinan tangan (tenun, pembuatan hiasan) dan pengembangan budaya yang dapat meningkatkan inkam perkapita masyarakat.

Dewasa ini, desa Bira sedang menghadapi gempuran budaya-budaya asing dan pergaulan bebas yang cenderung melemahkan keberadaan budaya lokal. Jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan hilangnya budaya lokal di desa Bira. Penduduk Desa Bira lebih banyak dihuni oleh perempuan, sebab pada umumnya suami mereka pergi berlayar untuk mencari nafkah buat anak dan isterinya. Suami mereka pada umumnya meninggalkan isteri beberapa bulan lamanya dan bahkan ada bertahun-tahun tidak pulang sedang para suami tidak meninggalkan bekal untuk anak dan isterinya. Pada kondisi seperti inilah, sehingga para isteri yang ditinggal pergi oleh suami melakukan pekerjaan berupa bertenun atau membuat kerang-kerangan sebagai hiasan (A. Wahidah, 2014).

Sepeninggal suaminya, isteri sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Memperhatikan kondisi tersebut, perlu ada upaya mensinergikan antara strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira Kabupaten Bulukumba. Berdasar hal di atas, penulis meneliti dan mengkaji mengenai strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira Bulukumba. Masalah pokok yang penulis kemukakan adalah bagaimana strategi dakwah dan budaya lokal dapat memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira. Masalah pokok ini dapat dijawab melalui pertanyaan yaitu bagaimana potret ekonomi rakyat di Desa Bira? Dan mengapa memerlukan strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira?

Dalam kaitan ini, penulis melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Imam Khambali yang menyorot persoalan "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan: Model Pengentasan Kemiskinan Kota Surabaya dengan pendekatan Tridaya"

(Rr. Suharsini, 2005: 7-8). Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, yang membahas masalah yang berkaitan dengan Nilai-Nilai Budaya Lokal Pada Masyarakat Muslim Silanggaya Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa (Suatu Tinjauan Teologi Sufistik), (Ibrahim, 2013: iv). Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh Muh. Dahlan yang berjudul "Islam dan Budaya Lokal: Kajian historis terhadap adat perkawinan bugis Sinjai" (Muh. Dahlan, 2013; iii).

Penelitian di atas semuanya berbicara tentang budaya lokal dengan sorotan yang berbeda dan oleh Ibrahim lebih ditekankan pada nilai budaya kaitannya teologi sufistik, dan Muh. Dahlan membahas budaya lokal kaitannya dengan adat perkawinan. Dengan demikian apa yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sangat berbeda dengan apa yang telah diteliti sebelumnya. Pada penelitian ini menekankan pada strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui penguatan budaya lokal di Desa Bira Bulukumba. Berangkat dari strategi dakwah dan budaya lokal ini, maka penelitian ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira, yang dikenal sebagai daerah wisata budaya yang di dalamnya memerlukan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat budaya mereka sendiri.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penentuan informan adalah wanita Desa Bira yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga setelah ditinggal mati suaminya. Lokasi penelitian adalah Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Inti permasalahan yang dikaji, yaitu menyangkut bagaimana strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira Bulukumba. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan sebagai mana dilakukan oleh Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed menjelaskan bahwa pendekatan penyuluhan ini Philip mengembangkan dua model yaitu model konvensional dan model konvensional versi mutakhir.

Penelitian kualitatif sumber datanya adalah anggota masyarakat, hal ini dimaksudkan agar supaya tidak terbatas pada tokoh agama atau tokoh masyarakat, dai atau pemerintah setempat, tetapi meliputi semua komponen mulai dari individu, organisasi atau kelompok, komunitas, dan masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah para pengrajin dan pengelola pariwisata setempat yang terkait langsung dengan pelaksana dakwah, penggerak ekonomi dan pemangku adat dan budaya di Desa Bira.

Sesuai dengan jenis, ciri-ciri, dan sumbernya, pengumpulan data dalam seluruh aktivitas studi ini dilakukan beberapa teknik sebagai berikut. Wawancara adalah teknis peneliti dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Dengan demikian, peneliti mengadakan tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan beberapa orang yang diwawancarai, di antaranya dai dan pengrajin (tukang tenun dan pembuat hiasan) dan tokoh masyarakat, anggota masyarakat. Observasi dilakukan pada objek penelitian, khususnya di empat dusun di Desa Bira, termasuk dusun di pulau Liukangloe. Telaah Dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual, digunakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dengan memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, serta menghubungkannya dengan fenomena lain.

C. Peran Dakwah dan Budaya Lokal dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Desa Bira merupakan daerah kawasan pariwisata yang memiliki luas wilayah 19,5 kilometer, terletak pada jarak 190 kilometer dari Kota Makassar dan pada jarak kurang lebih 40 kilometer sebelah Timur dari kota Kabupaten Bulukumba. Desa Bira terdiri atas 4 dusun, yakni Dusun Liukangloe, Dusun Tanetang, Dusun Birakeke dan Dusun Pungkarese. Khusus Dusun Liukangloe terdapat pada satu pulau kecil yaitu pulau Liukangloe yang terletak pada posisi

antara dataran Bira dan pulau Selayar. Pulau ini membujur dari Barat ke Timur sepanjang 2,5 Kilometer dan lebar kira-kira 2 kilometer dengan jarak kurang lebih 3 kilometer dari pantai Bira.

Jumlah penduduk Desa Bira menurut data pada bulan April 2014, berjumlah 4.070 jiwa, terdiri atas penduduk pria 1.916 jiwa dan penduduk wanita terdiri atas 2.154 jiwa. Data tersebut berdasarkan rentang umur 0-65 tahun ke atas. Jika diprosentasikan akan terlihat jumlah pria 45,89 persen dan jumlah wanita 54,11 persen. Melihat penduduk wanita lebih banyak dari pria maka wanita di Desa Bira pada umumnya dapat membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, begitu pula biaya pendidikan anak-anaknya, malah kelihatan bahwa wanita lebih giat mencari nafkah dengan cara bertenun, menangkap ikan, membuat hiasan, menyulam dan membuka warung di kawasan wisata.

Menurut pengamatan peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara kreasi berupa cendera mata dari kerang-kerangan mulai memperlihatkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan ditandai dengan dibentuknya 4 kelompok pengrajin pembuat cendera mata dari pulau liukangloe (Narmah, 2014). Namun belum terorganisir secara baik, hal ini menggambarkan bahwa belum ada perhatian khusus secara serius dari pihak pemerintah dalam mewujudkan desa Bira sebagai salah satu potensi desa yang bisa dikembangkan.

Sebagai gambaran umum, berikut ini ditampilkan kondisi masyarakat Bira ditinjau dari segi ekonomi: Kondisi Mata Pencaharian masyarakat Desa Bira Menurut Sektor Petani 15 orang, nelayan 361 orang, pemilik usaha perikanan 3 orang, buruh usaha perikanan 23 orang, montir 3 orang, tukang batu 19 orang, tukang kayu 15 orang, pemulung 2 orang tukang jahit 6 orang, tukang kue 3 orang, tukang rias 3 orang, Pengrajin Tenun 340 oraang, Pengrajin Souvenir 36 orang, Pengrajin industry rumah tangga lainnya 60 orang, Sektor Industri Menengah dan Besar 12 orang, Sektor Perdagangan 10 orang, Sektor Jasa 617 orang (PLA Dessiraja Cece, 2014).

1. Potret Ekonomi Rakyat Melalui Budaya Lokal

Tukang tenun sarung: Keterampilan bertenun merupakan salah satu keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa Bira Kabupaten Bulukumba. Keterampilan ini oleh wanita di desa tersebut dijadikan sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu Rina dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan bahwa bertenun merupakan satu-satunya pekerjaan/keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa Bira. Oleh sebab itu, menjadi tukang tenun merupakan satu-satunya pilihan wanita Bira pada umumnya (Rina, 2014). PLA Dessiraja Cece (2014) menjelaskan bahwa terdapat 340 orang wanita Bira yang menjadikan tukang tenun sebagai pekerjaan tetap dan merupakan profesi mereka.

Bertenun merupakan keterampilan/pekerjaan secara turun temurun bagi wanita Bira. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap kolom rumah di desa Bira terdapat alat tenun baik yang masih beroperasi maupun yang sedang istirahat. Kepala Desa Bira (A. Wahidah, 2014) menjelaskan bahwa alat tenun yang digunakan masyarakat ada dua jenis yaitu Alat Tenun Tradisional (ATT) dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Penggunaan alat tenun tersebut memiliki perbedaan yang khas dan kecepatan penyelesaiannya. Salah seorang tukang tenun yang diwawancarai oleh penulis mengungkapkan bahwa penggunaan ATT jauh lebih lambat dibanding dengan penggunaan ATBM. Bila ATT digunakan maka hanya dapat menyelesaikan 4-5 hari perlembar, tetapi apabila menggunakan ATBM dapat menyelesaikan 1-2 lembar perhari. Itulah sebabnya sekarang ini banyak yang telah meninggalkan ATT dan beralih ke ATBM, namun tidak semuanya ke ATBM karena persoalan biaya (Rina, 2014).

Sistem pengadaan barang berupa benang sebagai bahan pokok pembuatan sarung, oleh sekretaris Desa Bira dijelaskan bahwa terdapat beberapa sistem pengadaannya, ada yang meng-

gunakan dengan cara seseorang (pemesan) membawakan benang ke tukang tenun, lalu tukang tenun membuatkan sarung sebanyak satu bal (22 lembar sarung yang sudah jadi), berselang waktu satu bulan diperkirakan pesanan sarung satu bal itu selesai, lalu pemesan datang mengambil pesanan dan menggantinya dengan benang yang serupa pada awalnya (PLA Dessiraja Cece, 2014), sehingga tukang tenun tidak merdeka dalam menjual hasil karya mereka kepada konsumen, karena hak jual ada pada pemesan.

Keadaan seperti ini banyak ditemui di desa Bira, bahkan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan pernyataan sekretaris Desa Bira berkesimpulan bahwa lebih dari 50 persen, tukang tenun mengalami hal yang sama, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kesejahteraanya, karena hasil kerja mereka tidak dapat dijual sendiri sebab ada semacam tengkulak yang menguasai pengadaan dan penjualan (PLA Dessiraja Cece, 2014).

Kondisi yang berbeda ditemukan di Dusun Liukang Loe, tukang tenun memilih alat alat tenun tradisional dibandingkan dengan menggunakan alat tenun bukan mesin, alasannya adalah dengan menggunakan alat tenun tradisonal lebih halus dibandingkan dengan meggunakan alat tenun bukan mesin, walaupun bila menggunakan alat tenun bukan mesin lebih cepat (Salma, 2014). Berbeda dengan di tiga dusun lainnya, mereka lebih memilih menggunakan alat tenun bukan mesin. Di Pulau Liukang Loe para tukang tenun memodali dirinya sendiri dengan membeli benang sendiri, sehingga mereka dapat mengendalikan harga sarung yang jadi, bahkan harga sarung dapat mencapai Rp 900.000,- per lembar (Salma, 2014).

Kondisi lain menunjukkan bahwa belum ada koperasi atau semacam lembaga pemberdayaan masyarakat yang melirik potensi desa yang cukup menjanjikan ini, karena ternyata sarung bira telah dikenal di mancanegara. Hal ini dapat dilihat banyaknya turis yang belanja sarung yang bergambarkan perahu phinisi, terutama sarung yang dibuat di Dusun Pulau Liukangloe (sebuah pulau di bagian selatan Desa Bira yang berjarak sekitar 3 kilometer dari garis pantai). Sarung tersebut dapat dijual seharga Rp. 700.000,- kepada turis (Syamsul, 2014).

Cendera mata: Salah satu keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat (wanita) Desa Bira adalah keterampilan dalam membuat cendera mata berupa hiasan dinding, tempat tissue, kalung, gelang, hiasan meja yang terbuat dari kerang-kerangan. Sekretaris Desa Bira mengungkapkan bahwa ketrampilan ini mulai diminati oleh masyarakat desa Bira, khususnya di Dusun Liukangloe. Pada awalnya masyarakat dusun Liukangloe membuat cendera mata secara otodidak sehingga kualitasnya sangat rendah. Namun dua bulan terakhir, masyarakat mulai bersemangat untuk membuat cendera mata setelah lima orang diutus ke Situbondo untuk belajar membuat hiasan. Kegiatan terlaksana atas inisiatif pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini kepala dinas perindustrian (PLA Dessiraja Cece, 2014). Dengan adanya utusan tersebut, maka masyarakat mulai bersemangat lagi untuk membentuk kelompok-kelompok dalam membuat hiasan dan cendera mata.

Sekitar tahun 2008 yang lalu mulai muncul kerajinan tangan berupa hiasan dan pada tahun 2014 (Irma, 2014) barulah ada pelatihan yang dilaksanakan di Situbondo dan kelompok pengrajin atau pembuat hiasan yang terbuat dari kerang-kerangan berhasil membentuk empat kelompok pengrajin dan setiap kelompok membina paling sedikit 10 orang. Kelompok ini sekarang sedang berkibar dan memproduksi kerajinan yang dipasarkan di sekitar pantai bira (PLA Dessiraja Cece, 2014). Hasil kerajinan tersebut mulai banyak diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara (Irma, 2014).

Berasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa kerajinan tangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ia merupakan salah satu jalan alternatif dalam menunjang ekonomi rakyat. Kerajinan ini dapat menopang ekonomi rakyat selain keterampilan bertenun. Menurut penuturan (Irma,

2014) menyatakan bahwa modal pembuatan cendera mata dari kerang-kerangan ini tidak terlalu besar, cukup mempersiapkan tenaga, kerang, lem, triples dll. Bahan kerang diperoleh dari pantai pulau Liukangloe (namun sudah mulai terbatas) walau sebagiannya di peroleh dari luar pulau Liukangloe yaitu dari pulau Jawa khususnya di Situbondo (PLA Dessiraja Cece , 2014).

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat adalah permodalan dan sistem pemasaran yang dapat menstabilkan harga. Apabila kedua masalah ini dapat terpecahkan, maka tidak menutup kemungkinan keterampilan ini dapat dijadikan sebagai andalan sumber keuangan bagi pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan potensi lembaga kemasyarakatan di atas cukup lengkap dan aktif, namun berdasarkan pernyataan kepala Desa Bira lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi rakyat belum berfungsi dengan baik, bahkan lembaga berupa koperasi dan lembaga penyandang dana lainnya belum beroperaasi secara maksimal, kalau boleh dikatakan tidak berfungsi (A. Wahidah, 2014). Itulah sebabnya masyarakat tidak dapat meningkatkan pendapatannya, khususnya dari segi kerajinan. Lebih lanjut kepala Desa Bira (A. Wahidah, 2014) mengharapkan ke depannya agar hasil karya masyarakatnya dapat meningkatkan penghasilan, namun kendalanya adalah listrik (khususnya di Pulau Liukangloe).

2. Strategi Dakwah dan Budaya Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

Memperhatikan potensi Desa Bira, khususnya yang berkaitan dengan strategi dakwah dan budaya lokal berupa kerajinan tangan dapat diberdayakan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka penulis mencoba merumuskan strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira yaitu tenun dan hiasan dari kerang-kerangan. Strategi dakwah dan budaya lokal dapat dijadikan sebagai penopang dan motivator dalam memperkuat ekonomi rakyat di Desa Bira. Strategi dakwah dan budaya lokal yang dimaksudkan meliputi:

Memperkenalkan niat yang tulus dalam bekerja: Untuk memperkuat ekonomi rakyat, maka terlebih dahulu yang perlu dibangun adalah dari dalam dirinya sendiri yaitu niat yang tulus. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki aqidah yang benar lalu dilengkapi dengan berbagai keterampilan berupa pelatihan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan desain sarung yang memiliki motif yang bervariasi dan mengembangkan potensi lokal seperti gambar perahu dan potensi pasir putih, demikian pula dengan desain motif kerang-kerangan yang lebih indah sehingga diminati oleh turis manca negara.

Memperkuat etos kerja sebagai bagian ajaran Islam: Memperkuat lembaga pengelola program di masyarakat dengan membentuk Unit Pembinaan Pembuatan Sarung dan Cendera Mata (UPPS dan CM) di setiap dusun yang bertugas untuk membina dan memasarkan hasil kerajinan lokal. Dengan program ini, masyarakat dapat lebih bersemangat dalam bekerja, apalagi bila disentuh dengan pendekatan agama berupa uraian yang berkaitan dengan dunia kerja adalah bagian dari ajaran Islam.

Mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan: Pendekatan strategi dakwah melalui penanaman nilai-nilai kejururan dan kepercayaan dapat menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tukang tenun dikatakan bahwa pada umumnya tukang tenun yang ada di Desa Bira adalah hanya sebagai tenaga kerja yang disewa, jadi pekerja hanya mendapat upah dari seseorang yang memesan pembuatan sarung dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan sangat memegang peranan dalam menopang ekonomi rakyat di Desa Bira.

Menanamkan nilai amanah dalam bekerja: Salah satu strategi dakwah yang diterapkan di Desa Bira adalah menanamkan nilai-nilai amanah dalam bekerja. Apabila para isteri tidak

amanah dalam bekerja, maka jelas mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Apabila hal itu terjadi, maka secara otomatis mereka akan terlambat menerima upah, kalau mereka tidak menerima upah, maka terjadilah masalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk pada persoalan biaya pendidikan anak-anaknya, sebab seluruh biaya dan kebutuhan hidup tergantung pada penghasilan dari bertenun.

Mendorong dalam pembuatan sarung tenun secara berkala sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu dipertahankan. Mengembangkan usaha pembuatan sarung dan cendera mata. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta membuka peluang kerja dan kesempatan kerja demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga mempermudah pencairan kredit modal usaha.

D. Penutup

Keterampilan bertenun merupakan salah satu keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa Bira Kabupaten Bulukumba. Keterampilan ini oleh wanita di desa tersebut dijadikan sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertenun merupakan satu-satunya pekerjaan/ keterampilan yang dimiliki oleh wanita di desa bira. Oleh sebab itu, menjadi tukang tenun merupakan satu-satunya pilihan wanita bira pada umumnya.

Alat tenun yang digunakan masyarakat ada dua jenis yaitu Alat Tenun tradisional (ATT) dan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Penggunaan alat tenun tersebut memiliki perbedaan yang khas dan kecepatan penyelesaiannya. Penggunaan ATT jauh lebih lambat dibanding dengan penggunaan ATBM. Bila ATT digunakan maka hanya dapat menyelesaikan 4-5 hari per lembar, tetapi bila menggunakan ATBM dapat menyelesaikan 1-2 lembar perhari. Itulah sebabnya sekarang ini banyak yang telah meninggalkan ATT dan beralih ke ATBM, namun tidak semuanya ke ATBM karena persoalan biaya.

Salah satu keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat (wanita) Desa Bira adalah keterampilan dalam membuat cendera mata berupa hiasan dinding, tempat tissue, kalung, gelang, hiasan meja yang terbuat dari kerang-kerangan. Ketrampilan ini mulai diminati oleh masyarakat desa bira, khususnya di Dusun Liukangloe. Pada awalnya masyarakat dusun Liukangloe membuat cendera mata secara otodidak sehingga kualitasnya sangat rendah. Namun dua bulan terakhir, masyarakat mulai bersemangat untuk membuat cendera mata setelah lima orang diutus ke Situbondo untuk belajar membuat hiasan. Strategi dakwah dan budaya lokal dalam memperkuat ekonomi rakyat di desa Bira adalah memperkenalkan niat yang tulus dalam bekerja, memperkuat etos kerja sebagai bagian dari ajaran Islam, mengajarkan pentingnya nilai kejujuran dan kepercayaan, menanamkan nilai-nilai amanah dalam bekerja dan mendorong dalam pembuatan sarung tenun secara berkala sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu dipertahankan.

Pustaka Acuan

A. Ilyas Ismail (2011), *Filsafat Dakwah: Rekayasa Mambangun Agama dan Peradaban Islam,* Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adi Fahruddin (2012), *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama.

Adiwarman A. Karim (2014), *Ekonomi Makro Islami,* Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar Arifin (2011), *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi,* Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu.

Edi Suharto (2010), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* Cet. IV; Bandung: Refika Aditama.

Hamiruddin, (2014), *Gerakan Dakwah Al-Nadzir*, Cet. I; Makassar; Alauddin University Press.

Hamzah Junaid (2013), *Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal*, dalam Jurnal Diskursus Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2013, PPS UIN Alauddin Makassar.

Ibrahim (2013), *Nilai-Nilai Budaya Lokal Pada Masyarakat Muslim Silanggaya Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. (Suatu Tinjauan Teologi Sufistik),* Makassar: Puslitpen.

Mahmuddin (2013), *Transformasi Sosial: Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal,* Cet. I; Makassar, Alauddin University Press.

Masmuddin (2015), *Konklusi Dakwah Kontemporer*, Cet. I; Makassar, Alauddin University Press.

Muh. Dahlan (2013), *Islam dan Budaya Lokal: Kajian historis terhadap adat perkawinan bugis Sinjai,* Disertasi. Makassar: UIN Alauddin Makassar

Muhammad Abu Zahrah (tth), *Al-Da'wah ila al-Islam*. Kairo: al-Fikr al-'Arabi.

Samiang Katu (2012), *Taktik dan Strategi Dakwah di Era Millenium (Studi Kritis Gerakan Dakwah Jamaah Tablig),* Cet. II; Makassar: Alauddin University Press.

Sampo Seha (2011), *Paradigma Dakwah,* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.

San Afri Awang (2014), http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/ sanafri.htm, 18-3-2014.

Sistem Ekonomi Kerakyatan (2014), http://succesary.wordpress.com/2008/ 12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/, 1-4-2014.

St. Nasriah (2014), *Sejarah Dakwah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.

Wahyu Ilahi (2010), *Komunikasi Dakwah,* Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya.

4

Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Gelandangan Eks-psikotik

The Degree of Success on Ex-psychotic Homeless Rehabilitation

Chulaifah dan Sri Prastyowati
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl Kesejahteraan Sosial No1, Sonosewu Yogyakarta. Telpon (0274 377265, Fax (0274)
Badan Pendidikan dan Penelitian Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.
Email: <sriprastyowati@ yahoo.com>. HP =6282134390395.
Diterima 25 Februari, diperbaiki 17 Maret, disetujui 24 Maret 2016.

Abstract

This research done to know the degree of success on homeless expsychotic rehabilitation seen from misconduct behavior aspect. Research location was at Pojoreken Homeless Institution, Medan Municipality, North Sumatera Province. Data gathered through documentary analysis of 15 files of moderate ex-homeless psychotic at the institution. Data are analysed through qualitatif-descriptive technique, on the degree of success of guidance, self and social realization, social integration, work skill and vocation seen from misconduct behavior during rehabilitation. The research found that the ability of self and social realization, social integration after rehabilitation was not significant, execpt in work and vocational skills. The degree of fequency of misconduct behaviors do not immidiately change the ability of self and social realizations, social integration, except in work and vocational skills. Those because there was psychological and social problems, indicated in continously labil emotion that manifested through "smiling", talk with him/herself, angry without any reason, retreat, easy-go, egoism, rage violently, confused, rejection, reluctant, strained, self hurting, lazy, steal, seek for rejected things, litering, silence, do not want bathing, talk all times, hurt others, and go anywhere. The research recommends that the guidance should be held continously, aspecially after rehabilitation and back to the community. Guidance should be given by those who understand on characteristic of homeless psichotic. It needs socialization among communities on homeless psichotic characteristic and services they need.

Keywords: ex- psychotic homeless; rehabilitation; degree of success.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku. Lokasi penelitian di Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Psikotik Pojoreken, Medan, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen terhadap 15 *file* dari gelandangan eks psikotik dengan kadar sakit jiwa sedang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan tingkat keberhasilan bimbingan; realisasi diri dan sosial, integrasi sosial, kemampuan keterampilan kerja kejuruan ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku selama masa rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemampuan realisasi diri, relasi dan integrasi sosial hasilnya sangat kecil, kecuali pada keterampilan kerja dan kejuruan. Tingkat keseringan penyimpangan perilaku gelandangan eks-psikotik tidak serta merta dapat mengubah kemampuan realisasi diri dan sosial, integrasi sosial, kecuali pada kemampuan keterampilan kerja kejuruan. Hal ini karena adanya masalah sosial psikologis, yang ditandai dengan emosi labil yang berkelanjutan dan terejawantah dalam bentuk penyimpangan perilaku tertawa, bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, menarik diri, *semau gue*, egois, mengamuk, kebingungan, penolakan, tegang, keengganan, penyangkalan, melukai diri sendiri, bermalas-malasan, mencuri, mencari dan menyimpan barang bekas, buang air besar dan kecil di sembarang tempat, bungkam, tidak mau mandi, bicara terus menerus, menyakiti orang lain, dan mengembara. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan bimbingan terus-menerus, terutama pada pascarehabilitasi dan kembali ke masyarakat. Bimbingan hendaknya dilakukan oleh orang yang memahami tentang karaktaristik gelandangan psikotik. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri gelandangan psikotik dan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi.

Kata kunci:penyimpangan perilaku; rehabilitasi; gelandangn eks-psikotik.

A. Pendahuluan

Gelandangan psikotik secara awam dipahami sebagai gelandangan yang mempunyai ciri-ciri khusus dengan perilaku aneh atau abnormal yang berbeda dengan norma perilaku manusia pada umumnya. Gelandangan psikotik selain hidup menggelandang, juga mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan kehilangan fungsi sosialnya. Fungsi sosial dapat berjalan dengan baik apabila seseorang mampu menjalankan fungsi sebagai mahluk sosial, hidup bersama dengan masyarakat mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang pada akhirnya mampu mengaktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi kejiwaan yang abnormal gelandangan psikotik telah kehilangan berbagai kemampuan, sehingga hidupnya dalam kondisi kurang sejahtera.

Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia mengalami pertambahan jumlah pada setiap periode; pada tahun 2013 Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menginformasikan, 0,17 persen penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia). Sedikit berbeda dengan estimasi tentang jumlah penderita psikotik yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Pusat, Bali, bahwa prosentase jumlah penderita psikotik menurut data kependudukan adalah satu orang perseribu penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa, sepuluh persennya hidup menggelandang dan memerlukan perawatan secara intensif. Diasumsikan jika pada tahun 2014 penduduk Indonesia berjumlah 254,9 juta jiwa, diperkirakan jumlah penderita gangguan jiwa (psikotik) 254.900 jiwa, dan sepuluh persennya atau 25490 jiwa memerlukan perawatan secara intensif. Jumlah penderita psikotik di Indonesia akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penderita psikotik tersebut tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penderita psikotik relatif banyak yaitu 8046 jiwa (Pusdatin Kementerian Kesehatan, 2013)

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah orang yang hidup dengan kondisi yang tidak sesuai dengan norma yang hidup di dalam masyarakat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, dan hidup menggelandang di tempat umum. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah pemulung, pengemis, pekerja seks komersial, anak terlantar dan orang gila (psikotik) yang hidup di jalanan. Dalam ilmu kesehatan jiwa, psikotik merupakan penderita gangguan jiwa kronis yang keluyuran di jalan-jalan umum, mengganggu ketertiban umum dan mengurangi keindahan lingkungan (Yohana, 2011).

Pasal 28 H UUD 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi amanat undang-undang, Kementerian Sosial menentukan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan eks-psikotik melalui panti. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat mental eks-psikotik dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat (Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental Eks-Psikotik dalam Panti, 2009).

Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan Eks-Psikotik di Pojoreken, Medan Sumatera Utara adalah salah satu panti rehabilitasi sosial yang memberi pelayanan bagi Gelandangan Eks-psikotik dengan kategori berat, sedang dan ringan. Bimbingan diberikan kepada gelandangan psikotik setelah mendapat perawatan dari rumah sakit jiwa dan dinyatakan sembuh sehingga disebut sebagai gelandangan eks-psikotik, meskipun dengan nomenklatur panti rehabilitasi sosial eks-psikotik, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Panti Rehabilitasi Sosial Pojoreken memberi pelayanan gelandangan psikotik dengan kadar berat, sedang dan ringan.

Gelandangan eks-psikotik sedang adalah mereka yang masih mampu menerima bimbingan walaupun kemampuannya sangat minim karena berbagai hambatan. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kenyataan menjadi hambatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk mengembalikan berbagai kemampuan di antaranya realisasi diri, relasi dan integrasi sosial, dan kemampuan keterampilan kerja kejuruan. Dalam konteks ini kajian tentang keberhasilan rehabilitasi ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku dipandang perlu dilakukan. Fokus penelitian ini pada gelandangan eks-psikotik dengan kadar psikotik sedang. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku, sedang tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis-jenis penyimpangan perilaku dan tingkat keberhasilan rehabilitasi ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi instansi dan pihak terkait dalam upaya peningkatan keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Peneltian ini menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, yang tersimpan dalam file, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memberikan kedalaman wawasan, asumsi serta tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi (Nasution; 2007). Penentuan sumber data: sumber data berasal dari *file* diambil secara acak sederhana sejumlah 15 *file* gelandangan eks-psikotik dari 31 file gelandangan eks-psikotik dengan kategori sedang dan mampu latih tanpa membedakan jenis kelamin serta usia. *File* diperoleh dari Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan Eks-psikotik Pojoreken, Medan, Sumatera Utara, karena panti tersebut memiliki kelayan psikotik dengan kadar sedang (mampu mengikuti bimbingan) dengan jumlah dan ciri-ciri sebagaimana ditetapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen berupa file kelayan yang menjadi sumber data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, terutama pada aspek perilaku yang tercatat dalam *file* masing-masing kelayan.

C. Analisis Keberhasilan Rehabilitasi Eks-psikotik

1. Kondisi Umum Panti Rehabilitasi Gelandangan Eks-Psikotik

Panti Sosial Gelandangan Eks-psikotik Pojoreken, terletak di Brastagi, sebuah kawasan perkebunan yang sejuk. Perjalanan dari pusat kota Medan menuju panti memerlukan waktu 4-5 jam dengan kendaraan roda empat. Meskipun nomenkaltur yang dipakai adalah Panti Sosial Eks-psikotik, tetapi dari hasil pengamatan langsung diketahui bahwa penghuni panti adalah gelandangan psikotik dengan kadar psikotik berat, sedang dan ringan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi kejiwaan yang dialami psikotik masih sangat labil. Saat gelandangan psikotik hasil razia dimasukkan RSJ dan dinyatakan sembuh, kemudian dipindahkan di panti, tetapi ketika berada di dalam panti, kemudian kambuh kembali menjadi psikotik.

Bangunan panti sebagian besar terbuat dari kayu, dengan lantai tanah, gelap, kotor, berbau, tempat tidur terbuat dari kayu tanpa alas, hanya terdapat sekat khusus yang memisahkan antara penerima layanan laki-laki dan perempuan. Belum ada pemisahan baik berdasarkan usia, maupun berdasarkan kadar psikotik sedang dan ringan, terdapat ruang isolasi untuk gelandangan psikotik dengan kadar berat.

Pengelola panti menyatakan, bahwa meskipun fasilitas panti sangat minim dan terkesan tidak manusiawi tetapi hal ini wajar untuk dilakukan, mengingat perilaku gelandangan psikotik susah untuk dikendalikan, bahkan tidak dapat diatur, karena sebagian besar kelayan di panti tersebut adalah kelayan dengan kadar psikotik berat yang emosinya masih labil, tidak dapat mengurus diri sendiri, sering mengamuk, merusak diri sendiri dan membahayakan orang lain, berperilaku sekehendak sendiri, termasuk buang

air kecil dan besar sesuai kehendak diri sendiri. Eks-psikotik di panti sebetulnya masih memerlukan perawatan medis, tetapi karena kapasitas RSJ sangat terbatas, mereka di tempatkan di panti, sehingga panti tidak hanya memberi pelayanan gelandangan eks-psikotik, tetapi juga melayani gelandangan psikotik berat yang seharusnya menjadi tupoksi dinas kesehatan (Tateki Yoga Tursilarini dkk., 2009).

Panti Sosial Gelandangan Eks-Psikotik Pojoreken mempunyai kapasitas 80 orang, dalam kenyataan dihuni oleh 91 kelayan, terdiri 60 orang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat, dan 31 orang lainnya penderita gangguan jiwa sedang dan ringan. Gelandangan psikotik dengan gangguan jiwa berat jumlahnya lebih banyak dibanding dengan gelandangan eks-psikotik dengan gangguan jiwa sedang dan ringan, dalam kenyataan menjadi kendala dalam pelayanan

2. Kondisi Kelayan Panti Pojoreken

Pengertian eks-psikotik yang diselaraskan dengan pengertian penyandang cacat mental eks-psikotik adalah seseorang yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa (telah dirawat di rumah sakit jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang), sehingga merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya, yaitu pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari (Buku Pedoman Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Dalam Panti, 2009).

Kelayan di Panti Rehabilitasi Sosial Pojoreken dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelayan dengan gangguan jiwa berat adalah mereka yang masih dalam kondisi labil emosinya, belum dapat mengurus diri sendiri, tidak dapat diajak komunikasi, sering mengamuk, merusak benda-benda di sekitarnya, merusak diri sendiri, membahayakan orang lain, buang air kecil dan besar di sembarang tempat, tidak dapat diatur. Kelayan dengan gangguan jiwa berat ditempatkan di ruang isolasi yang terpisah dengan kelayan lainnya, karena belum siap untuk dibimbing dan masih perlu mendapat perawatan medis yang intensif.

Kelayan dengan gangguan jiwa sedang adalah mereka yang sudah dapat mengikuti bimbingan, meskipun masih memerlukan bantuan dari orang lain dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kegiatan sehari-hari masih membutuhkan bantuan dan arahan petugas, mengalami gangguan emosional, seperti cemas, ingin pulang, kekhawatiran dan kegelisahan, dapat mengurus diri sendiri, masih mengalami kesulitan menyampaikan kehendak, baik secara lisan maupun tertulis, kurang menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa, untuk beradaptasi dengan lingkungan memerlukan bantuan dari orang lain. Hendramo (1992) menyatakan, bahwa seperti halnya bimbingan bagi penyandang tunagrahita, gelandangan eks-psikotik dengan kadar gangguan jiwa sedang memerlukan bantuan dari orang lain yang memahami kondisi kejiwaan kelayan. Bimbingan pada seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, faktor lingkungan juga berperan dalam keberhasilan bimbingan, lingkungan yang kurang memahami kondisi kejiwaan eks-psikotik membuat kecenderungan terjadinya penyimpangan perilaku.

Gelandangan eks-psikotik dengan kategori gangguan jiwa berat yang pada awal pelayanan seharusnya menjadi kewenangan dinas kesehatan (RSJ), tetapi dalam kenyataan berada di panti rehabilitasi sosial eks-psikotik. Kondisi yang demikian berakibat pada ketidaksesuaian tupoksi panti, yang seharusnya hanya bertugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik, dalam kenyataan melayani penderita gangguan jiwa (psikotik). Hal ini terjadi karena pihak rumah sakit jiwa tidak dapat menampung penderita gangguan jiwa. RSJ yang mempunyai daya tampung 400 orang dalam kenyataan harus menampung 455 orang, ditambah 60 orang penderita gangguan jiwa dengan rawat inap. Kondisi demikian menimbulkan permasalahan bagi pengelola panti, khususnya bagi gelandangan dengan gangguan jiwa dari hasil razia yang masih memerlukan perawatan secara medis.

Gelandangan psikotik yang masih memerlukan perawatan medis tidak mungkin mendapatkan pembinaan di Panti Sosial Pojoreken, tugas pokok dan fungsinya Panti Pojoreken memberi pelayanan dan rehabilitasi eks-psikotik, pasca menjalani rehabilitasi medis, pihak panti juga tidak mampu menanggung biaya pengobatan yang relatif mahal.

Biaya pengobatan selain diambil dari biaya operasional, panti juga mendapat bantuan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas), tetapi bantuan tersebut hanya diberikan bagi kelayan yang jelas latar belakang keluarganya, sementara kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar kelayan gelandangan psikotik dengan gangguan jiwa berat tidak jelas latar belakang keluarganya, sehingga banyak kelayan yang belum terjangkau oleh bantuan kesehatan. Panti dihadapkan pada pilihan yang sulit, jika menerima kelayan yang masih dalam kondisi gangguan jiwa berat, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya). Akan tetapi jika menolak, pengelola panti dapat dituduh melanggar hak asasi manusia.

Untuk mengatasi hal ini diupayakan kerja sama antara RSJ dan Panti. RSJ mengirim pskiater untuk memeriksa kelayan penderita psikotik, ketika dijumpai kelayan yang mengalami gangguan jiwa berat, segera dibawa ke RSJ untuk mendapat pengobatan, setelah dinyatakan sembuh dikembalikan ke panti untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Kelayan dari RSJ yang selesai mendapat pelayanan rehabilitasi medis, dititipkan ke Panti Sosial Eks Psikotik Pojoreken untuk mendapatkan bimbingan selanjutnya.

3. Jenis Penyimpangan Perilaku

Seseorang berperilaku menyimpang jika perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma kelaziman yang berlaku di masyarakat lingkungannya, yang dimungkinkan membahayakan atau merugikan baik secara fisik maupun non fisik bagi diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kartini Kartono dan Dali Gulo (2000: 2) menyatakan, bahwa penyimpangan perilaku adalah tingkah laku abnormal yaitu tingkah laku yang menyimpang dari tingkah laku normal, biasanya dikaitkan dengan tingkah laku patologis atau mal-adaptif (tidak mampu menyesuaikan diri); tingkah laku yang ditandai dengan kesukaran kognitif yang rusak dan kasar, atau fungsi sosial dan kontrol diri yang tidak bisa terkendali. Tingkah laku abnormal dinyatakan pula sebagai amnesia atau lemah ingatan (*feeble mindleness*) atau kerusakan mental *(mental diliciency)*. Gelandangan psikotik merupakan pribadi sosiopatik, pribadi yang anti sosial dan dapat didefinisikan sebagai bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi, sehingga muncul perilaku autistik, bentuk perilaku yang penghayatannya hanya dimengerti oleh diri sendiri, oleh orang lain dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan perilaku, yang dapat muncul setiap saat tanpa mengenal waktu (Katini Kartono, 2011).

Dari hasil telaah dokumen diketahui, bahwa 15 *file* termasuk gelandangan eks-psikotik dengan kadar sedang memiliki 22 jenis penyimpangan perilaku, yaitu tertawa dan bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, menarik diri, *semau gue,* egois, mengamuk, kebingungan, penolakan, tegang, keengganan, penyangkalan, melukai diri sendiri, bermalas-malasan, mencuri, menyimpan barang bekas (*nyusuh*, bahasa Jawa), mencari barang bekas (*guris*, bahasa Jawa), buang air besar dan kecil di sembarang tempat, bungkam, tidak mau mandi, bicara terus menerus, menyakiti orang lain dan mengembara. Dari 15 *file* yang menjadi sumber data diketahui seorang gelandangan eks-psikotik dapat melakukan lebih dari satu jenis penyimpangan perilaku yang bervariasi.

Penyimpangan perilaku mengamuk, berdiam diri dan menolak merupakan penyimpangan perilaku yang paling sering dilakukan, berturut-turut penyimpangan perilaku mencuri, mengembara, bicara dan tertawa sendiri serta bungkam. Berbicara dan tertawa sendiri meru-

pakan jenis penyimpangan perilaku yang sering terjadi saat berolahraga, walaupun pada kegiatan lain tertawa dan bicara sendiri menjadi kebiasaan sehari-hari. Olah Raga sebagai salah satu bimbingan fisik yang bertujuan untuk memberi kemampuan pemeliharaan kesehatan fisik dan integrasi diri, kepercayaan diri dan disiplin diri. Selain bicara dan tertawa sendiri, perilaku menyimpang lain yang sering dilakukan adalah penolakan. Dari hasil telaah dokumen, terdapat 11 kasus penyimpangan perilaku penolakan; misalnya menolak untuk mengikuti kerja bakti, mandi, dan mengikuti kegiatan olah raga. Dari 15 *file* yang menjadi sumber data semua pernah melakukan penyimpangan perilaku penolakan.

4. Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Eks-psikotik

Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyebutkan, bahwa rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami gangguan disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sebagai bentuk bantuan, rehabilitasi bagi gelandangan eks-psikotik dimaknai sebagai upaya bantuan medik, sosial dan keterampilan. Hasil penelitian Tjutju Soendari dan Sri Widati (2015), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi menyimpulkan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kelayanan di antaranya adalah kemampuan, kecakapan dan masalah psikologis yang dialami kelayan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kelayan yaitu, yaitu lingkungan (keluarga dan masyarakat, pembimbing dalam panti).

Gelandangan eks-psikotik adalah penyandang masalah sosial dengan kondisi psikologis yang tidak normal dengan berbagai masalah keterbatasan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di antaranya keterbatasan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, integrasi sosial,di samping keterbatasan kemampuan kerja. Bimingan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan realisasi diri, sosial, dan integrasi sosial. Bimbingan keterampilan kerja bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan keterampilan kerja dan kejuruan. Gelandangan eks-psikotik, dengan masalah sosial psikologis yang dialaminya, sering melakukan penyimpangan perilaku selama masa rehabilitasi sehingga mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi (realisasi diri, relasi sosial, integrasi sosial dan kemampuan keterampilan kerja kejuruan).

Tingkat Keberhasilan Realisasi Diri dari Aspek Penyimpangan Perilaku: gelandangan eks-psikotik yang mengalami gangguan mental seperti halnya penyandang desabilitas mental yang memiliki berbagai keterbatasan, selain disebabkan oleh faktor eksternal juga faktor internal, yaitu masalah yang timbul dari dalam diri penerima layanan karena perilakunya yang menyimpang (Eddy Hendramo dan DYP Sugiharto, 1992). Hal tersebut dimungkinkan karena kondisi kejiwaannya yang selalu labil, meski sudah mendapat pembinaan yang intensif dalam waktu yang relatif lama. Kondisi kejiwaan yang labil tersebut sekaligus merupakan konsekuensi sosial psikologis yang membuat gelandangan psikotik mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan realisasi diri. Kesulitan juga terjadi saat gelandangan eks psikotik melakukan interaksi dan sosialisasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat di luar lingkungannya. Kesulitan sering muncul dalam bentuk kesalahpahaman, ketika gelandangan eks psikotik melakukan perbuatan yang menurutnya wajar, ternyata perilaku tersebut oleh masyarakat lingkungannya dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Bentuk kemampuan realisasi diri terejawantah dalam berbagai empat kecakapan: kecakapan merawat diri sendiri, misalnya mandi, mencuci, buang air besar dan kecil pada tempatnya, menyeterika baju sendiri; kecakapan untuk menerima pesan dari orang lain; kecakapan untuk mengemukakan pendapat; dan kecakapan bekerja untuk orang lain. Berdasarkan jenis kecakapan yang

dicapai dalam melakukan realisasi diri, kategorisasi kemampuan realisasi diri berdasarkan jenis kecakapan tersebut meliputi: jika gelandangan eks-psikotik mampu melakukan keempat kecakapan tersebut, gelandangan eks-psikotik termasuk kemampuan realisasi diri sangat bagus. Jika mampu melakukan tiga dari empat kecakapan, termasuk dalam kategori bagus. Dua dari empat kecakapan, termasuk kategori cukup bagus; dan satu dari empat kecakapan termasuk dalam kategori kurang bagus.

Secara umum dari lima belas kelayan belum mempunyai kemampuan realisasi diri dengan kategori kemampuan sangat bagus dan bagus. Dari 15 *file* yang menjadi sumber data, 12 (70,4 persen) mempunyai kemampuan untuk realisasi diri dengan kategori cukup bagus, yaitu mampu buang air kecil dan besar pada tempatnya dan mandi sendiri. Tiga orang lain (29,6 persen) hanya mampu melakukan satu kecakapan, yaitu buang air kecil dan besar pada tempatnya. Hasil penelusuran dokumen lebih jauh diketahui, bahwa kecakapan buang air besar dan kecil pada tempatnya, serta mandi tidak dilakukan setiap hari dan secara terus menerus dan penyimpangan perilaku yang sering terjadi adalah penolakan, bungkam, tidak peduli, dan bermalas-malasan.

Tingkat Keberhasilan Relasi Sosial dari Aspek Penyimpangan Perilaku: Relasi sosial adalah kemampuan gelandangan eks-psikotik untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain (lingkungan). Dari 15 *file* yang dijadikan sumber data diketahui bahwa hampir semua kelayan tidak mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, meskipun kelayan mempunyai dorongan relasi sosial yang cukup tinggi, tetapi hanya mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan orang-orang yang sudah biasa mereka temui di dalam panti (pengelola panti). Ketidakmampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain di luar panti terlihat dalam bentuk perilaku aneh, seperti berdiam diri, tertawa sendiri, atau memandangi orang lain, atau tidak mempedulikan orang lain. Perilaku tersebut oleh Hendrano (1992: 4) disebut sebagai akibat beban psikologis dan merupakan sumber frustrasi. Perilaku tersebut dapat berkurang apabila ada sikap dan penerimaan dari orang lain (lingkungan), perhatian positif dan upaya untuk tanggap, sehingga timbul rasa aman. Kemampuan untuk melakukan relasi sosial bukan saja ditentukan oleh tingkat penyimpangan perilaku, melainkan ditentukan pula oleh sikap dan penerimaan orang lain atau lingkungan terhadap keberadaan gelandangan eks-psikotik.

Dalam bimbingan peningkatan kemampuan melakukan relasi sosial, seorang gelandangan eks-psikotik dapat disebut mempunyai kemampuan relasi sosial sangat bagus apabila mempunyai kemampuan untuk mengenal dan berkomunikasi dengan setiap pegawai panti, berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar panti, mampu mengenal orangtuanya, mengenal saudaranya. Berdasarkan hasil telaah dokumen, 15 *file* yang dijadikan sumber data tidak ada seorangpun, yang mempunyai kemampuan sangat bagus, dan bagus. dan hanya satu orang (6,7 persen) yang mempunyai kemampuan relasi sosial dengan kategori cukup bagus, yaitu mampu mengenal pegawai di lingkungan panti dan mampu mengenal dan berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan panti. Hasil penelusuran lebih jauh terhadap 15 *file*, diketahui, bahwa kemampuan tersebut terjadi karena kelayan telah bertahun-tahun berada di Panti Pojoreken, dan beberapa kali saudaranya menengok. Kelayan akan menjawab sapaan dari masyarakat di lingkungan panti, meskipun hanya beberapa orang dari anggota masayarakat yang mau menerima kelayan gelandangan eks-psikotik dengan apa adanya, tetapi hal ini mampu menumbuhkan keinginan dari kelayan untuk melakukan relasi sosial. Empat belas (93,8 persen) dari 15 kelayan hanya mampu berkomunikasi dengan pegawai panti, meskipun hanya sesekali mau menjawab pertanyaan petugas panti. Dengan keterbatasan kemampuan untuk melakukan relasi sosial di satu sisi dan kemauan kuat dari gelandangan eks-psikotik untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di sisi lain, memberikan gam-

baran bahwa untuk meningkatkan kemampuan relasi sosial diperlukan komunikasi secara rutin dan terus menerus dengan memahami kondisi psikologis gelandangan tersebut.

Keterbatasan jumlah dan kemampuan kapasitas profesional pegawai panti dalam kenyataan berakibat pada kurang berhasilannya bimbingan peningkatan kemampuan relasi sosial bagi kelayan. Dalam Panti Pojoreken hanya ada seorang pekerja sosial profesional, padahal pekerja sosial adalah profesi yang dibekali dengan ilmu sosial murni dan terapan yang didasari dengan ilmu sosiologi dan psikologi, adalah profesi yang sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial psikologis yang dialami oleh kelayan.

Tingkat Keberhasilan Integrasi Sosial dari Aspek Penyimpangan Perilaku: Integrasi sosial dimaksudkan adalah aktivitas menyangkut toleransi antarmanusia dan keterpenuhan hak-hak berpolitik dan demokrasi. Dengan berbagai keterbatasannya gelandangan eks-psikotik tidak dapat melakukan integrasi sosial tersebut di muka. Pemberian bimbingan integrasi sosial baru sebatas memberi kesempatan melakukan kegiatan yang sederhana, misalnya kerja bakti di lingkungan panti, melatih melakukan ibadah bersama, melayat dan upacara kegamaan dan tidak mengganggu aktivitas sosial di masyarakat. Kemampuan melakukan integrasi sosial ditentukan sebagai berikut. Sangat bagus, jika mampu melakukan empat dari kegiatan, bagus jika mampu melakukan tiga dari empat kegiatan tersebut di muka, cukup bagus jika mampu melakukan dua dari empat kegiatan, dan kurang bagus apabila hanya mampu melakukan satu kegiatan dari empat kegiatan, yaitu tidak mengganggu aktivitas sosial di masyarakat.

Dari 15 *file* yang dijadikan sumber data diketahui, bahwa seluruh kelayan dengan tingkat keseringan penyimpangan perilaku yang berbeda dan tidak dapat diketahui sebelumnya menunjukkan (100 persen) hanya mempunyai kemampuan integrasi sosial dengan kategori kurang bagus, yaitu tidak mengganggu masyarakat. Untuk menumbuhkan kemampuan integrasi sosial diperlukan kedekatan hubungan dengan seseorang yang mampu memahami kondisi gelandangan eks-psikotik dengan segala keterbatasannya. Ketidakmampuan dalam melakukan integrasi sosial menyebabkan gelandangan eks-psikotik tidak dapat melakukan aktivitas sosial, kecuali jika ada kemampuan dari orang-orang tertentu yang terdekat untuk memberikan perhatian dengan pemahaman terhadap kondisi psikis gelandangan eks-psikotik. Jika dilihat dari potensi personil yang ada di dalam panti, hal ini sulit dilakukan mengingat bahwa panti Pojoreken belum mempunyai dokter jiwa yang setiap saat berada di panti untuk mendampingi dan membimbing gelandangan eks psikotik dan kurangnya profesi pekerja sosial.

Tingkat Keberhasilan Keterampilan Kerja dari Aspek Penyimpangan Perilaku: Hasil telaah dokumen dari 15 *file* diketahui bahwa tingkat keseringan terjadinya penyimpangan perilaku tidak serta merta dapat menunjukkan tingkat keberhasilan bimbingan keterampilan kerja. Ketrampilan kerja yang diberikan dalam panti rehabilitasi adalah berkebun. Mulai dari mengolah lahan, mencangkul, menanam benih, menyiangi tanaman, dan memanen hasil kebun. Dari hasil penelusuran lebih jauh terhadap 15 *file,* diketahui keterampilan diberikan dengan berkebun, menanam labu siam dan wortel, singkong dan jagung. Keterampilan berkebun yang diberikan secara rutin dan terus menerus merupakan jenis keterampilan yang sesuai dengan kondisi gelandangan psikotik dengan kategori sedang, masih mampu latih. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan perilaku, seorang pembimbimg mendampingi kelayan secara rutin dan terus menerus. Bimbingan keterampilan kerja berkebun secara rutin dan terus menerus, dapat menurunkan tingkat keseringan penyimpangan parilaku, meskipun gelandangan eks-psikotik dicirikan sebagai seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang, tetapi ada potensi yang dikembangkan dengan bimbingan secara rutin dan terus menerus meskipun kelayan sudah berada di lingkungan luar panti.

Hendramo (1992) menyatakan, bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan yang monoton, spesifik yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin melalui pembiasaan kerja. Pernilaian keberhasilan keterampilan kerja ditentukan sebagai berikut. Mempunyai nilai sangat bagus jika gelandangan psikotik mampu mengetahui tempat dia harus bekerja, kapan harus mulai dan berhenti bekerja, jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Mempunyai nilai bagus jika mampu mengetahui tiga dari empat kategori kemampuan, mempunyai nilai cukup jika mampu mengetahui dua dari empat kemampuan; kurang jika hanya mampu mengetahui satu dari empat kemampuan. Dari telaah dokumen diketahui, bahwa dari 15 *file* ; sembilan orang (60,3 persen) mempunyai kemampuan keterampilan kerja bagus, enam orang (39,7 persen) mempunyai kemampuan keterampilan kerja cukup bagus.

Ketidakmampuan kelayan untuk mengetahui kapan harus berhenti bekerja dapat dimaknai secara positif, bahwa gelandangan eks-psikotik dengan kadar sedang mempunyai kemampuan bekerja yang cukup tinggi. Ketidakmampuan untuk mengetahui tempat dia harus bekerja, sangat dimaklumi mengingat bahwa lahan untuk berkebun dilakukan secara bergantian, bantuan dari seorang pembimbing yang diberikan secara rutin sangat dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan keterampilan kerja.

Tingkat Keberhasilan Kemampuan Keterampilan Kerja Kejuruan: Ketrampilan kerja kejuruan adalah keterampilan kerja yang diberikan secara khusus dalam proses berkebun, mulai dari mencangkul sampai dengan memetik hasil kebun dan membersihkan hasil kebun. Hasil penelusuran *file* lebih jauh menunjukkan, bahwa ada sebagian kelayan yang dalam kesehariannya menekuni keterampilan khusus mencangkul, menabur benih, menyiangi tanaman, dan memetik hasil kebun dan membersihkan hasil kebun. David H Barlow (2006) menyatakan, bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan yang monoton, spesifik yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin melalui pembiasaan kerja. Keberhasilan kemampuan keterampilan kerja kejuruan dapat diketahui dari kebiasaan sehari-hari. Gelandangan psikotik yang mempunyai keterampilan khusus dalam kegiatan berkebun dengan tekun, memperkuat kebenaran adalah keberhasilan bimbingan keterampilan kerja kejuruan berhubungan dengan tingkat penyimpangan perilaku, jika gelandangan eks-psikotik tersebut diberi bimbingan keterampilan kerja kejuruan secara rutin terus menerus, kelayan akan melakukan pekerjaan tersebut secara rutin kendati dalam melakukan pekerjaan tersebut masih memerlukan bimbingan dari orang lain.

Keberhasilan keterampilan kerja kejuruan, antara lain disebabkan karena adanya karakteristik khusus yang merupakan salah satu kelebihan dari perilaku gelandangan eks-psikotik yang dapat disalurkan dengan melakukan aktivitas fisik untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang bersifat rutin dan monoton. Bimbingan rehabilitasi dalam waktu relatif lama, sangat memungkinkan bagi gelandangan psikotik untuk tetap melakukan pekerjaan, semakin asyik dengan kegiatan rutin, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan perilaku. Keberhasilan bimbingan keterampilan kerja kejuruan ditentukan sebagai berikut, gelandangan eks-psikotik mempunyai nilai keterampilan kerja kejuruan sangat bagus bilamana mampu memilih jenis pekerjaan yang paling cocok dan disukai, mampu mengetahui cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik, mampu mengetahui manfaat dari pekerjaan yang dilakukan dan mampu memperoleh manfaat dari hasil pekerjan yang dilakukan.

Mempunyai nilai bagus apabila mampu mengetahui tiga dari empat kemampuan, dan mempunyai nilai cukup jika mampu melakukan dua dari empat kemampuan, kurang jika hanya mampu mengetahui satu dari empat kemampuan. Hasil penelusuran melalui telaah dokumen diketahui bahwa dari 15 *file* gelandangan eks-psikotik secara umum (100 persen), berhasil mengikuti

bimbingan keterampilan kerja kejuruan dengan kategori bagus, yaitu mampu melakukan tiga kategori: mampu memilih jenis pekerjaan yang paling cocok dan disukai, mengetahui cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik, mengetahui manfaat dari pekerjaan yang dilakukan. Kemampuan untuk menerima manfaat secara ekonomi dari hasil keterampilan kerja kejuruan belum dapat dirasakan oleh kelayan, karena hasil dari berkebun masih sebatas untuk konsumsi sendiri.

F. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian dengan telaah dokumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku dapat disimpulkan sebagai berikut. Tingkat keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku, di Panti Rehabilitasi Sosial Pojoreken belum dapat berhasil secara maksimal. Hal ini terlihat dari perilaku gelandangan eks-psikotik yang belum mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara baik. Dalam pelaksanaan rehabilitasi masih memerlukan tambahan obat-obatan dan pemeriksaan tenaga medis khususnya dokter jiwa yang dilakukan secara rutut dan terus menerus.

Dari 15 *file* yang menjadi sumber data diketahui, 22 jenis penyimpangan perilaku, yaitu tertawa dan bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, menarik diri, *semau gue*, egois, mengamuk, kebingungan, penolakan, tegang, keengganan, penyangkalan, melukai diri sendiri, bermalas-malasan, mencuri, menyimpan barang bekas (*nyusuh*) mencari barang bekas (*guris*), buang air besar dan kecil di sembarang tempat, bungkam, tidak mau mandi, bicara terus menerus, menyakiti orang lain dan mengembara. Satu orang gelandangan eks psikotik dapat melakukan lebih dari satu jenis penyimpangan perilaku dengan waktu yang berbeda dan secara terus menerus.

Tingkat keberhasilan rehabilitasi tidak semata-mata dapat dilihat dari tinggi rendahnya tingkat keseringan jenis penyimpangan perilaku yang terjadi saat bimbingan, tetapi faktor lingkungan dan kemampuan profesional dari pembimbing, pemberi pelayanan menjadi faktor penting yang harus disertakan dalam keberhasilan rehabilitasi gelandangan eks-psikotik. Tingkat keseringan terjadinya penyimpangan perilaku tidak menunjukkan tingkat keberhasilan bimbingan dalam peningkatan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, integrasi sosial kecuali pada keterampilan kerja, keterampilan kerja kejuruan. Untuk keberhasilan bimbingan dalam rehabilitasi, kerjasama antarinstansi dan kemampuan profesional serta ratio jumlah kelayan dengan pembimbing menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Rekomendasi: dari kesimpulan di muka, dalam rangka peningkatan keberhasilan rehabilitasi sosial gelandangan eks-psikotik perlu diupayakan dengan: Memberikan bimbingan secara terus-menerus, berkesinambungan, terutama pada pasca rehabilitasi dan kembali ke masyarakat; Bimbingan yang dilakukan hendaknya dilakukan oleh orang yang memahami tentang karaktaristik gelandangan psikotik. Seiring dengan itu dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri gelandangan psikotik dan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi.

Mengacu pada ketidakberhasilan rehabilitasi pada realisasi diri, relasi sosial, integrasi sosial kecuali pada kemampuan keterampilan kerja dan kemampuan keterampilan kerja kejuruan ditinjau dari aspek penyimpangan perilaku, catatan harian tentang perubahan perilaku yang terjadi pada masing-masing kelayan saat bimbingan, hendaknya tidak dijadikan pedoman untuk pengukuran keberhasilan rehabilitasi dan sosialisasi di masyarakat. Namun pernilaian terhadap kelayan penghuni panti sosial gelandangan eks-psikotik di tiap-tiap panti harus tetap dilakukan, guna mengetahui gerak perkembangan gelandangan eks-psikotik dari hari ke hari selama dalam masa rehabilitasi. Untuk peningkatan keberhasilan rehabilitasi, hendaknya disediakan tenaga medis yaitu dokter umum dan psikhiater yang selalu siap setiap kali diperlukan serta pemberian obat secara rutin dan terus menerus.

Untuk keseimbangan rasio jumlah penyandang gangguan jiwa psikotik dan eks-psikotik yang berada di dalam panti, dinas kesehatan hendaknya melakukan penambahan jumlah tenaga medis. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara, hendaknya pelayanan kesehatan bagi gelandangan eks-psikotik yang berada di dalam maupun di luar panti dimasukkan dalam program JKN (BPJS Kesehatan).

Pustaka Acuan

Ayu Agung Kusumawardhani Dr A.A. SpKJ. (2015), *Martabat Dalam Kesehatan Jiwa,* Makalah Menyongsong Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, 10 Oktober 2015. Diakses 22 April 2016.

Carole Wade, Carol Tavris. (2012). *Psikologi*. Jakarta Timur: Erlangga.

Eddy Hendramo, DYP Sugiharto. (1992), *Masalah-masalah Sosial Psikologis Akibat Cacat Mental. Temanggung:* Bahan Penyuluhan dan Pembekalan bagi Orang tua atau wali penerima layanan, Temanggung, Kerjasama IKIP Semarang dengan RSBG Temanggung.

Husaini Usman. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartini Kartono Dr. (2011). Patologi Sosial 3, *Gangguan Kejiwaan*: Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kartini Kartono dan Dali Gulo. (2000). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionerjaya.

Nasution. S. (2007). *Metode Rescearh, Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tateki Yoga Tursilarini, dkk. (2009). *Uji Coba Model Penanganan Gelandangan Psikotik.* Yogyakarta: BPKS Press.

Tjutju Soendari dan Sri Widarti; *Laporan Penelitian Model Program Layanan Rehabilitasi dalam Peningkatan Keberhasilan Kerja Tunagrahita Dewasa*, Yogyakarta: diakses tgl 2 April 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang sudah diamandemen).

Undang- Undang No 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial.*

V Mark Durand, David H Barlow, (2006) *Psikologi Abnormal.* Jakarta: Pustaka Pelajar

Yohana E Prawitasari (2011). *Psikologi Klinis, Pengantar Terapan Mikro dan Makro.* Jakarta: Erlangga.

(2009) *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Dalam Panti*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

5

Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Social Organization Participation on Inhabitable House Rehabilitation

Setyo Sumarno
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
Jl Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur, Telp 021-8017146 E-mail: <setyosumarno@rocketmail.com>.
Diterima 14 Desember 2015, diperbaiki 20 Desember 2015, disetujui 20 Februari 2016.

Abstract

House is one the basic of need, as a place of rest and refuge from a variety of situations and threats. House is as well as a medium for the creation of social interaction, cultural tranfer, implementattion of family education, and even becomes a status symbol. For the moyority of people considered a poor family, house is just as a given regardless of its feasibility in terms of physical, mental and social. Jam'iyyah foundation ar Rahmah Kuwait, one of social organization helped Indonesian government in overcoming poverty through ininhabitable home repairement. Aid amounting to Rp 650 million for 65 housing units concentrated in rural districts Sidorejo, Bandongan, Magelang Regency, Central Java Province. Activities came out with the involvement of cadres of disaster preparedness, youth, social workers (PSM), social workers districts (TKSK) and scouts. Community participation were in the form of money, goods, energy, and mind. This success can not be separated from the role of village offials; community leaders, who facilitated for formation of the committee and mobilize communities to work together; Camat (district leader) role in facilitating the proposal; and local goverment in funding home improvements and refining. Home improvement which was originally planned only for impermanent purpose, became permanent new home with tiled floors and walls.

Keywords: inhabitable house; Jam'iyyah ar Rahmah foundations; rehabilitation

Abstrak

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagai tempat untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman. Rumah juga sebagai media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait salah satu organisasi sosial telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan sebesar Rp 650.000.000,- untuk 65 unit rumah dikonsentrasikan pada desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka. Partisipasi masyarakat dalam bentuk, uang, barang, tenaga, ataupun pikiran. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta aparat desa; tokoh masyarakat yang telah memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong; camat berperan dalam memfasilitasi proposal dan usulan; dan pemerintah daerah membantu dalam penambahan dana perbaikan rumah. Perbaikan rumah yang semula direncanakan hanya tambal sulam, menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok.

Kata kunci: Rumah tidak layak huni; Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah; rehabilitasi

A. Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman, seperti hujan, angin, binatang buas tetapi tempat untuk terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran

dalam keluarga. Rumah menjadi media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Demikian besar fungsi rumah bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga fungsi tersebut, rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik aman menjadi tempat berlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukan hal yang mudah. Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Permasalahan fakir miskin, di samping mereka tidak memiliki modal untuk usaha ekonomi produktif juga tidak memiliki atau mempunyai rumah tinggal yang layak huni. Kita menyadari bahwa keberadaan permukiman kelompok miskin khususnya permukiman yang berada di wilayah perkotaan atau pinggirian kota pada umumnya kurang memadai, baik dari aspek ketersediaan air bersih, saluran got dan lingkungan yang padat penghuni atau terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana umum.

Data Pusdatin Kesos pada tahun 2008 menggambarkan bahwa terdapat 2.456.521. KK yang dikategorikan memiliki rumah tidak layak huni yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Data tersebut apabila dicermati di lapangan bisa bertambah, berkaitan dengan jumlah angka kemiskinan dan pertambahan penduduk yang membutuhkan rumah. Di Kabupaten Magelang berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah rumah tangga miskin tercatat 142.583 kk tersebar di 21 Kecamatan dan 372 desa. Dari jumlah tersebut, 9.780 kk dari keluarga miskin menempati rumah tidak layak.

Penataan lingkungan perumahan melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok miskin akan pentingnya tempat tinggal yang bersih, sehat dan layak huni. Untuk mencapai tempat hunian yang layak diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan yang bersih. Dampak dari lingkungan permukiman yang bersih, akan memberikan kontribusi yang positif untuk menghindari munculnya penyakit yang bisa menggangu aktivitas masyarakat, seperti demam berdarah, diare, dan penyakit kulit.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah, pemerintah (Kementerian Sosial) telah meluncurkan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana. Program ini dimulai sejak tahun 2006 dengan sasaran keluarga miskin, khusus untuk rumah tidak layak huni. Program ini merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kemiskinan terpadu yang menyentuh akar kemiskinan, mencakup perubahan sikap, perbaikan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat, peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Permasalahan rumah tidak layak huni yang dimiliki kelompok miskin memiliki masalah multidimensional, sehingga penanganannya memerlukan kajian yang komprehensif.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Teknik penentuan responden dan informan: Responden dipilih secara sengaja (*purposive*) individu yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka dipilih berdasarkan bidang tugasnya, seperti aparat Kementerian Sosial dari unit kerja direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan, dinas sosial provinsi dan kabupaten dari bidang permberdayaan sosial, termasuk pendamping lapangan dan penerima

bantuan sosial. Informan juga dipilih secara purposif, diperlukan untuk lebih menggali dan memahami pelaksanaan kegiatan bedah kampung, jumlahnya informan tidak dibatasi, dilihat dari kepentingan atau keperluan data dan informasi lapangan. Teknik pemilihan lokasi: ditetapkan secara sengaja dengan alasan lokasi terpilih memperoleh program bedah kampung yang sudah berlangsung dalam tahun anggaran 2012, sebagai unit analisis, yaitu Kabupaten Magelang (Jawa Tengah).

Teknik pengumpulan data: Digunakan empat teknik, telaah dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan, laporan kegiatan dan hasil penelitian; Pengamatan, dengan melakukan pengamatan lapangan di lokasi pelaksanaan bedah kampung; Wawancara dilakukan terhadap individu pelaksana program, pendamping sosial, keluarga, dan tokoh masyarakat; Diskusi dilakukan dalam upaya untuk menyamakan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan. Teknik analisis data: menggunakan teknik kualitatif, yang menekankan pada data dan keterangan yang diperoleh dari lapangan mengenai pandangan penerima bantuan karena mereka sebagai objek langsung,

C. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magelang

1. Gambaran Wilayah Magelang

Secara geografis Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Di bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Di bagian barat perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sumbing. Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Pada bagian tengah mengalir Kali Progo beserta anak-anak sungainya menuju selatan. Di Kabupaten Magelang juga terdapat Kali Elo yang membelah dua wilayah ini. Pertemuan kembali kedua kali tersebut terletak di Desa Progowati yang konon dahulu di tempat itu lebih banyak penduduk berjenis kelamin wanita daripada pria. Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Magelang berada pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena terletak pada jalur persimpangan dari berbagai arah. Dilihat dari peta orientasi Propinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya terletak di tengah, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Secara geoekonomis, Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan, jalur kegiatan ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo.

Dahulu wilayah Kabupaten Magelang dilalui jalur kereta api yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta, bahkan merupakan salah satu jalur kereta api tertua yang berada di Indonesia. Stasiun yang ada ada dalam wilayah Kabupaten Magelang antara lain; Stasiun Muntilan, Stasiun Blabak, Stasiun Mertoyudan, dan Stasiun Secang. Namun, meletusnya Gunung Merapi sekitar tahun 1970 membuat jalur kereta api tersebut rusak akibat terjangan lahar, sehingga menyebabkan jalur dan stasiun tersebut tidak difungsikan lagi. Kabupaten Magelang berada di jalur strategis yang menghubungkan dua ibu kota provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Kota Mungkid sebagai Ibukota Kabupaten Magelang berada sekitar 15 km di sebelah selatan Kota Magelang, dapat dijangkau mudah dengan kendaraan roda empat. Di Secang terdapat persimpangan antara jalan negara antara Semarang–Magelang-Jogjakarta dan jalan provinsi menunju Temanggung.

Luas wilayah Kabupaten Magelang 1.085,73 km2 (3,34 persen) dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan mempunyai lahan persawahan yang terdiri dari: sawah berpengairan sederhana 45,41 persen, sawah tadah hujan 22,70 persen, sawah berpengairan teknis 18,45 persen, sawah dengan pengairan setengah teknis 13,44 persen dan merupakan lahan kering 65,48 persen. Secara Geografis Kabupaten Magelang terletak pada 1100”01’51-1100”26’58” Bujur Timur

dan 70”19’13” – 70”42’16” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang yaitu: sebelah utara dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Dilihat dari kependudukan dan pendidikan**,** jumlah penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah penduduk 1.204.974 jiwa, dan tahun 2009 tambah menjadi 1.217.672 jiwa yang terdiri laki-laki 608.710 jiwa (49,98 persen) dan perempuan 608.962 jiwa (50,02 persen). Jika dilihat dari pendidikan tidak merata, khususnya pendidikan menengah banyaknya sekolah; 57 SMP Negeri, 11 SMA Negeri, dan tiga SMK. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Magelang yang mengakomodasi aktivitas masyarakat berupa sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang sampai dengan bulan Juni 2010 terdiri dari 223 buah Posyandu, 71 buah Poliklinik desa, 29 buah puskesmas induk, 62 Puskesmas pembantu dan 34 Armada Puskesmas Keliling, serta tiga Puskesmas Perawatan. Saat ini belum ada pembangkit tenaga listrik yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, Jangkauan pelayanan energi listrik di Kabupaten Magelang pada tahun 2007 menjangkau 372 listrik pedesaan sehingga semua desa sudah dijangkau listrik. Daerah perkotaan listrik sudah menjangkau lima daerah dan semua sudah terjangkau pelayanan listrik. Namun masih ada 40 dusun yang tersebar di Kabupaten Magelang yang belum terjangkau pelayanan listrik.

Potensi wisata yang terdapat di kabupaten Magelang Candi Borobudur merupakan obyek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah yang kini mendapat perlindungan dari UNESCO sebagai warisan dunia (*World Heritage*). Selain Borobudur, terdapat sejumlah candi di antaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Canggal atau Candi Gunungwukir, Candi Selogriyo, Candi Gunungsari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan Candi Asu. Ada satu Museum Seni Rupa Haji Widayat yang terletak antara Candi Mendut dan Borobudur. Obyek wisata alam, Kabupaten Magelang memiliki beberapa obyek wisata, antara lain kawasan wisata Kopeng, Kolam Renang Kalibening-Payaman, Gardu Pandang Ketep Pass, air panas Kedung Kayang, Gardu Pandang Babadan, Curug Silawe, Losari Coffee Plantation, pemandian air panas Candi Umbul dan air terjun Sekar Langit. Kali Progo dan Kali Elo juga sering digunakan untuk wisata arung jeram. Beberapa obyek wisata religi yang ada di Kabupaten Magelang antara lain; Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Makam Kyai Condrogeni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri. Sementara itu, untuk seni budaya dan kriya terdapat beberapa Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) antara lain kesenian tradisional, kerajinan cinderamata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas.

Di lingkungan Candi Borobudur, terdapat Candi Budha terbesar di dunia yang merupakan satu karya “Master Piece” peninggalan purbakala yang merupakan satu diantara tujuh keajaiban dunia. Candi Borobudur berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Letaknya sekitar tiga kilo meter dari Kota Mungkid. Kawasan candi dibangun oleh raja Samaratungga dari Dinasti Syailendra pada abad ketujuh. Saat ini kawasan candi tersebut dilengkapi dengan taman wisata, hotel, fasilitas audio visual, dan lain-lain yang dikelola oleh PT. Taman Wisata. Jumlah kunjungan pada tahun 2010 sebanyak 2.408.453 orang. Sedangkan jumlah kunjungan pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tercatat 1.241.800 orang.

2. Program Perbaikan Rumah

Sejak tahun 1970 di tiap desa ada Lembaga Sosial Desa (LSD) yang merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuk masyarakat untuk menangani permasalahan sosial. Lembaga Sosial Desa pernah melakukan perbaikan rumah warga

yang kurang mampu dengan sebutan gerakan sosial perumahan sehat gotong royong (PSGR). Masyarakat desa diajak untuk mengumpulkan bahan bangunan yang diperlukan dalam perbaikan rumah. Selain itu menyumbangkan tenaganya dengan menyediakan waktu untuk membangun rumah warga lain yang dijadikan sasaran kegiatan. Masyarakat tidak menerima bayaran karena dilakukan secara sukarela dan bergotong royong, bisa bersamaan atau bergantian di satu tempat (Bambang Nugroho; 2013: 32). Perkembangan selanjutnya dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diperingati tiap tanggal 20 Desember secara bersamaan antara masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Ada tiga pendekatan (Tribina) dalam HKSN, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Sejak tahun 1986 (Achmadi Jayaputra, 1999: 1–2) diutamakan bina lingkungan dengan menata lingkungan kumuh menjadi pemukiman teratur. Namun tahun 1998 beralih ke kegiatan bina usaha terhadap penghuni yang tinggal di daerah kumuh, terutama yang terkena Proyek Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Jadi masyarakat yang berada di lingkungan kegiatan tersebut sebagian mendapat kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan, serta sebagian lagi hanya memperoleh bantuan usaha. Kementerian Sosial RI, mulai tahun 2006 melakukan pemberdayaan terhadap kelompok miskin perkotaan dan perdesaan.

Terdapat empat sasaran pokok kegiatan, di antaranya penataan lingkungan kumuh. Penyediaan sarana lingkungan dan pemenuhan akan rumah tempat tinggal yang layak huni menjadi kebutuhan primer dari masyarakat miskin. Penataan lingkungan untuk mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sehat, nyaman, rapi, tertata baik dan harmonis. Tahun 2008 (Anonim; 2012a: 4), meneruskan kegiatan RSDK seperti tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Sosial telah melaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi 4.856 KK di 37 Kabupaten dan Kota pada 16 provinsi. Tahun 2009 kegiatan tersebut dilanjutkan di 22 Kabupaten dan Kota di 13 Provinsi sebanyak 2.346 Unit dengan tambahan sarana prasarana lingkungan sebanyak 40 unit pelaksanaannya bekerjasama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2010 kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Lingkungan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan langsung kepada kelompok penerima melalui rekening pada bank pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dengan bergotong-royong yang bertujuan untuk menghidupkan kesetiakawanan sosial atau modal sosial di masyarakat.

Jumlah rumah yang direhabilitasi sebanyak 6.142 unit dan sarling 122 unit. Tahun 2011 setelah adanya pembagian unit kerja yang menangani masalah kemiskinan secara kewilayahan yaitu untuk wilayah perkotaan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan untuk wilayah desa oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan dilaksanakan RSRTLH sebanyak 3.043 KK Sarling 25 unit. Kemudian tahun 2012 RSRTLH sebanyak 2.140 dan Sarling 50 unit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Jumlah tersebut sebanyak 2,3 juta penduduk bertempat tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh oleh program pemerintah. Untuk menangani masalah tersebut perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha atau industri, dan elemen masyarakat lainnya. Sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya perbaikan rumah tidak layak huni Yayasan Jamiyyah Ar Rahmah Kuwait menyalurkan dana sebesar Rp 650.000.000,- untuk perbaikan rumah 65 unit. Perbaikan rumah terkonsentrasi pada desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

3. Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara gotong royong oleh anggota masyarakat, baik masyarakat yang mendapatkan perbaikan rumah maupun yang tidak mendapatkan perbaikan rumah. Sebelum pelaksanaan perbaikan rumah dimulai, dibentuk kelompok-kelompok di masing-masing dusun. Jumlah kelompok yang mau mengerjakan perbaikan rumah tidak sama antara kelompok satu dengan yang lainnya, tergantung ketersediaan jumlah tenaga yang ada. Namun pada dasarnya banyak masyarakat sekitar yang terlibat di dalam gotong royong perbaikan rumah.

Dalam pembagian pekerjaan masing-masing anggota mempunyai tugas sendiri-sendiri, mulai dari tukang kayu, tukang batu, pembantu tukang dan tugas-tugas lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok selalu ada seorang yang ditunjuk untuk mengetuai dan mengawasi kegiatan. Biasanya orang yang ditunjuk sebagai ketua dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat yang menguasai di bidangnya, atau orang yang mampu mengkoordinir warga, sehingga apabila ada kesulitan merekalah yang akan mengatasi kesulitan tersebut, bahkan setiap bulan petugas dari dinas sosial propinsi datang ke lokasi untuk memantau kegiatan perbaikan rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat perkembangan kegiatan dan sebagai pertanggungjawaban lembaga dalam penanganan masalah kemiskinan khususnya perbaikan rumah.

Partisipasi yang diberikan masyarakat tidak hanya berupa uang, barang, tenaga, dan yang lebih terlihat nyata mereka yang melakukan pekerjaan juga membawa bahan makan ataupun makanan dari rumah sehingga waktu istirahat, mereka makan bersama-sama. Tenaga yang mengerjakan perbaikan rumah tidak mendapatkan upah sama sekali, bahkan yang lebih menyenangkan hati mereka yang tidak mendapatkan bantuan bedah rumahpun mendengar tetangganya yang tidak mampu mendapatkan bantuan mereka merasa senang dan turut berpartisipasi dalam perbaikan rumah. Hasil pengamatan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa apabila dilihat kondisi rumah dan sosial ekonomi masyarakat secara umum dapat dikategorikan cukup, karena kondisi rumah masyarakat umumnya permanen, hanya keluarga-keluarga yang mendapatkan perbaikan rumah kondisinya memang sangat memprihatinkan. Hal ini menjadi salah satu pendorong partisipasi masyarakat yang cukup kuat untuk membantu mereka yang tidak mampu, perbaikan rumah dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, atas partisipasi dari semua pihak, sehingga target 65 rumah dapat terselesaikan.

Hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari peserta FGD, dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak hanya sekedar renovasi tetapi membangun rumah baru. Pada umumnya rumah aslinya dirobohkan karena memang sudah reyot, kemudian dibuat rumah baru yang permanen, sehingga setelah dilaksanakan perbaikan rumah tidak terlihat lagi kondisi rumah yang tidak layak huni.

Biaya untuk membangun rumah tidak hanya diperoleh dari donator Kuwait, tetapi dana dampingan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya juga berperan di dalam membangun rumah. Informasi yang diperoleh dari peserta FGD untuk satu rumah menghabiskan dana sekitar Rp 25.000.000,- bahkan lebih , padahal dana yang tersedia untuk renovasi rumah hanya Rp 10.000.000,-, kekurangan dipikul masyarakat sekitarnya secara gotong royong. Dengan dana yang tersedia menghasilkan bangunan yang permanen, yaitu tembok dari bata merah dan batako, lantai keramik dan atap dari genteng. Semua bahan bangunan disiapkan panitia sebelum dana bantuan cair, pemilik rumah tinggal minta bahan-bahan tersebut sesuai dengan besar kecilnya bangunan dan keinginan pemilik rumah sesuai kebutuhan.

Di lokasi juga dibuat MCK umum yang dananya diperoleh dari anggaran APBN, tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan MCK tersebut secara bersama-sama, bahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki MCK dapat menggunakan untuk keperluan mandi,

cuci dan buang air besar, paling tidak dengan tersedianya MCK masyarakat tidak sembarang kalau buang hajat tidak di kali atau di tempat yang tidak semestinya. Seperti telah diuraikan, bahwa pengelolaan program perbaikan rumah dari, oleh dan untuk masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan dana Rp 10.000.000,- (bantuan dari Kuwait dan APBD) sebagai dana pancingan dapat mewujudkan rumah yang layak huni dengan pengeluaran yang lebih besar, menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap sesama warga dan lingkungan cukup dapat diandalkan. Rasa tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk partisipasinya kepada keluarga yang tidak mampu, dalam bentuk sumbangan uang, tenaga, pikiran sehingga dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berpartispasi aktif dalam program bedah kampung.

Keberhasilan RTLH juga tidak lepas dari peran aparat desa, tokoh masyarakat di tingkat desa yang memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong, camat berperan dalam memfasilitasi proposal program bedah kampung hingga selesainya program. Kontribusi pemerintah daerah juga sangat membantu dalam penambahan dana bedah kampung, sehingga rumah yang direncanakan hanya direnovasi menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok. Dengan demikian apabila dilihat secara umum tidak tampak kesenjangan sosial antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan sosial mereka lebih akrab, tidak merasa rendah hati atau minder, bahkan mereka tidak perlu lagi memikirkan kondisi rumah dan dapat terkonsentrasi peningkatan ekonomi keluarga.

Dengan selesainya perbaikan rumah membawa dampak positif bagi warga masyarakat sekitarnya. Kesenjangan masyarakat terutama kepemilikan tempat tinggal tidak nampak mencolok walaupun mungkin dari kondisi sosial ekonomi masih terdapat perbedaan, masyarakat merasa senang keluarga yang semula mempunyai rumah tidak layak huni menjadi layak huni, keakraban antarwarga juga terjalin dengan baik, kepedulian sosialnya meningkat bahkan bagi keluarga yang mendapatkan program perbaikan rumah tidak merasa percaya dirinya tinggi sehingga tidak ada rasa sungkan, minder, rendah diri untuk bergaul dengan tetangga lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dapat menyentuh akar masalah, seperti adanya perubahan sikap, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat ataupun peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung dalam melakukan perbaikan rumah yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong di antara sesama. Bentuk partisipasi tenaga terlihat pada waktu membangun rumah, masyarakat saling gotong royong dengan melakukan tugasnya masing-masing, ada yang membuat fondasi, memasang bata, menjadi tukang kayu. Partisipasi dalam bentuk materi dalam dilihat dari warga masyarakat yang menyumbang uang, membawa makanan masing-masing agar tidak merepotkan yang punya rumah, bahkan bantuan moril dalam bentuk perasaan senang warga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan renovasi rumah. Terbatasnya jumlah warga masyarakat yang bisa menjadi tukang sebagai faktor penghambat, sehingga terpaksa menunggu giliran, walaupun demikian tetap ada yang dapat dikerjakan. Masalah lain sebagai kendala dalam kegiatan adalah faktor cuaca yang kurang bersahabat, karena saat pelaksanaan kegiatan hampir setiap hari diguyur hujan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan bedah kampung agak tersendat, walaupun kegiatan tetap berjalan sesuai target.

4. Pembahasan terhadap RTLH

Pada dasarnya program perbaikan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan selama ini cukup mendasar dengan melibatkan elemen

masyarakat, mulai dari perencanaan, kegiatan, pengawasan hingga pada laporan. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai dengan program tersebut masyarakat atau keluarga menjadi ketergantungan terhadap program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Selama ini elemen masyarakat telah banyak melibatkan dalam kegiatan perbaikan rumah dengan sistem gotong royong, tetapi yang tidak kalah penting dalam perbaikan rumah adalah merubah pola pikir masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan sosial, karena dengan kepedulian dan tanggap terhadap lingkungan membawa masyarakat selalu ingin untuk saling membantu sesama di lingkungan mereka tinggal, sehingga kearifan lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat tetap terpelihara dan terjaga dengan baik, sebagai gambaran nyata pada masyarakat, di Jawa dengan istilah *sambatan*. Apabila seseorang atau keluarga mau membuat rumah, tetangga dengan tulus ikhlas membantu tanpa pamrih mengerjakan yang bisa dikerjakan dalam rangka tolong menolong membuat rumah.

Di desa Sidorejo, Kabupaten Magelang tampak kearifan lokal masih terpelihara dengan baik. Program perbaikan rumah yang dilakukan oleh dermawan Kuwait (Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait) merupakan upaya untuk menangani masalah kemiskinan yang terfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana prasarana lingkungan sehat. Program ini telah mendapatkan respons positif, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang, masyarakat sekitarnya, masyarakat peduli maupun elemen ataupun lembaga masyarakat lainnya bahkan dermawan Kuwait (Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait).

Kepedulian ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi, baik uang, barang, tenaga, dan pemikiran. Partisipasi ini diwujudkan dari masyarakat peduli melalui dermawan Kuwait dalam bentuk dana sebesar Rp 650.000.000,- untuk 65 kk, dari pemerintah daerah kabupaten juga diwujudkan dalam bentuk dana dampingan sebesar Rp 5.000.000,-, bahkan dari masyarakat sendiri bentuk partisipasinya menyangkut tenaga, pikiran, material, uang, bahkan adanya kepedulian masyarakat ikut merasakan senang apabila warga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan program bedah kampung yang diberikan oleh pemerintah. Respons positif inilah yang sangat membanggakan dalam rangka menyambut program perbaikan rumah yang dilaksanakan oleh dermawan Kuwait dan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di masyarakat. Masyarakat menginginkan quota untuk penanganan masalah kemiskinan bisa ditambah dan program dilanjutkan hingga persoalan kemiskinan dapat teratasi. Permasalahan kemiskinan termasuk perbaikan rumah tidak layak huni tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri tanpa ada bantuan dan kepedulian pihak lain. Dukungan dari berbagai pihak ini yang sangat diharapkan dalam membantu menangani masalah RTLH yang kalau diperhatikan makin lama makin bertambah jumlahnya.

Apabila persoalan ini tidak ditangani dengan baik maka jumlahnya untuk tahun-tahun mendatang akan membengkak lagi seiring dengan perkembangan penduduk dan permasalahan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, kepedulian dari masyarakat ataupun lembaga lain di dalam membantu menangani masalah kemiskinan perlu disambut baik dan dijadikan mitra kerja dalam menangani masalah kemiskinan. Namun demikian perlu adanya kebijakan yang melandasi program perbaikan rumah yang dilakukan masyarakat dan organisasi ataupun lembaga lain, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan landasan peraturan, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Berbagai lembaga telah melakukan upaya penanggulangan masalah dimaksud, tetapi hasilnya belum mampu mengatasi masalah yang ada. Penanganan yang telah dilaksanakan masih terkesan fragmentaris dan belum sinergis di antara kementerian yang melakukan penanganan, meskipun telah ada program nasional yang dikoordinir oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara umum terlihat bahwa masing-masing kementerian dan lembaga bergelut dengan bidangnya saja dan kurang memperhatikan cakupan wilayah kerja instansi lain.

Penanganan yang dilaksanakan mulai dari peluncuran program pemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro-Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE) sejahtera dan (Baitul Mal at Tanwil Kelompok Usaha Bersama (BMT KUBE) tahun 2003-2005, dan sejak tahun 2006 dilaksanakan pola Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS); dan untuk tahun 2012 ini dengan program Bedah Kampung; hingga saat ini masih belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan secara optimal. Terkait dengan program perbaikan rumah yang dilaksanakan di desa Sidorejo, apa dicermati tampak pemerintah daerah dan masyarakat peduli sudah berbuat banyak untuk terselenggaranya program, tetapi dukungan yang dilandasi dengan peraturan masih belum tampak. Kebijakan yang melandasi program tersebut hanya didasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaannya terkesan berjalan sendiri. Pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan yang mendukung program perbaikan rumah yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung program perbaikan rumah yang diselenggarakan oleh lembaga dan organisasi atau masyarakat peduli.

D. Penutup

Yayasan Jam'iyyah Ar Rahmah Kuwait telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Bantuan sebanyak 65 rumah dikonsentrasikan pada desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Biaya renovasi rumah sebesar Rp 10.000.000,- per unit, namun dalam kenyataan biaya untuk membangun (bukan renovasi) per unit rumah mencapai 20 juta sampai dengan 25 juta. Tambahan biaya ini diperoleh dari partisipasi masyarakat setempat, dana pendampingan sebesar 5 juta per rumah, diambilkan dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2012. Kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak seperti aparat desa, tokoh masyarakat yang memfasilitasi dalam pembentukan panitia dan mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong, camat berperan dalam memfasilitasi proposal program bedah kampung hingga selesainya program ini. Kontribusi pemerintah daerah juga sangat membantu dalam penambahan dana perbaikan rumah, sehingga rumah yang direncanakan renovasi menjadi rumah baru permanen dengan lantai keramik dan dinding tembok. Kepedulian semacam ini perlu ditingkatkan terus agar masalah kemiskinan segera dapat tertangani, dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah pusat-daerah, dunia usaha atau industri, masyarakat, termasuk masyarakat peduli kemiskinan. Dengan memupuk kepedulian diharapkan partisipasi dari berbagai pihak dapat meningkat sehingga tercipta suasana harmonis, saling membantu, dan saling bergotong royong, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang kembali.

Pustaka Acuan

Andi Prastowo, (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogakarta: Diva Press.

Anonim, (2011). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi RSRTLH dan Sarling 2010.* Jakarta; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

……..,(2012b). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: Puslitbangkesos.

Burhan Bungin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edi Suharto, (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.* Bandung: Alfabeta.

Gunawan Sumodiningrat, (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Harry Hikmat, dkk, (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta: UI & Kementerian Sosial.

Hill, Michael (1996), *Social Policy : Comparative Analysis*, London: Prentice-Hall Wheat Sheaft.

Isbandi Rukminto Adi, (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas* (*Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*). Jakarta: LP FEUI

Jayaputra, Achmadi (1999). *Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha di Daerah Kumuh, Kotamadya Sawahlunto*. Jakarta; Puslitbangkesos.

Koentjaraningrat, (1999). *Pengantar Antropologi* (Jilid 1). Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, Bambang, (2013). "Mengaktualisasi Kembali KUBE" dalam *Informasi*, Vol 18, No 1.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010-2014*, khususnya tentang penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*

Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (2012)

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (2012)

Rencana Strategis Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun (2010-2014)

Samsul Hadi, dkk, (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Jogjakarta: Lakbang Grafika.

Santoso Sastropoetro, (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung; Alumni.

Segal, Elizbeth E, and Brzuzy Stephanie (1998), S*ocial Welfare Policy, Programs, and Practice*, Itaca, Illinois: F.E Peacock Publishers, Inc.

Shortel and Richardson (1978), The Evaluation Process, in 'Health Program Evaluation' , St Louis: CV Mosby Company

Soerjono Soekanto, (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumaryadi, I Nyoman, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

6

Trauma Healing Anak-anak Korban Erupsi Gunung Sinabung

Children Victims Trauma Healing of Sinabung Mountain Eruption

Ameilia Zuliyanti Siregar[1] dan Husmiati[2]
(1) Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
Email: zuliyanti@yahoo.com.
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
E-mail: <umi_yusuf2005@yahoo.co.id>.
Diterima 17 Maret, diperbaiki 24 Maret, disetujui 30 Maret 2016.

Abstract

This essay writen based on research on trauma healing among children victims of Sinabung eruption in North Sumatra. Research method was survey and sixty children victims of Sinabung eruption were chosen as respondents. Trauma healing handling done by a coordinated and integrated between the involvement of the whole society, NGOs, businesses and government agencies. The research found that 60 respondents 47.69 persen were boys and 52.31 persen were girls. Level of education, from primary school 76.93 persen, junior high school 15.38 persen and senior high school was 7.68 persen. The distributed questioaires answered by respondents showed there were three sacales, namely children stress symtom, children traumatic symtom, and violent symptom at refugees camps which were still be tolerated in numbers. Availability of psychological treatments were trauma healing, like singing, dancing, and drawing. It is suggested to the goverment, especially Ministry of Education, Ministry of Social Affairs, and related agencies in providing assistance to the victims should conduct an analysis on the rght benefit and target.

Keywords: eruption; children victims; trauma healing

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang pemulihan trauma di kalangan anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, 60 anak dipilih menjadi responden. Hasil penelitian menemukan, 60 responden anak-anak terdiri atas, 47.69 persen anak laki-laki dan 52.31 persen anak perempuan, dengan tingkat pendidikan SD 76.93 persen, SMP 15.38 persen, dan SMA 7.68 persen. Hasil jawaban responden menunjukkan, terdapat skala stress anak, skala gejala trauma anak, dan skala kekerasan di pengungsian dalam jumlah yang masih ditoleransi. Pemenuhan kebutuhan psikis untuk menghilangkan trauma (*trauma healing*), dengan cara menyanyi, menari, melukis, materi edukasi, pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatan mental keagamaan, informasi dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan sosial psikologis di pengungsian masih terbatas. Disarankan kepada pemerintah, khususnya kementerian pendidikan dan kementerian sosial, dan lembaga terkait, agar dalam memberi bantuan kepada korban bencana erupsi Gunung Sinabung terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan yang tepat guna dan sasaran.

Kata Kunci: erupsi; anak-anak korban; trauma pemulihan

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan perairan dan banyak pulau, terletak pada jalur gempa bumi dan gunung berapi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam. Di Indonesia terdapat 129 gunung berapi aktif, 70 di antaranya digolongkan sangat berbahaya yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Keberadaan gunung berapi membawa dampak positif, menyebabkan kesuburan bagi tanah, cocok untuk bidang pertanian yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber mata pencaharian dan tempat permukiman. Namun di balik itu terdapat bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerusakan alam dan kehancuran lingkungan apabila terjadi bencana erosi dan gunung meletus. Bencana alam

merupakan kejadian yang sulit dihindari dan tidak dapat diperkirakan secara tepat waktu dan tempat. Dampak bencana berupa korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur, lingkungan sosial, dan gangguan terhadap tata kehidupan serta penghidupan masyarakat di sekitar lokasi bencana.

Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung tertinggi (2.460 meter) yang aktif di Sumatera Utara, selain Gunung Sibayak, yang terletak di dataran tinggi Tanah Karo. Masyarakat di daerah pegunungan ini didominasi oleh suku Batak Karo dan sebagian orang campuran (Suku Aceh, Jawa, Melayu). Sinabung meletus perdana tanggal 29 Agustus 2010, dilanjutkan letusan kedua tanggal 3 September 2010, dengan dua kali letusan. Tanggal 7 September 2010, Gunung Sinabung menyemburkan debu vulkanis hingga 5000 meter di udara, mencapai jarak delapan kilometer. Tanggal 18 September 2013, lebih dari empat kali letusan yang melepaskan awan panas dan debu vulkanik sehingga mencapai kawasan Sibolangit dan Berastagi, hingga sampai ke Medan. Akibat peristiwa ini, status Gunung Sinabung dinaikan ke level 3 menjadi status siaga. Sejak 24 November 2013, status Gunung Sinabung dinaikkan ke level tertinggi (4, Awas) dan penduduk dari 21 desa dan dua dusun diungsikan ke kota Berastagi. Akibat kondisi tersebut pemerintah daerah Tanah Karo memperkecil zona bahaya hingga berjarak 1.0 km dari puncak Gunung Sinabung, yang sebelumnya ditetapkan dengan radius 5.0 km. Status awas terus bertahan hingga memasuki tahun 2014 dengan rentetan gempa, letusan, dan luncuran awan panas terus-menerus hingga lebih dari 20.000 orang mengungsi ke kota Medan dan Kabupaten Langkat (Alexander, 2010; Ebo, 2010; BNPB, 2012; Ameilia, 2014). Aktivitas Gunung Sinabung masih cukup tinggi, kegempaan masih didominasi gempa *hybrid* yang mengindikasikan pembentukan kubah lava masih terjadi. Potensi erupsi disertai awan panas masih berlangsung dengan jumlah intensitas tertentu. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan, warga di 15 desa dan dua dusun untuk tetap mengungsi. Desa-desa yang warganya harus tetap mengungsi adalah Desa Mardinding, Perbaji, Selandi, Sukameriah, Guru Kinayan, Gamber, Berastepu, Bekerah, Simacem, Sukanalu, Kuta Tonggal, Sigarang-garang, Kuta Rakyat, Kuta Gugung, Kuta Tengah, Dusun Sibintun dan Dusun Lau Kawar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan aktivitas erupsi Gunung Sinabung telah berkurang, walaupun jumlah pengungsi mencapai 30.177 jiwa atau 9.388 kepala keluarga (Ameilia, 2014).

Korban erupsi Gunung Sinabung rentan mengalami trauma karena kehilangan orang yang dicintai, harta benda, rumah dan sawah yang menjadi mata pencaharian mereka hancur. Kondisi di pengungsian yang tak layak, jumlah pengungsi yang kian bertambah, lamanya hidup di pengusian tanpa batas waktu sangat berdampak pada kondisi psikologis pengungsi. Mereka termasuk kelompok orang yang rentan mengalami gangguan psikologis, begitu pula pada anak-anak yang hidup dipengungsian. Berbagai studi tentang kebencanaan alam dilakukan, di antaranya oleh Fahrudin (2006), yang mendapati anak-anak korban Tsunami di Aceh mengalami trauma, begitu pula anak-anak yang menjadi korban bencana tanah longsor di Garut, mengalami kondisi yang sama (Fahrudin, 2010). Bencana menimbulkan berbagai dampak, khususnya psikososial korban langsung (*primary victims*) dan korban tidak langsung (*secondary victims*).

Gibson (1991) menyatakan, bahwa dampak bencana tidak hanya penduduk yang terlibat tetapi lingkungan terdekat, tetangga, pekerja sosial atau sukarelawan yang terlibat di dalam pelayanan sosial bencana. Bencana alam biasa berdampak pada kerusakan infrastruktur dan peluang-peluang pekerjaan, kerusakan bahkan kehilangan infrastruktur seperti tanggul jebol, sistem irigasi berantakan, transportasi kacau, juga ketidakmampuan pemerintah memberi bantuan dengan cepat, juga terjadinya trauma yang susah untuk diatasi dalam waktu yang singkat.

Studi ataupun kajian mengenai bencana menyimpulkan bahwa korban mempunyai persamaan dari segi reaksi yang dialami. Secara umum Rice (1999) menjelaskan, tiga periode yang berbeda: periode impak (*impact period*), hanya berlangsung sepanjang kejadian bencana; periode "pendinginan" suasana (*recoil period*), yang berlangsung dalam beberapa hari setelah kejadian; periode post-traumatik (*post-trauma period*), yang dapat berlangsung lama dan bahkan sepanjang hayat. Periode post-traumatik juga berlangsung ketika korban bencana berjuang untuk melupakan pengalaman yang terjadi, berupa tekanan, gangguan fisiologi dan psikologis akibat bencana yang mereka alami. Simptom-simptom gangguan stres pos-traumatik (*symptoms of post-traumatic stress disorder*) bisa berlangsung dalam jangka waktu lama (Caplan, 1968). Studi yang dilakukan LaGreca et al. (2000) menunjukkan, frekuensi *symptoms of post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada anak-anak korban badai Huricane Andrew di Florida, Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian awal tentang *trauma healing* pada anak-anak korban erupsi gunung Sinabung perlu dilakukan untuk mendeteksi permasalahan psikis yang dialami anak-anak dipengungsian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pemulihan trauma bagi anak-anak yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung, secara khusus menggambarkan stress, gejala trauma dan potensi kekerasan di kalangan anak-anak korban bencana erupsi, khusunya di Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Chatarina dan Enny, 2012), dilaksanakan di tiga posko pengungsian, terdiri dari Posko KNPI di Kabanjahe (terdiri dari masyarakat Sigarang-garang), Posko GBKP Asrama Kodim (masyarakat Kuta Tengah dan masyarakat Sigarang Garang), dan Posko LOSD Katepul (Masyarakat Sukanalu dan masarakat Kuta tengah). Sumber data penelitian 60 orang responden anak-anak, dari populasi 300 orang anak yang terdata sebagai pengungsi di sekitar lokasi Gunung Sinabung.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, pembagian kuesioner, wawancara dari berbagai sumber *studi literature* seperti penelitian yang dilakukan Putri Cep Alam, dkk (2015). Reduksi data yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti. Display data, menunjukkan data yang diteliti, menelusuri makna atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian, apabila kesimpulan masih meragukan data dapat ditambah (Moleong, 2002). Pemberian kuisoner kepada 60 responden anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang diberika, dengan cara melingkari skala rentang nilai untuk kuesioner Stress (1-4), gejala trauma (1-3), dan kekerasan di pengungsian (1-3).

Setelah kuesioner dikumpulkan, *trauma healing* dilaksanakan dengan cara mengumpulkan anak-anak di tenda dan disuguhi cerita sosial, diajak permainan edukasi, seperti kampanye hidup sehat, perilaku gotong royong dan bekerja sama, bercerita, menyanyi (Schneid, 2000; Eddy Ch Papilaya, 2003). Anak-anak selanjutnya diberi susu, roti, dan alat tulis serta ditanya tentang perasaan dan pendapatnya selama berada di pengungsian, suatu metode yang digunakan sebagai bentuk penyembuhan trauma bagi anak-anak untuk mengeksplorasi nilai psikologi dari dampak erupasi Gunung Sinabung.

C. Trauma Healing Anak-anak Korban Erupsi Gunung Sinabung

Hasil observasi dan pendampingan yang dilakukan relawan dari Education Foundation (Edu-F) dan Palang Merah Indonesia (PMI) dapat disimpulkan, bahwa keterbatasan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK), air bersih yang kurang memadai, tempat tinggal yang kurang nyaman, ketersediaan makanan dan minuman yang terbatas di pengungsian menyebabkan sebagian besar pengungsi mengalami tekanan psikologis akibat bencana Gunung Sinabung. Dari sampel 60 responden anak-anak dari 2 kelompok kelamin, yaitu laki-laki 47.69 persen dan perempuan 52.31 persen, dengan tiga tingkatan sekolah yaitu Sekolah Dasar (SD 76.93 persen;

anak lelaki 28 56 persen, dan anak perempuan 22 (44 persen); SMP (15.38 persen; anak lelaki 2 orang (20 persen), dan anak perempuan 8 (80 persen) dan SMA (7.68 persen).

Tingkat Stres Anak

Hasil penelitian sebagaimana pada tabel 1 menunjukkan persentase anak lelaki 1 (20 persen) dan anak perempuan 4 orang (80 persen) yang mengalami stres yang tinggi di sekitar lokasi Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Tabel 1
Skala Stress Anak

No	Pernyataan	Rentang skala nilai jawaban											
		1			2			3			4		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1	Mudah merengek	3	1	0	25	3	4	8	2	0	7	3	0
2	Menginginkan sesuatu segera	3	0	0	8	4	0	9	5	2	23	0	2
3	Tidak mau tidur sendiri	12	5	0	6	2	4	15	1	0	10	1	0
4	Kesulitan untuk tidur	12	1	0	7	4	2	20	4	2	4	0	0
5	Mimpi buruk	6	0	0	9	4	1	24	5	3	4	0	0
6	Ketakutan tanpa alasan yang tepat	8	3	0	10	2	2	20	4	2	5	0	0
7	Tampak cemas	8	2	0	6	5	3	24	1	1	4	1	0
8	Menangis tanpa alasan yang tepat	12	3	0	15	2	3	19	4	0	2	0	0
9	Tampak sedih dan menarik diri	6	1	0	16	3	2	17	4	2	3	1	0
10	Harus selalu ditemani	7	0	0	19	6	4	11	2	0	6	1	0
11	Tampak sanagat aktif	5	0	0	21	3	4	9	5	0	7	1	0
12	Mudah marah	7	0	0	27	3	4	5	1	0	4	5	0
13	Mudah frustasi	9	2	0	21	3	4	7	4	0	6	0	0
14	Mengeluh sakit	8	1	0	23	3	4	6	5	0	7	0	
15	Mengompol, mengigit kuku	18	8		21	1	4	3	0	0	2	0	0
16	Mudah terganggu sesuatu	7	2	0	22	2	4	11	2	0	3	3	0
17	Bertindak agresif	11	2	0	20	6	4	6	0	0	8	1	0
18	Menggambar kejadian traumatik	7	3	0	21	2	4	11	2		4	1	0
19	Membicarakan peristiwa traumatik	7	3	0	22	4	4	11	2	0	7	0	0
20	Menghindari pembicaraan	8	3	0	22	4	4	8	1	0	6	1	0
21	Takut sesuatu traumatik dialaminya	8	3	0	15	3	3	12	3	1	8	0	0
22	Mimpi buruk akibat traumatik	7	6	0	22	1	4	8	2	0	4	0	0
	Total	179	49	0	378	70	72	264	59	13	119	19	2

Sumber: Jawaban Responden (N=60)

Kabupaten Karo merupakan kawasan Lereng Gunung Sinabung. Wilayah ini kaya sumberdaya air, hortikultura dan potensi ekowisata yang beorientasi pada aktivitas ekosistem Gunung Sinabung. Data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menyebutkan, jumlah korban bencana erupsi Gunung Sinabung tidak dalam bentuk korban jiwa tetapi korban hasil pertanian dan hortikultura, ditambah pula munculnya penyakit flu, batuk, pilek, gangguan pernafasan (ISPA), penyakit kulit, diare serta gangguan psikis dan mental, dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, kurang bersih dan serba terbatas. Kurang tersedianya air bersih dan sarana MCK, untuk mencukupi, pemerintah melalui dinas pekerjaan umum menyediakan toilet umum yang bisa dipindahkan dan mendrop air bersih ke lokasi pengungsian.

Korban bencana alam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kompleks, problem paling mendasar adalah persoalan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, didukung penelitian yang dilakukan Ameilia (2014) dan data yang dikumpulkan dari sumber media massa (Ebo, 2010). Hal ini berawal dari terbatasnya fasilitas umum, sosial dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan dapat menjadi sumber penyakit di lokasi pengungsian, di antaranya berupa gangguan pernafasaan, diare, ispa (Anih, 2014).

Hasil penelitian juga menunjukkan gejala trauma pada anak-anak berdasarkan 20 bentuk pertanyaan dikategorikan, tingkat skala gejala trauma anak taraf tinggi, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Skala Gejala Trauma Anak

No	Pernyataan	Rentang skala nilai jawaban								
		1			2			3		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Sembunyi mendengar sirine ambulan	32	10	4	8	0	0	1	0	0
2	Tidak mau bermain dengan teman	30	6	2	9	3	2	2	0	0
3	Menggambar sesuatu berlebihan	23	4	4	18	5	1	1	0	0
4	Agresif	17	6	1	21	3	2	3	0	0
5	Mimpi buruk	11	3	0	24	6	2	4	0	2
6	Ketakutan tanpa alasan yang tepat	18	6	0	22	3	4	2	0	0
7	Tampak cemas	15	4	1	19	6	2	5	0	1
8	Meniru atribut Militer/TNA	24	7	4	11	1	0	5	0	0
9	Tampak sedih dan menarik diri	21	4	3	19	4	1	1	0	0
10	Harus selalu ditemani	26	5	4	16	4	0	1	0	0
11	Tampak sanagat aktif	27	2	3	10	6	0	3	1	1
12	Mudah marah	31	3	2	7	3	1	8	3	1
13	Mudah frustasi	27	4	2	5	4	2	9	1	0
14	Mengeluh sakit	26	3	3	10	3	0	5	3	1
15	Curiga berlebihan pada orang asing	32	5	3	3	3	0	7	1	1
16	Mudah melawan aturan	28	10	3	8	0	1	2	0	0
17	Pandangannya kosong	29	6	3	9	3	1	3	0	1
18	Membuat gambar kejadian traumatik	34	5	4	6	4	0	4	0	0
19	Takut pada tentera/polisi	29	6	4	4	1	0	7	1	0
20	Takut bunyi yang keras/mendentum	35	6	2	1	0	1	3	3	1
	Total	515	105	52	230	62	20	76	13	9

Sebagian besar pengungsi bermatapencaharian sebagai petani yang setiap hari terbiasa bekerja keras, sementara yang terjadi di tempat pengungsian mereka hanya diam saja tanpa kegiatan, membuat mereka bosan. Kehilangan harta benda menyebabkan korban menjadi jatuh miskin, apalagi sumber mata pencaharian, berupa lahan pertanian dan perkebunan juga mengalami kerusakan. Bantuan dari berbagai sumber yang berbentuk materi belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kehilangan anggota keluarga, khususnya sumber pencari nafkah, seringkali menyebabkan timbulnya perasaan khawatir, cemas, ketakutan, kesedihan berkepanjangan, bahkan trauma hebat dalam diri seseorang. Kurang terpenuhinya kebutuhan hidup, tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran keluarga serta kemungkinan hilangnya pengendalian diri, kekecewaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat berpotensi menjadi aksi sosial di masyarakat. Hal yang menimbulkan kondisi ketidaknyaman adalah mereka mudah tersulut sesama pengungsi akibat jenuh tinggal di pengungsian (Chatarina dan Enny, 2012). Menurut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (2013), sebagian kondisi pengungsi dewasa labil dan tertekan, sedangkan pengungsi anak-anak mengalami trauma mendengar suara keras dan mendentum di tempat pengungsian.

Begitu pula hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan potensi skala kekerasan yang dialami anak-anak pada tingkat sedang di pengungsian di sekitar kawasan posko pengungsian Gunung Sinabung.

Tabel 3
Skala Kekerasan di Pengungsian

No	Pernyataan	Rentang skala jawaban								
		1			2			3		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Memanggil teman dengan ejekan	17	2	1	19	5	2	6	2	0
2	Memukul teman dengan tangan	17	3	0	23	3	3	2	3	0
3	Memukul teman dengan kayu	38	7	2	3	2	1	0	0	0
4	Menendang teman	30	8	2	12	1	1	0	0	0
5	Merusak mainan teman	27	8	3	14	1	0	0	0	0
6	Menyerang teman dengan pisau	40	9	3	0	0	0	1	0	0
7	Memukul teman hingga berdarah	40	9	3	0	0	0	1	0	0
8	Memaki teman sebagai binatang	36	9	2	18	0	1	0	0	0
9	Memaki teman dengan kata kotor	32	4	2	18	5	1	2	0	0
10	Memanggil teman dengan nama ayah	38	5	2	4	4	1	1	0	0
11	Dipukul oleh orang tua	20	2	2	19	7	1	3	0	0
12	Dipukul oleh guru	21	6	2	16	1	1	1	0	0
13	Dipukul dikepala oleh guru/orang tua	38	9	3	4	0	0	0	0	0
14	Dimaki oleh guru	31	8	2	13	1	1	0	0	0
15	Dimaki oleh orang tua	18	5	1	23	2	1	1	1	1
16	Dipukul oleh teman	10	4	2	30	2	0	0	3	1
17	Mendengar bapak memaki mamak	18	3	0	21	5	2	3	0	0
18	Melihat bapak memukul mamak	15	6	0	23	3	2	4	1	1
19	Melihat teman berkelahi	12	3	0	26	3	2	3	3	1
20	Mendengar teman berkata kotor	12	0	0	24	5	2	7	4	1
	Total	510	110	32	310	50	22	35	17	5

Trauma Healing bagi Anak-anak Korban Sinabung

Sebanyak 2900 orang anak-anak pengungsi korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tetap belajar di sekolah-sekolah terdekat dengan lokasi pengungsian yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dengan mengandalkan guru-guru dari sekolah bersangkutan. Jumlah anak-anak pengungsi 2.856 orang, terdiri dari 1.579 pelajar tingkat SD, 835 pelajar SMP dan 442 pelajar SMA, yang memiliki motivasi belajar tinggi walaupun dalam situasi berkabung duka di lokasi pengungsian.

Penanganan yang dibutuhkan untuk mengurangi gangguan psikologis tersebut adalah menghilangkan trauma bagi korban dengan menghibur mereka, mengajari mengontrol emosi, memberi pelatihan dan pembinaan, agar mereka tidak jenuh. Kegiatan *trauma healing* di pengungsian yang dilakukan oleh relawan Edu-F dan PMI yang diikuti oleh 60 orang anak-anak dari tiga lokasi (Desa Sigarang-garang, Sukanalu dan Kuta Tengah) yang terkena erupsi gunung Sinabung, dilakukan dengan membuat hiburan dan permainan yang bersifat edukasi.

Relawan mengadakan aktivitas bermain seperti menggambar, mewarnai, dan permainan kelompok serta menyanyi, tujuannya untuk menghilangkan kebosanan pada anak-anak selama di pengungsian. Selain itu juga mendengarkan cerita dari anak-anak sebagai upaya untuk meluapkan ekspresinya. Kegiatan lainnya, dengan kampanye hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan, mencuci tangan dengan sabun, buang air di kamar mandi, penggunaan masker saat erupsi Sinabung, menyanyi, bercerita dengan tema kearifan lokal dan permainan olah raga, seperti lompat dan lari.

Data jawaban kuesioner dari 60 responden anak-anak korban Gunung Sinabung menyatakan perasaan sedih, kecewa dan marah akibat meletusnya Gunung Sinabung. Kemudahan yang diperoleh dalam bidang pendidikan di lokasi pengungsian adalah belajar berkelompok, olahraga bebas di lapangan, seperti bermain sepak bola

dan badminton, kegiatan keagamaan dan sekolah minggu, sedangkan keseluruhan responden (100 persen) merindukan kampung halaman, keinginan segera pulang ke rumah, kembali kumpul dengan teman-teman dan bersekolah.

D. Penutup

Penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat di lokasi bencana, khususnya akibat erupsi Gunung Sinabung tidak bisa dilaksanakan secara eksklusif, perlu keterlibatan banyak pihak, di antaranya kementerian pendidikan, sosial, LSM, masyarakat dan mereka yang terkait, mempunyai komitmen, tanggung jawab, dan diharapkan bisa berkoordinasi secara sinergis. Pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak pada masa tanggap darurat dan pascadarurat (*rehabilitasi dan resosialisasi)* menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan harus dijamin oleh negara. Semoga upaya sistematis, terstruktur dan kinerja yang sinergis dalam program perlindungan anak korban Gunung Sinabung di Tanah Karo yang dilaksanakan menjadi miniatur produk (model) penanganan anak trauma yang berkesinambungan.*Trauma healing* disarankan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar anak-anak tetap punya semangat belajar dan termotivasi dalam menjalani kehidupan sementara di pengungsian.

Pustaka Acuan

Achenbach, T. M. (1978). The child behavior profile: I. Boys aged 6-11. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46*.

Albano, A. M., Miller, P. P., Zarate, R., Cote, G., & Barlow, D. H. (1997). Behavior assessment and treatment of PTSD in a prepubertal child: Attention to developmental factors and innovative strategies in the case study of a family. *Cognitive and Behavioral Practice, 4.*

Alessi, J. J., & Hearn, K. (1984). Group treatment of children in shelters for battered women. In A. R. Roberts (Eds.), *Battered women and their families: Intervention strategies and treatment programs*. New York: Springer.

American Psychiatric Association. (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (3rd ed). Washington, DC: Author.

Alexander. 2010. *Waspada Gunung Sinabung.* Diakses dari http://www.medanmagazine.com Diakses pada tanggal 24 Februari 2012.

Ameilia Zuliyanti Siregar. 2014. *Trauma Healing Anak-Anak Korban Sinabung*. Library USU. 5p.

BNPB. (2012). *Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.

Barrett, Deirdre. (1996). *Trauma and Dreams*. England: Harvard University Press.

Chatarina Rusmiyati dan Enny Hikmawati. (2012). *Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban bencana Merapi (Sosial Impact of Psychological Treatment Merapi Disaster Victims)*. *Informasi* 17 (2).

Ebo, A.G.A. (2010). *Gunung Sinabung Meletus.* Diakses dari http://www.regional.kompas.com. Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.

Fahrudin, A., Tukino, Herry Koswara & Dayne Trikora. (2010). *Kondisi Psikososial Anak Dalam Situasi Bencana*. Bandung: STKS.

Michelson, L., Ascher, L. M. (1987). *Anxiety and stress disorders: Cognitive-behavioral Assessment and Treatment.* New York: The Guilford Press.

Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya.

Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, Susi Sulandari. (2015). Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang. Klaten: Jawa Tengah.

Saigh, P. A., & Bremner, J.D. (1999). *Posttraumatic stress disorder: a comprehensive text*. Boston: Allyn & Bacon.

Sarafino, E. P. (1994). *Health psychology: Biopsychosocial interactions (2nd ed.)*. New York: John Wiley & Sons.

Schneid, Thomas D. Collins, Larry, (2000). *Disaster Management and Preparedness.* Lewis Publisher.

Shapiro, S., Dominiak, G. M. (1992). *Sexual trauma and psychopathology: clinical intrevintion with adult survivors.* New York: Lexington Books.

Thyer, B. A., & Wodarski, J. S.. (1998). *Handbook of empirical social work practice. Vol 1*. New York: John Wiley & Sons.

7

Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak

The Role of Social Worker Dedicating Unit on Children Social Welfare Program

Suryani dan Enni Hardiati
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial Nomor 1 Sonosewu Yogyakarta Telpon (0274) 377265.
Email <sryanibpks@gmail.com>.
Diterima 4 Maret, diperbaiki 11 Maret, disetujui 17 Maret 2016.

Abstract

This research is to describe the role of social worker dedicating unit on giving guidance children social welfare program (PKSA), as national priority through presidential instruction No 3, 2010 on justifiable development. PKSA is designed to protect and give services for children basic right, covering love, protection, sustainable live, grow and develop, that of several reasons their family could not fulfil them. The PKSA implementator is social worker dedicating unit or volounteer, graduated from bachelor or full degree of social work school, through selection, education, and appointment as contract social worker. Research location in Jambi Municipality, because in that municipality found many children problems and social worker that guide in solving the problem. Data are analised with qualitative technique. The research finds that the exixtence of social worker as children problem solving guidance is diterminative on the succes of the program. The role of social worker is helpful in giving service and guidance to the children. The handicap factor is the location that far in distance and found only one social worker in one municipality, not in balance with the quantity and quality of the problem. The salary also too small and coming late, no motorbike facility that makes social worker working with less enthusiasm. The supporting factor is sinergy among stakeholders commited to children problem. It recommended to the ministry of social affairs, especially the directorate of children affairs, should keep the existence of social worker and add its quantity in every municipality given the number of the increasing children problem.

Keywords: social worker; guidance;children problem.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) dalam memberi pendampingan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), merupakan program Kementerian Sosial sebagai prioritas nasional, ditetapkan dalam Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. PKSA ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak, yang meliputi kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, yang karena berbagai sebab keluarga tidak dapat memenuhi. Pelaksanaan PKSA adalah sakti peksos dan tenaga sukarela, yang lulus D IV/S1 jurusan pekerja sosial dan terseleksi, dididik dan diangkat sebagai pekerja sosial dengan status kontrak. Lokasi penelitian di Kota Jambi, karena di kota tersebut terdapat sakti peksos dan masalah anak yang cukup tinggi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan, bahwa keberadaan sakti peksos dalam melaksanakan peran sebagai pendamping anak sangat menentukan keberhasilan program. Peran sakti peksos sangat membantu dalam memberi pelayanan dan pendampingan anak. Faktor penghambat jangkauan wilayah yang sangat luas dan jauh, sehingga sakti peksos kesulitan melakukan pendampingan karena di setiap Kota/Kabupaten hanya terdapat seorang pekerja sosial, tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi. Gaji yang diterima juga selalu terlambat dan kurang memadai, tidak ada fasilitas sepeda motor sehingga membuat sakti peksos tidak semangat dalam melakukan tugas. Faktor pendukung adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan satuan bakti pekerja sosial dalam memberi pendampingan bagi anak. Rekomendasi bagi Kementerian Sosial khususnya direktorat anak agar mempertahankan keberadaan sakti peksos di setiap daerah khususnya di Kota Jambi dan jumlah ditambah, tidak hanya satu setiap kota/kabupaten, mengingat permasalahan anak yang cukup banyak.

Kata kunci: sakti peksos; pendampingan; masalah anak.

A. Pendahuluan

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program Kementerian Sosial yang merupakan prioritas nasional, ditetapkan dalam Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. Program Kesejahteraan Sosial Anak ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak, merupakan prioritas karena pemenuhan kebutuhan dasar anak yang meliputi kasih sayang, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, seringkali tidak dapat dipenuhi-oleh keluarga, bahkan kondisi keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya anak bermasalah. Pemicu permasalahan pada anak disebabkan orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, baik kasih sayang, perlindungan, kesempatan tumbuh kembang serta kelangsungan hidup, sehingga anak masuk kategori terlantar. Kehidupan anak dipandang memiliki arti penting dan strategi sebagai penerus generasi, tetapi kondisi menjadi lain apabila anak penuh masalah karena kemiskinan keluarga, sehingga akan berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya apabila tidak ada upaya menghentikan.

Sebaran permasalahan anak tidak saja bermuara pada kemiskinan yang secara efektif memberikan kontribusi pada keterlantaran anak. Pusdatin Kemensos mencatat jumlah permasalahan anak, antara lain anak jalanan pada tahun 2007 sebanyak 230.000 jiwa. Dilanjutkan estimasi oleh BPS dan ILO tahun 2009, anak jalanan sebanyak 320.000, sedang permasalahan anak balita terlantar pada tahun 2009 tercatat 21.217.500. anak. Anak terlantar tahun 2009, 3,1 juta anak (Pusdatin Kemensos, 2009). Masalah lain, seperti kenakalan semakin meresahkan masyarakat terutama pada bentuk kenakalan yang sangat bervariasi, seperti kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dilakukan sendiri ataupun berkelompok.

Kondisi faktual lain adalah anak disabilitas. Menurut data Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kementerian Sosial tahun 2009 di 24 provinsi terdapat 199.263 anak disabilitas. Terdiri 78.412 anak dengan kecacatan ringan, 74.603 anak katagori kecacatan sedang dan 46.148 anak dengan kecacatan berat. Sebagian besar anak disabilitas berada dalam keluarga miskin, tidak terpenuhi kebutuhan nutrisi, tidak mendapat pengasuhan dan perawatan khusus sesuai dengan kecacatannya dari keluarga. Masalah anak dengan kondisi rawan eksploitasi, ekonomi, seksual diperkirakan juga banyak walaupun yang muncul dipermukaan lebih kecil, belum lagi anak dalam situasi darurat bencana alam akibat tingginya frekuensi bencana alam, dan anak dalam situasi konflik tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas, penguatan keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) salah satunya adalah oleh sakti peksos dan tenaga sukarela. Namun sesuai petunjuk pelaksanaan program PKSA tersebut yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah sakti peksos, lulusan D-IV/S-1 jurusan pekerja sosial yang terseleksi, dididik dan diangkat sebagai pekerja sosial dengan status kontrak kerja secara penuh dan bertugas sebagai pendamping program kesejahteraan sosial anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak, dinas sosial, atau masyarakat yang telah ditentukan. Tugas sakti peksos adalah pendamping pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), untuk mengatasi permasalahan anak dan keluargan serta mendayagunakan berbagai sumber, baik pada tingkat individu, keluaga, lembaga, maupun masyarakat. Dalam bertindak sebagai pendamping sakti peksos sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi anak (Suharto, 2005: 95).

Sakti peksos berperan dalam meningkatkan peran dalam melakukan pelayanan sosial berbasis keluarga, selain tetap berperan memberikan pengasuhan pada anak-anak yang kehilangan asuhan, sakti peksos juga dimungkinkan untuk bertugas di masyarakat untuk mengirimkan anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dan pengasuham orang tua ke tempat pengasuhan alternatif, seperti panti sosial pangasuhan anak, serta mendampingi anak dan keluarga yang dianggap rentan. Semua tugas sakti peksos, baik yang dilakukan sendiri maupun yang bekerja sama dengan berbagai pihak adalah dalam rangka keberhasilan PKSA, sehingga memerlukan kerja keras dan tanggung jawab besar dari sakti peksos dan mitra kerjanya.

Hasil penelitian yang menunjukan kebutuhan sakti peksos adalah dari Peneliti Pusat Penelitian Kemensos dengan judul: Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Anak Jalanan (2014) antara lain menyebutkan, dalam rangka bebas anak jalanan tahun 2014 selayaknya jumlah sakti peksos perlu ditingkatkan dan di lembaga yang mengadakan pendampingan dan pembinaan anak jalanan perlu ditempatkan sakti peksos yang memadai, proporsional sesuai dengan jumlah anak yang ditangani.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sakti peksos untuk berbagai masalah anak cukup banyak, yakni masalah anak jalanan, korban kekerasan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, yatim piatu, anak penyandang disabilitas terlantar. Masalah yang dihadapi anak cukup berat dan kompleks tetapi sakti peksos yang direkrut tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang ada, sehingga sakti peksos tidak dapat bekerja secara fokus dan cermat dengan permasalahan yang cukup tinggi. Masalah lain yang dihadapi oleh sakti peksos berkaitan dengan fasilitas kerja, sebagai contoh seorang sakti peksos yang bekerja di Muara Bungo tidak memiliki sepeda motor sendiri, sedang dari dinas juga tidak memfasilitasi, sehingga sangat menyulitkan mobilitas karena penjangkauan masalah anak terkadang masuk pedalaman yang tidak dilewati kendaraan umum, sehingga sepeda motor menjadi vital. Biaya oprasional yang diterima sakti peksos juga sangat minim, yakni Rp 2.000.000 sebulan, sama dengan yang diterima oleh pekerja sosial di kota-kota besar yang biaya oprasional tidak begitu tinggi.

Di Kota Jambi masalah anak cukup banyak dan memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat, dengan kasus 253 (2015). Dinas Sosial Kota Jambi perlu kerja sama antarinstansi, seperti dinas kesehatan, polresta, Sekolahan dan masyarakat umum, baik ketika upaya tersebut dalam pencegahan maupun dalam upaya penanganan. Pencegahan, misalnya sosialisasi di masyarakat antardinas bersama Polresta Kota Jambi. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan dari program kesejahteraan sosial anak adalah berfungsinya pendampingan oleh sakti peksos dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, dan keberhasilan kerja sama antarinstansi pemerintah dengan masyarakat. Sakti peksos akan berhasil apabila dapat menjalin kerja sama dan saling sinergis dalam mengurai masalah yang dihadapi anak. Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah bagaimana peran pendampingan yang dilakukan sakti peksos pada PKSA di Kota Jambi, apa faktor pendukung dan penghambatan yang dialami oleh sakti peksos dalam menjalankan tugasnya?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, guna mengkaji secara mendalam peran sakti peksos sebagai pendamping dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak. Lokasi ditentukan secara *purposive* yakni di Kota Jambi dengan alasan terdapat banyak kasus anak (253 kasus) menurut data dari Dinas Sosial Kota Jambi 2015, dan hanya satu orang sakti peksos yang ditempatkan untuk melaksanakan pendampingan terhadap anak dalam PKSA. Sumber data diperoleh dengan cara pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam terhadap kegiatan sakti peksos pada PKSA.

Informan adalah sakti peksos Kota Jambi dan Kabupaten Muaro, aparat Dinas Sosial 2 orang, Polresta Kota Jambi satu orang, Dinas Kesehatan satu orang, petugas Panti Sosial Perlindungan Anak Alyatama 2 orang, tenaga TKSK 2 orang dan PSM 1 orang dan dari LPA 1 orang, 4 orang dari orang tua penerima manfaat. Semua informan terlibat langsung dalam PKSA di kota Jambi. Data juga diperoleh melalui telaah dukumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Peran sakti peksos dalam Pendampingan Anak

1. Deskripsi Lokasi Kota Jambi

Kota Jambi merupakan Ibu Kota di Provinsi Jambi, yang diapit oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatra Barat. Di tengah Kota Jambi dialiri sungai besar, bernama Sungai Batanghari. Kota Jambi juga memiliki beraneka ragam budaya, sesuai dengan suku yang tinggal di Kota Jambi, yaitu budaya Minangkabau, Palembang (Sriwijaya) dan dari suku Jambi sendiri, suku Jawa termasuk mendominasi penduduk kota terutama mereka berprofesi sebagai PNS, penjual makanan di pasar, suku Jawa berasal dari transmigrasi, perkebunan sawit dan karet. Suku Minangkabau juga mendominasi penduduk yang berprofesi sebagai PNS, pedagang restoran sampai pada sopir-sopir angkot. Namun walaupun beraneka ragam suku bangsa tetapi tampaknya kehidupan cukup rukun, aman, dan terkendali.

Jumlah penduduk Kota Jambi 548.414 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 279.184 jiwa dan perempuan 269.230 jiwa (Bappeda, 2014). Data PMKS yang menyentuh permasalahan dengan anak adalah yang memerlukan perlindungan khusus 23 orang anak, anak jalanan 22 orang, anak korban kekerasan 20 orang. Dengan jumlah masalah anak yang cukup banyak 253 kasus, satu orang sakti peksos tentu sangat berat dalam melaksanakan tugas yang dibantu oleh PSM, TKSA, staf dinas sosial dan pengasuh di panti. Kota Jambi jumlah memiliki PSKS yang terdiri dari orsos 30, PSM 32, Karang Taruna 62, TKSK 8, WKBSM 10, LK3 berjumlah 1 dan K3 1(Data PMKS Kota Jambi, 2014). Potensi kesejahteraan sosial terkoordinasi dengan baik melalui jaringan kerja yang di koordinir oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Jaringan kerja dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial anak tersebut terdiri atas dinas sosial, LPA, RSPA Aliyatama, Orsos dan LSM, sakti peksos, PSM dan TKSA. Lembaga-lembaga ini terbentuk dan terkoordinasi dalam penangganan masalah anak dengan kegiatan: pencegahan dan penanggulangan praktek tindak kekerasan bagi perempuan dan anak; pencegahan anak jalanan;penanganan anak terlantar; pelayanan bagi anak dengan disabilitas dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perhatian khusus anak dari Suku Anak Dalam.

Anggaran untuk kegiatan tersebut dilakukan melalui dana APBD kecuali RSPA melalui APBN karena panti tersebut milik Kementerian Sosial, bukan milik pemda. Koordinasi yang intensif tersebut dipimpin oleh Dinas Sosial Kota dengan tujuan mewujudkan jaminan aksesbilitas bagi keluarga yang retan terhadap anak bermasalah untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan termasuk nutrisi. Program penanganan anak bermasalah di samping dari PKSA juga bersamaan dengan kegiatan dari anggaran APBD melalui dinas sosial

2. Profil Sakti Peksos Kota Jambi

Permasalahan anak tidak terbatas pada masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial saja, tetapi sebagian anak yang bermasalah terjebak dalam situasi yang sulit untuk memperoleh kesempatan tumbuh kembang secara wajar. Tidak semua anak memperolah kesempatan mendapatkan kasih sayang, nutrisi, kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk berkembang dan tumbuh secara sehat karena kondisi keluarga dalam kemiskinan dan bermasalah, bahkan dalam lingkungan yang tidak aman, sehingga anak terlantar dan terabaikan.

Menghadapi permasalahan anak yang berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, Kementrian Sosial metetapkan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) melalui

Instruki Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan yang ditujukkan untuk perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak bermasalah. Pelaksanaan pendampingan PKSA untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, aksesbilitas terhadap pelayanan sosial dasar, penguatan dan pengembangan potensi dan kreatifitas anak, serta penguatan tanggung jawab keluarga, sakti peksos perlu reposisi yang ditetapkan mulai bulan Januari 2015. Pendamping sosial mempunyai tugas sebagai: pemungkin *(enabling)* atau fasilitasi berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat; penguatan (*empowering*) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat; perlindungan (*protecting*) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya; pendukungan (*supporting*), mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis dan dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat.

Wahyudin Supeno (2005), mengemukakan lima tugas seorang pendamping: membimbing proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat; memfasilitasi penyusunan dan penyampaian rencana strategis dalam kegiatan masyarakat; memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan tahun pertama; memfasilitasi keswadayaan masyarakat; memantau kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Berdasarkan tugas pendamping, dapat diungkapkan bahwa sakti peksos sebagai pendamping Program PKSA adalah mendorong memecahkan permasalahan anak dengan menjalankan tugas sebagai pendamping sosial.

Pada tahun 2015 Provinsi Jambi ditempatkan empat orang sakti peksos yaitu di Kabupaten Bungo, Kota Sei Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, masing masing kabupaten dan kota satu orang dan belum seluruh kabupaten di Provinsi Jambi sudah memiliki sakti peksos, mengingat permasalahan anak yang cukup banyak tidak sebanding dengan tenaga sakti peksos yang hanya 4 orang saja, pada hal tugas mereka cukup banyak dan memerlukan tenaga dan pikiran yang harus fokus pada tugas, tentu sangat berat bagi sakti peksos mengingat volume perkerjaan tersebut tidak seimbang dengan tenaga yang ada. Tugas sakti peksos Provinsi Jambi, sebelum reposisi mendampingi anak yang bermasalah, antara lain anak mendampingi suku Anak Dalam yang perlu pendampingan dalam memenuhi beberapa kebutuhan seperti, belajar dan berperilaku bersih dan sehat, mengajari kebiasaan yang mendasar seperti berperilaku sopan, menghormati orang tua dan belajar bermasyarakat. Sakti peksos juga melakukan pendampingan anak jalanan terutama dalam pendataan awal (*assesment*) sebelum masuk rehabilitasi. Pendampingan anak korban kekerasan, anak yatim piatu yang memerima bantuan dan program PKSA. Sakti peksos yang ada di Kota Jambi juga melakukan pendampingan terhadap anak dengan kebutuhan khusus sebagai penerima bantuan PKSA. Sakti peksos di kota Jambi ada satu orang, dia lulusan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung, berasal dari kota Solo (Jawa), tetapi di masa kecil pernah tinggal di Kota Jambi.

Sakti peksos Kota Jambi kebetulan sangat pandai bahasa daerah Jambi dan mengetahui adat istiadat Jambi, walaupun orang tua asli Solo (Jawa Tengah) tetapi dari kecil sampai dewasa lulus SMA berada di Kota Jambi dan meneruskan ke perguruan tinggi STKS Bandung. Sakti peksos di Kota Jambi memiliki kompetensi sosial baik, dalam arti mudah bersosialisasi dengan pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pendampingan anak yang bermasalah. Sakti peksos berdasarkan pengamatan langsung menjalin kerjasama dan koordinasi dengan intansi terkait, baik pemerintah maupun swasta, dalam arti sakti peksos tidak bekerja sendiri dalam pendampingan, ditandai dengan dukungan dari mitra kerja pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sakti peksos (pendampingan) dan penjangkauan kasus-kasus anak bermasalah. Laporan kegiatan sakti peksos selalu dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan yang dilaku-

kan dari *assessment,* pendampingan, sampai pemulihan psikologis anak penerima manfaat.

Setelah reposisi Januari 2015, tugas sakti peksos dipindahkan di Dinas Sosial Kota Jambi, sebelumnya menjadi pendamping anak di RSPA Alyatama, pada tugas barunya sakti peksos tidak hanya pada satu jenis masalah anak tetapi berbagai masalah dan tetap harus mendampingi kasus-kasus yang terjadi pada anak, misalnya kasus kekerasan fisik disabilitas, terlantar, kekerasan seksual, anak jalanan. Kondisi berbeda ketika sakti peksos masih di Panti RSPA Alyatama yang hanya mendampingi masalah anak dan balita terlantar saja, sehingga beban tugasnya kemudian bertambah. Oleh karena itu, sakti peksos Kota Jambi sebenarnya perlu penambahan tenaga mengingat permasalahan sosial pada anak cukup tinggi. Perekrutan sebaiknya sesuai dengan wilayah setempat, artinya sakti peksos untuk wilayah Jambi sebaiknya berasal dari Jambi, sehingga secara sosial budaya setempat sudah hafal dan memahami. Dari sisi sakti peksos juga sangat menguntungkan karena tidak perlu kontrak kamar untuk tempat tinggal, sehingga membantu sakti peksos dalam menghemat pengeluaran sehari-hari.

3. Kinerja Sakti Peksos dilihat dari Profesi Pekerjaan Sosial

Kompetensi profesional sebagai sakti peksos dalam pendampingan program kesejahteraan sosial anak adalah sebagai tenaga pengasuh anak yang akan dibantu dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak tersebut. Kasus anak yang dihadapi oleh sakti peksos di Kota Jambi antara lain: pendampingan di Suku Anak Dalam, dalam berbagai kegiatan yang bersifat edukasi dan membangkitkan kegembiraan bagi mereka. Tugas ini, cukup berat karena menempuh perjalanan jauh dan mereka melakukan 1 minggu 3 kali pertemuan, sakti peksos berangkat pagi pulang sore melaksanakan tugas sesuai dengan permasalahan anak yang di hadapi selama anak membutuhkannya, meski berat tetap dilakukan sebagai tanggung jawab memberikan pelayanan secara optimal terhadap anak. Sebagai contoh, apabila anak mendapatkan bantuan yang mengambil melalui bank sakti peksos dengan menggunakan sepeda motor milik sendiri. Sakti peksos yang direkrut sejak tahun 2014 sejak kecil tinggal di Kota Jambi mengikuti orang tuanya yang kerja menjadi PNS di Jambi. Ketika ditanyakan beban kerjanya dalam melakukan pendampingan anak Suku Anak Dalam, dari segi ilmu pengasuhan tidak berat bahkan menyenangkan dan fihak orang tua si anak juga memberikan respons yang baik

Anak-anak yang didampingi adalah anak-anak Suku Anak Dalam yang mendapatkan bantuan PKSA sebesar Rp 1.500.000,- per tahun untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Sejak 2014, selain bertugas mendampingi anak yang lain tetap mempunyai tugas utama mendampingi anak-anak Suku Anak Dalam dengan membantu belajar membaca, menulis, berhitung, membersihkan badan (mandi, mencuci baju, gosok gigi) membersihkan lingkungan rumah, dan mendampingi anak dalam bermain. Sakti peksos mengajak dan memberikan pendidikan berbagai permainan seperti *engklek*, permainan lingkaran, mendampingi belajar menggambar, komunikasi yang baik dengan orang tua dan orang lain. Sakti peksos mendampingi anak-anak Suku Anak Dalam dari keluarga yang sudah menetap, sehingga dapat menjalankan tugas dengan tenang, sedangkan keluarga Suku Anak Dalam yang masih berpindah tidak mendapat bantuan PKSA karena akan menyulitkan dalam pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sakti peksos dinas sosial, dikatakan bahwa sejak reposisi sakti peksos merasa pendampingan dan penanganan kasus kurang mendalam, artinya kasus yang ditangani tidak tuntas hanya sampai pada kulit-kulit permasalahannya, karena masalah yang harus didampingi cukup banyak. Sebagai contoh, ketika pada hari sakti peksos sedang melakukan *assesment* pada 4 orang anak jalanan yang dijaring oleh satpol PP Kota Jambi dia mendapat telpon dari panti penitipan anak untuk segera menyelesaikan kasus anak lain

yang bermasalah di panti. Banyak kasus tidak ada penyelesaian sampai tuntas, baru satu tugas diselesaikan harus menyelesaikan yang lain sehingga kurang berkualitas dan kurang fokus dalam menghadapi tiap kasus. Hasil tidak dapat sepenuhnya tuntas, contohnya kasus anak jalanan yang masih kondisi *assesment* terpaksa ditunda dan mereka di titipkan di kamar-kamar kosong di dinas sosial (semacam kurungan sementara) karena Kota Jambi tidak mempunyai panti anak nakal, sakti peksos harus mengerjakan tugas yang lain.

Realitas permasalahan anak terlantar tidak sebatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan rohani, jasmani, sosial, dan terlantar di keluarganya. Sebagian anak-anak terlantar terjebak situasi sulit yang mengancam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan. Berbagai masalah anak terlantar secara spefisik muncul seperti anak jalanan, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dilacurkan, dijadikan TKW, diperjualbelikan, korban konflik dan penyalahgunaan napza. Permasalahan anak menjadi demikian kompleks, tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan sosial tetapi juga perlindungan (Dirjen Resos, 2006).

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, yang ditujukan untuk memberikan pelindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak kemudian ditetapkan program kesejateraan sosial anak (PKSA) merupakan program prioritas nasional.

PKSA berupaya membangun sistem pelayanan berbasis keluarga dan komunitas agar keluarga dapat mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak serta melakukan pengasuhan yang memadai. Sakti peksos tidak bekerja sendiri tetapi dapat bekerja sama dengan orang tua anak sesuai dengan tujuan program pelayanan berbasis keluarga. Program PKSA mengedepankan untuk mengatasi berbagai faktor resiko (*risk factor*) yang menghambat, memanfaatkan dan memperkuat berbagai sumber protektif (*protective factors*) dalam sistem ekologis kehidupan anak. Upaya dilakukan mulai dari pemberian dukungan langsung kepada keluarga, bekerja untuk memperkuat komunitas dan berbagai institusi pelayanan anak, sampai terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pelaksanaan PKSA menggunakan metode pendampingan oleh sakti peksos yang terlatih atau memiliki pengalaman dalam penanganan masalah anak. Tugas sakti peksos PA dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pihak, yaitu anak, keluarga, komunitas, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), dinas sosial dan pemangku kepentingan masalah anak. PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dilakukan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar aksesibilitas dasar, pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas, penguatan keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

Tugas sakti peksos adalah menjadi pendamping pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) untuk mengatasi permasalahan anak dan keluarganya serta mendayagunakan bebagai sumber baik pada tingkat individu, keluaga, lembaga, maupun masyarakat. Dalam bertindak sebagai pendamping sakti peksos sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan anak (Edi Suharto, 2005: 95). Secara khusus, PKSA bertujuan untuk: menempatkan keluarga sebagai pusat pelayanan untuk memperkuat tanggung jawab keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak; mengupayakan perluasan jangkauan layanan untuk seluruh anak yang mengalami masalah sosial; mengedepankan kemitraan de-

ngan berbagai pihak dalam mewujudkan sistem kesejahteran sosial anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan; mengedepankan pengembangan sistem pelayanan dan program kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional; mendorong peningkatan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya menyejahterakan dan melindungi anak.

Sakti peksos berperan dalam meningkatkan peran LKSA dalam melakukan pelayanan sosial berbasis keluarga (reunifiksi dan reintegrasi) keluarga, memberikan dukungan psikososial, memfasilitasi dukungan finansial, selain tetap berperan memberikan pengasuhan pada anak-anak yang kehilangan asuhan. Sakti peksos juga dimungkinkan untuk bertugas di komunitas atau masyarakat untuk mencegah agar tidak mengirim anak-anak yang tidak membutuhkan pengasuhan hanya mendukung anak dan keluarga yang dianggap rentan, menjaga berlangsungnya kemitraan dengan berbagai pihak. Hasil wawancara peneliti dengan orang tua penerima manfaat menyatakan, bahwa anak-anak yang ada di dalam panti dan luar panti sangat terbantu dengan keberadaan sakti peksos. Mereka juga menyampaikan bahwa komunikasi yang terjalin antara mereka dengan sakti peksos cukup baik bahkan kadang mereka mendiskusikan masalah anaknya terutama yang menyangkut urusan sekolah dan sikap-sikap anak yang menjurus ke kenakalan. Selain komunikasi yang baik, sikap sakti peksos sesuai dengan harapan mereka menyanyangi anaknya. Orang tua mengharapkan pelayanan dan pengasuhan terhadap anak mereka dapat berlangsung terus, tetapi kendalanya tiap tahun tugasnya harus diperpanjang, kalau sakti peksos memilih tidak memperpanjang masa kerjanya anak-anak asuh mereka merasa kehilangan, sehingga secara psikologis mengganggu ketenangan dan yang merisaukan pengasuh panti dan orang tua. Tenaga sakti peksos di Kota Jambi cukup bagus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, tetapi masalah yang mengemuka adalah tidak sesuai antara jumlah masalah yang dihadapi dengan jumlah tenaga sakti peksos yang tersedia, sementara mereka setiap tahun harus memperpanjang kontrak.

Masalah anak adalah masalah yang tidak sederhana, perlu keseriusan, ketelatenan dan berkelanjutan dalam penanganannya. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam melindungi kesejahteraan anak: semua kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh berkembang dengan wajar secara lahir batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman; mengupayakan suatu kondisi tata kehidupan anak yang dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial (Rahmanto W, 1990: 23). Kedua hal tersebut memang merupakan hal pokok yang harus diadakan oleh program PKSA, anak harus penuh ketenangan dan merasa bahwa situasi benar-benar dapat mendukung perkembangan mereka dengan sehat dan wajar tanpa ancaman.

Sakti peksos di wilayah Kota Jambi memiliki beban kerja yang cukup berat yakni mendampingi anak-anak yang mempunyai masalah. Hasil wawancara dengan sakti peksos diketahui, bahwa mereka merasa tidak tertekan atau keberatan dalam mendampingi anak tetapi yang ada adalah perasaan sayang dan kasihan. Ketika harus mengendarai sepeda motor menuju Desa Palempong, Kec. Mestong, dan desa Sungai Bungo Kec. Tanjung lebar di Kab. Muora Jambi, sebelum pada tahun 2015, desa tersebut adalah tempat bermukim Suku Anak Dalam. Sakti peksos naik motor ± 2 jam, menempuh perjalanan untuk menjumpai anak-anak yang harus didampingi dengan dua orang teman sakti peksos lain, 23 anak yang mereka asuh dan harus didampingi, mereka berangkat hari Senin pagi dan pulang ke Kota Jambi pada hari Kamis. Perasaan bangga dan gembira diceritakan selama pelaksanaan mendampingi anak Suku Anak Dalam, bermain dan mendampingi dalam belajar tanpa perasaan malas. Perkembangan anak selalu dicapai dan ditunjukkan kepada peneliti tentang perkembangan fisik, sosial, dan psikologis anak-anak tersebut.

Sakti peksos memberikan motivasi dan semangat agar anak-anak kembali ke arah lebih

baik, sakti peksos berfungsi sebagai agen perubahan bagi anak-anak menuju kemajuan. Apabila menghadapi situasi sulit akan berkonsultasi dengan kepala panti rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dengan aparat dinas sosial dan terkadang dengan LPA. Menurut sakti peksos, dengan kesabaran dan kasih sayang serta dengan hati yang lemah lembut mereka berusaha mendampingi anak-anak agar selalu memperoleh kegembiraan sehingga psikologis dan jiwanya terisi. Anak adalah amanah dari Pencipta, dengan keluguan dan kepolosannya tidak dapat dibedakan ras, suku, atau agama, di hati mereka tetap sama semua memerlukan kasih sayang dan perhatian. Selesai memberikan pendampingan di anak-anak Suku Anak Dalam mereka mendapat tugas pendampingan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Jambi, terutama pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*childrent in need of special protection)* dengan kriteria sebagaimana pasal 59 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan teresolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, korban perlakuan salah dan penelantaran.

PKSA bagi yang membutuhkan perlindungan khusus (PKSA AMPK) adalah merupakan program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. Sakti peksos membantu agar anak dapat bergembira dalam menjalani roda kehidupan yang wajar sesuai dengan usia, membebaskan mereka dari tekanan yang mengganggu perkembagan psikologisnya, fisik dan sosial. Sebagai pelaksana PKSA mereka sebagai salah satu dari pendamping memperhatikan dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa perasaan berat, bahkan dengan keiklasan dan kegembiraan dalam menjalankan tugas sebagai pendamping sosial program kesejahteraan sosial anak maka sakti peksos idealnya memiliki kompetensi sebagai pendamping. Kompetensi sebagai pendamping memiliki tiga dimensi, yakni pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skills*), dan nilai (*values*) (Istiana Hermaati dkk, 2013:3) sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan. Pendamping sosial hendaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bidang tugas yang didampingi, menguasai keterampilan dan teknik dalam praktek pelayanan sosial serta menerapkan etika dasar dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya yang terkait dengan perannya sebagai petugas pendamping. Menurut Awandana (dalam Istiana dkk, 2013: 34) standar kompetensi pendamping sosial sangat diperlukan untuk: kemampuan beradaptasi; kemampuan dalam memahami dinamika dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat; memiliki komitmen terhadap masyarakat bawah; menguasai teknik melakukan *assesment* secara partisipatif; menguasai metodologi; terampil; mendorong partisipasi; komunikatif; menjalin hubungan baik; memiliki kemampuan dalam membuka akses; menciptaan keterbukaan dan menguasai media publik; menguasai teknik pemberian umpan balik; kemampuan untuk melakukan kaderisasi; dan kemampuan menumbuhkan toleransi.

Kota Jambi dengan jumlah penduduk 548.414, dengan sakti peksos satu orang tentu akan kesulitan apabila menyelesaikan kasus tanpa kerja sama dengan pihak lain. Seorang sakti peksos dituntut untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Hasil wawancara dengan sakti peksos, ternyata dia selalu menjalin kerja sama dengan lembaga lain terutama pada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Sakti peksos Kota Jambi juga mengadakan kerjasama dan tukar pikiran dengan sakti peksos dengan kota lain.

Sebagai contoh, dalam penyelesaian kasus kekerasan, sakti peksos selalu kerjasama dengan Polresta Kota Jambi (Kasie Pelayanan Masyarakat khususnya Kasie Penanganan Korban Kekerasan Pada Wanita dan Anak). Setelah *assessment* korban kekerasan, apabila diperlukan tempat untuk perlindungan sementara, sakti peksos mencarikan tempat tersebut di RSPA, tempat ini bersifat sementara dalam penangganan korban. Apabila korban telah merasa aman, kemudian dikembalikan ke orang tuanya dan sakti peksos masih terus memantau perkembangan kasus tersebut sampai dirasa dapat dilepas. Beberapa penyelesaian kasus sakti peksos kota Jambi selalu bekerja sama dengan LPA, beberapa LSM, RSPA Aliya Tama, Panti Asuhan Muhammadiyah, Polresta Kota Jambi, Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota dan Kasi Perlindungan Anak BKKN, juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah anak penerima manfaat belajar. Hasil FGD, sebagai klarifikasi data, hampir semua yang hadir adalah sebagai mitra sakti peksos. Semua yang hadir menyatakan, bahwa kinerja sakti peksos Kota Jambi sangat bagus bahkan ketua LPA Kota Jambi mengatakan, sakti peksos perlu diacungi "dua jempol" karena kinerja sakti peksos sangat bagus, dikatakan bahwa sakti peksos berfungsi sebagai mediator atau penghubung dalam menyelesaikan setiap kasus, antara masalah yang dihadapi anak dengan potensi kesejahteraan sosial yang dapat mengatasi masalah anak. Seperti halnya yang disampaikan oleh penerima manfaat, menyatakan bahwa hubunganya dengan sakti peksos terjalin dengan baik. Orang tua merasa sakti peksos sangat memperhatikan anaknya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Sakti Peksos

Faktor pendukung: Jalinan kerjasama antara sakti peksos dengan instansi terkait atau sebagai mitra dalam menjalankan tugasnya seperti Dinas Sosial Kota Jambi, RSPA, Polresta Kota Jambi, pihak sekolah dan orang tua sangat mendukung sakti peksos dalam melaksanakan tugas-tugas penyelesaian kasus anak-anak bermasalah. Dukungan dari pihak mitra kerjasama yang paling sering adalah dengan RSPA Aliyatama dan Dinas Sosial Kota Jambi, terkadang sakti peksos dibantu dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang dibutuhkan, baik tenaga, dana dan dorongan non-materiel seperti konsultasi, informasi, solusi yang diperlukan. Dukungan moril dengan melibatkan sakti peksos berbagai kegiatan di dinas sosial dan Panti RSPA di luar kedinasan secara kekeluargaan.

Faktor Penghambat: sakti peksos hanya satu orang tidak sebanding dengan masalah yang ada sehingga kurang tuntas dan fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Kurang pelatihan atau bimtek dalam penanganan masalah, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas terutama menyangkut masalah yang belum pernah mereka kenal, sehingga perlu latihan penyelesaian kasus. Kurang fasilitas fisik, misalnya yang terjadi pada sakti peksos di Kabupaten Muaro (Jambi), yang tidak memiliki sepeda motor sehingga menghambat pelaksanaan tugas. Gaji yang kurang sesuai dengan beban kerja yang cukup besar, sehingga untuk keperluan perjalanan keliling mengadakan *home visit* dan penjangkauan penerima manfaat yang jaraknya jauh-jauh, tidak cukup. Data permasalahan anak di Kota Jambi juga tidak akurat dan lama. Reposisi sakti peksos yang menginduk pada dinas sosial kota menjadi keluhan kepala panti dan lembaga sosial anak, karena sakti peksos menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi, akibatnya hasil kerja kurang berkualitas dalam upaya pengentasan masalah anak.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sakti peksos dalam PKSA yang dilaksanakan di Kota Jambi telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kondisi saat penelitian dilaksanakan, bahwa sakti peksos bekerja dengan serius, pendekatannya cukup manusiawi, ramah dan selesai dengan baik sesuai bidang tu-

gas dan tangung jawab, peran sakti peksos dalam keberhasilan program kesejahteraan anak cukup penting dan menentukan karena mereka merupakan pelaksana langsung dan penentu kerja sama dalam penangganan permasalahan anak.

Sakti peksos dalam menjalankan tugas sebelumnya mendapatkan bimtek dan pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas pendampingan mereka akan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan. Sakti peksos melakukan pendampingan baik kepada anak yang mengalami masalah maupun kepada orang tua anak, berupa pendampingan dan bimbingan dengan *home viset.* Anak merupakan tanggung jawab orang tua, sedangkan keberadaan sakti peksos di kota hanya merupakan pendampingan dalam membantu memecahkan masalah yang sedang mereka alami, tetapi kenyataannya peran sakti peksos sangat menentukan dalam memecahkan masalah anak, menyebabkan anak memiliki rasa aman dan merasa terlindungi dari ancaman datang dari luar. Tugas sakti peksos selain melakukan pendampingan terhadap anak yang bermasalah, juga mencatat setiap kasus yang telah ditangani dan membuat laporan perkembangan penanganan kasus.

Keberadaan sakti peksos sangat dibutuhkan, peran mereka yang begitu besar dalam kesuksesan PKSA, diaplikasikan dalam bentuk membantu penerima manfaat mulai dari penjangkauan, penelusuran kasus, pendampingan penanganan kasus sampai pada *home visit* dalam upaya pemulihan. Faktor pendukung keberadaan sakti peksos, yakni adanya kerja sama antara pemerintah setempat yaitu dinas sosial. Apabila ada permasalahan yang menyangkut anak, sakti peksos segera menangani melalui perintah dari dinas sosial setempat. Faktor penghambat bagi sakti peksos dalam menjalankan tugas yakni keberadaan penerima manfaat yang jauh, dan sakti peksos hanya bertugas sendiri untuk tiap satu Kota/Kabupaten, tidak sebanding dengan jumlah permasalahan anak yang cukup tinggi.

Rekomendasi ditujukan kepada dinas sosial setempat agar selalu memperhatikan keberadaan sakti peksos dan mengingat perannya sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat maka perlu bantuan untuk kelancaran tugas. Diharapkan dinas sosial menganggarkan untuk tambahan honor sakti peksos, kepada kementerian sosial khususnya direktorat anak supaya menambah jumlah sakti peksos sebab untuk kota besar dengan permasakahan anak yang tinggi, akan kesulitan apabila hanya ada seorang sakti peksos, tidak sebanding antara sakti peksos dan masalah yang dihadapi.

Pustaka Acuan

Achlis, (1982). *Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi dan Praktek Sebagai Pertolongan*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Arif Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Bernadine R Wirjana.(2008). *Mencapai Masa Depan yang Cerah, Pelayanan Sosial yang berfokus pada Anak.* Yogyakarta: Yayasan Sayap Ibu.

Dharta Ranu Wijaya. (2011). *Komitmen dan Kompetensi Pekerja Sosial untuk Bekerja dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Keluarga*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Didiet Widiowati, Herawati, dkk. (2011). *Kompetensi Pekerjaan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Edi Suharto, (2005). *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi. Bahan Bacaan Pelatih dalam Meningkatkan Kemampuan Pendamping Sosial Keluarga Miskin* (Tidak dipublikasikan).

Elizabeth B Hurlock. (1998). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.* Jakarta: Erlangga.

Gerungan, WA. (1997). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Istiana Hermawati, dkk, (2013). *Pengembangan Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial,* Yogyakarta: B2P3KS Press.

Kementerian Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun (2011) *Program Kesejahteraan Sosial Anak* (PKSA).

Lexy J Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdakarya.

Martina Marwanti, T. (2011). *Kompetensi Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terkecil.* Yogyakarta: Samudera Biru.

Singgih D Gunarso. (1998). *Psikologi untuk keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

Sondang P. Siagian. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU No. 23 Tahun (2002) tentang *Perlindungan Anak.*

UU No. 4 No (1979) tentang *Kesejahteraan Anak.*

UU No. 24 Tahun (2013) tentang *Administrasi Kependudukan*

Wahyudin Sumpeno, (2005). *Kiat-kiat Memberdayakan Masyarakat Solo: Kerjasama Yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief Service (CRS),* Jakarta.

8

Analisis terhadap *Masterplan* Penanganan Anak Jalanan

Analysis on the Masterplan Model of Street Children Handling

Soetji Andari
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta.
Telpon: (0274)377265 – fax (0274) 373530. E-mail <soetjiandari@gmail.com>.
Diterima 4 Maret, diperbaiki 17 Maret, disetujui 25 Maret 2016.

Abstract

The existence of street children in various areas need special handling, problems related with them are education, abandonment, violence, discrimination and child labor. The local government of Sleman Regency initiates street children handling through a masterplan made through assessment, focus group discussion held with stakeholders related to street children handling, and comparative study in order to make a coprehensive masterplan. The research uses qualitative-descriptive approach. Data are gathered throuh interviews with numbres of street children, stakeholders related to street children (government and non-government), and street children guides. The masterplan is designed to handle and overcome streetchildren problems totally, coordinated, continue, and functioned as guidance for stakeholders related to children issues having the same perception toward street children.

Keywords: masterplan; handling; street children

Abstrak

Fenomena anak-anak jalanan merupakan salah satu masalah di daerah yang memerlukan perhatian sendiri, permasalahan anak-anak tersebut berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, keterlantaran, kekerasan, diskriminasi, dan pekerja anak. Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, berupaya menangani anak jalanan melalui *masterplan* yang disusun melalui *assessment, focus group discussion* dengan berbagai pemangku kepentingan, dan studi banding untuk mendapat model penanganan anak jalanan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan anak jalanan, pemangku kepentingan peduli anak jalanan (pemerintah dan LSM), dan pendamping anak jalanan. Tujuan dari *masterplan* penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman agar dapat menangani masalah dan mengatasi anak jalanan secara menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, dan panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dan lembaga peduli anak yang terlibat dalam melakukan perlindungan anak sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Kata kunci: *masterplan;* penanganan; anak jalanan

A. Pendahuluan

Keberadaan anak jalanan menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian, mereka merupakan anak-anak terlantar dan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, serta kurang perhatian baik dari orang tua maupun orang terdekat untuk mendapat pengasuhan. Fenomena anak jalanan merupakan bagian dari lingkaran setan kemiskinan. Jumlah anak jalanan mencapai lebih dari 50.000 anak (Bajari, 2012). Anak jalanan merupakan suatu komunitas yang paling rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan, yang dipengaruhi oleh faktor baik keluarga maupun lingkungan sosial.

Anak jalanan di Wilayah Sleman mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga, disebut *children on the street*, sedangkan c*hildren of the street,* adalah anak-anak yang menghabiskan waktu di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi lepas dari hubungan dengan keluarga. Kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*) adalah anak yang masih mempunyai hubungan dengan orang

tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Dalam kategori ini anak-anak rawan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah, baik secara emosional-sosial, fisik maupun seksual. Anak jalanan yang terputus dari keluarganya atau *children of the street,* tinggal dan hidup di jalanan, tidak jarang mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan tanpa perlindungan. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangat rentan terhadap situasi buruk, perlakuan salah, dan eksploitasi baik secara fisik maupun mental.

Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut Soetji Andari (2004) dibagi empat kelompok: *Children on the street*, anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan tetapi masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala maupun dengan jadwal yang tidak rutin. C*hildren of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan keluarga. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan, berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. *Vulnerable to be street children* adalah anak-anak yang rentan menjadi anak jalanan akibat putus sekolah, tinggal di lingkungan kumuh atau padat penduduk dan dekat dengan jalan raya.

Anak jalanan rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, terutama anak jalanan yang sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga. Anak jalanan akan lebih aman jika mereka berada di jalanan beberapa jam dan tinggal dengan orang tua dan masih sekolah. Berbagai ancaman yang dialami anak jalanan berasal dari teman dan pengaruhnya sangat kuat karena bisa menyeret mereka lebih lama di jalan. Akibat dari pengaruh teman anak jalanan rela meninggalkan rumah dan sekolah, berkeliaran di jalan karena lebih banyak memberi kebebasan dan kesenangan. Daya tarik menjadi semakin kuat apabila di rumah hubungan dengan orang tua kurang harmonis, orang tua bekerja dari pagi sampai malam sehingga anak tidak terawasi, atau unsur eksploitasi dalam bentuk anak harus memberi penghasilan kepada orang tua, yang jika tidak anak tersebut akan menerima hukuman fisik.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang diungkap oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2013) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara normatif dan empiris. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan anak jalanan, pendamping anak jalanan, aparat yang menangani anak jalanan. Data sekunder didapat melalui telaah dokumen dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah dan penanganan anak jalanan dari berbagai sumber. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip Lexy J. Moleong (2009: 4), bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis masterplan penanganan permasalahan anak jalanan di Kabupaten Sleman, melalui penelusuran terhadap stakeholder (pemerintah dan non-pemerintah), anak jalanan, dan pendamping anak jalanan yang bertindak sebagai informan.

C. Analisis terhadap *Masterplan* Penanganan Anak Jalanan

1. Keberadaan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Kecamatan dengan wilayah paling

luas adalah Cangkringan (4.799 hektar), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 hektar). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 pedukuhan). Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70 persen), perempuan 566.067 jiwa (50,30 persen) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73 persen dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 305.376 jiwa. Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun (RPJM 2005-2010 Kabupaten Sleman).

Tabel
Anak Jalanan di Kabupaten Sleman
2009 - 2013

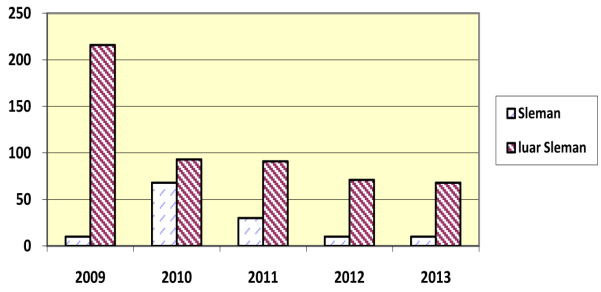

Sumber: Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sleman 2013

Anak jalanan di Kabupaten Sleman yang terdata Dinsosnakertrans berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2009 terdapat 226, sedangkan 2013 terdapat 78 anak jalanan, kecenderungan menurun jumlah anak jalanan karena pemerintah menerapkan sasaran bagi anak jalanan pada program pengentasan kemiskinan seperti Program PKSA anak jalanan. Program PKSA sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Turunnya nilai mata uang menjadi salah satu penyebab berkurangnya anak berada di jalanan akibat daya tukar rendah, sebagai contoh dahulu orang memberi uang receh seratus hingga lima ratus rupiah dapat dibelikan makanan dan rokok, kemudian hanya dapat dibelikan makanan saja. Banyaknya kelompok pengamen yang berada di perempatan lampu merah merampas lahan bagi anak jalanan untuk mencari uang. Kebanyakan anak jalanan di Kabupaten Sleman adalah pendatang, mereka berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Sleman, seperti Kota Semarang, Temanggung, Magelang. Hasil wawancara terhadap anak jalanan terungkap, bahwa mereka mengalami kehidupan yang keras, pada awalnya menjadi anak jalanan karena disuruh orangtua mengemis di jalanan. Wilayah operasi anak-anak jalanan Sleman di perempatan jalan Kentungan, Condongcatur, Demakijo, Gamping, karena Kabupaten Sleman merupakan jalur utama menuju Kota Yogyakarta.

Anak jalanan sebagai salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak terlantar yang semakin meningkat. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, serta komitmen dan tanggung jawab keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan ketelantaran pada anak. Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Sleman tidak berbeda dengan anak jalanan lain, berusia antara 5 sampai 18 tahun, dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas di jalanan atau tempat-tempat umum. Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, dapat dikategorikan anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia anak-anak (5-11 tahun) dan anak jalanan yang berusia remaja (12-18 tahun). Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni masa remaja.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling terkait dan mempengaruhi apabila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat tempat umum, seperti pasar, *mall*, terminal bis, dan taman kota. Mereka seharusnya hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah yang hangat dan bersahabat. Mereka juga selayaknya bermain dan belajar di sekolah atau di tempat-tempat yang memang pantas. Jalanan memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi anak. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh.

Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan seks (Bajari, 2012). Kepedulian terhadap anak jalanan terutama didasari kenyataan bahwa anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya. Mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial dan seksual. Mereka terpaksa harus menjadi pengguna dan pengedar narkoba atau terlibat kejahatan. Anak jalanan dan *gepeng* yang berada di kabupaten Sleman didominasi dari daerah Jawa Tengah. Salah satu faktor pendorong menjadi anak jalanan karena mereka ingin bebas dan tidak terkekang, sedangkan faktor lain karena ekonomi dan keluarga mereka yang tidak harmonis, sehingga anak lebih memilih hidup dijalan.

Keberadaaan anak jalanan di Kabupaten Sleman kebanyakan berasal dari luar Sleman dan berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin anak jalanan mempengaruhi dalam berperilaku kelompok. Anak jalanan di Kabupaten Sleman berada pada lalu lintas jalan besar antara Kota Yogyakarta dan Kota Magelang di sebelah utara, di sebelah timur antara Kota Yogyakarta dengan Kota Solo dan di sebelah barat antara Kota Yogyakarta dengan Kota Purworejo, sehingga berpotensi sebagai tempat mangkal anak jalanan. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman terdapat 10 kecamatan menjadi tempat mangkal anak jalanan yaitu: Tempel, Sleman, Mlati, Depok, Berbah, Kalasan, Prambanan, Gamping, Godean dan Ngaglik, 23 titik mangkal anak jalanan, seperti perempatan Denggung, makam Wahidin, Monjali, Jombor, Demakijo, Gamping, UIN, Mirota, Janti, Maguwo, Kalasan, Prambanan. Anak-anak jalanan di wilayah Kabupaten Sleman kebanyakan anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Mereka seharusnya mengikuti kegiatan sekolah pada jenjang pendidikan tingkat dasar dan menengah, tetapi kehilangan hak dan kesempatan mendapatkan pendidikan dengan layak karena waktunya habis di jalanan.

Penyebab mereka menjadi anak jalanan karena faktor ekonomi, berasal dari keluarga miskin, disuruh orang tua untuk membantu kehidupan keluarga, diajak teman, terlanjur menikmati sebagai anak jalanan karena memiliki kebebasan, memperoleh uang yang cukup banyak, *broken home* akibat perceraian atau kehilangan orang tua karena meninggal, dan keluar dari sekolah (*drop out*). Permasalahan anak jalanan di Kabupaten Sleman sering kali mengganggu ketertiban umum terutama di jalan raya, mengganggu kelancaran lalu lintas, tidak jarang mereka menjadi korban kecelakaan. Dari hasil wawancara mendalam diketahui keberadaan anak jalanan rentan terhadap tindak kekerasan dan penyimpangan seksual (prostitusi), hingga penyakit menular. Penganiayaan keluarga terhadap anak merupakan alasan utama menjadi anak jalanan. Penganiayaan ini meliputi penganiayaan mental dan fisik. Kemiskinan dalam keluarga merupakan dorongan kebutuhan ekonomi, yang mem-

buat mereka harus bekerja untuk membantu keluarga. Kendala penanganan yang dihadapi pemerintah adalah sulit mendapatkan data pasti dari anak jalanan akibat mobilitas cukup tinggi, kebanyakan mereka tidak memiliki identitas dan hanya memiliki nama panggilan saja. Anak jalanan berasal dari orang tua yang mengabaikan kelembagaan keluarga (tanpa menikah karena tidak memiliki legalitas), tingkat pendidikan rendah, dan tinggal di daerah kumuh di kotanya.

Selain karakteristik di atas ada pula daerah berdasar jalur lintas antardaerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama, Semarang, Surabaya, Jakarta. Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Tempel, dan Gamping. Wilayah Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang, dari pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta.

Keberadaan anak jalanan secara sosiologis bukan hanya produk dari kondisi kemiskinan tetapi merupakan akibat dari kondisi keluarga yang tidak cocok bagi perkembangan anak, misalnya produk keluarga *broken home,* orangtua yang terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan kebutuhan anak, tidak ada kasih sayang yang dirasakan anak. Keluarga tidak harmonis memicu anak mencari kehidupan di luar rumah, yang tidak ditemukan dalam lingkungan keluarga. Mereka hidup di berbagai ruas jalan dengan melakukan aktivitas yang dipandang negatif oleh norma masyarakat, seperti mengemis, mengelap kaca, menjual koran, bahkan ada yang terjerumus dalam kriminalitas seperti penjambret dan pencuri.

Karakteristik anak jalanan di Kabupaten Sleman hampir sama dengan di daerah lain, antara lain berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam, berpendidikan rendah, kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang lulus SD, berasal dari keluarga tidak mampu (Kebanyakan kaum urban dan beberapa antaranya tidak jelas keluarganya, melakukan aktifitas ekonomi sektor informal). Kehidupan anak jalanan di Kabupaten Sleman sehari-hari juga penuh tantangan dan pergulatan, mereka berhadapan dengan berbagai tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Aktivitas sehari-hari anak jalanan yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga *(Children of the Street)* menghabiskan waktu selama seharian di jalan. Mereka hidup di jalanan hampir 24 jam di sekitar keramaian, seperti di Jalan Solo terutama dekat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Jalan Magelang, Condong Catur, sekitar Pasar Gamping. Aktifitas sehari-hari mereka, seperti makan, tinggal, tidur, dan bekerja di jalanan. Anak jalanan yang putus hubungan dengan orang tua, tidak ada lagi kontak dengan keluarga, tidak tahu orang tuanya, hanya kenal dengan orang sekitar jalanan yang memeliharanya. Hal tersebut terjadi karena sejak kecil yang mereka tahu hanya jalanan sebagai tempat untuk hidup, sebagai tempat tinggal dan tempat bermain.

Di Kabupaten Sleman terdapat beberapa anak jalanan di bawah usia 10 tahun, mereka biasa bergabung dengan anak jalanan laki-laki dan perempuan, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain sambil bekerja, mengamen dengan alat sederhana seperti tutup botol, bertepuk tangan sambil bernyanyi untuk mendapatkan uang. Anak jalanan remaja terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mobilitas anak jalanan remaja laki-laki lebih luas, selain di sekitar terminal bis, mereka hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, dan taman kota.

Karakteristik anak jalanan dapat dijabarkan sebagai berusia antara 10–17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak jalanan merupakan anak-anak masa remaja awal. Usia anak jalanan berperan dalam pembentukan perilaku, menurut

Erikson (Santrock, 2003), anak berusia 10-17 tahun merupakan masa mencari identitas diri, pada usia ini individu dapat menemukan diri dan arah kehidupan mereka, mengekplorasi solusi alternatif mengenai peran yang akan disandang kelak. Temperamen atau gaya perilaku dari remaja ini biasanya sangat aktif dan sebagian menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat untuk menjelajahi lingkungannya dalam rentang waktu panjang. Menurut Thomas & Chess (1987), ada tiga kelompok temperamen, yaitu mudah, sulit, dan lambat menghangat.

Anak jalanan sejak kecil bergelut dengan berbagai tantangan hidup, kerasnya jalanan, untuk bertahan hidup. Anak yang hidup di jalanan memiliki risiko berbahaya, karena jalanan bukan lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak. Anak jalanan, untuk dapat bertahan hidup melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang bekas, mengemis dan mengamen.

Keseharian anak jalanan di Kabupaten Sleman menghabiskan waktu di jalan, mereka bergulat melawan polusi, menyelamatkan diri dari tindakan kriminal, persaingan dengan pengais rejeki lain. Kadang-kadang anak jalanan menjadi korban pengejaran aparat yang mau menghilangkan anak dari jalan. Anak jalanan yang mengais rejeki di kereta, bergulat dengan pedagang dan pengamen dalam kereta. Anak jalanan juga ada yang mengamen di dalam bis kota, tempat-tempat umum seperti taman kota, dari rumah ke rumah, ada yang *nogkrong* di terminal, pasar, semua harus bergulat dengan realitas hidup yang harus dihadapi setiap saat.

Kelompok anak jalanan terbentuk karena kehadiran mereka berada dalam satu lokasi, kemudian bersama-sama bergabung berdasarkan lokasi tempat mangkal atau tempat berkumpul. Hal tersebut terjadi karena keseharian mereka selalu berinteraksi dengan orang yang sama. Anak jalanan tidak menyadari bahwa kenyataan hidup mereka tidak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, karena mereka harus hidup di jalanan yang sangat membahayakan jiwa. Mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya. Mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial dan seksual; mereka juga sering terpaksa harus menjadi pengguna dan pengedar narkoba atau terlibat kejahatan. Keberadaan kelompok anak jalanan sebagai mekanisme pertahanan diri selama di jalan, karena dengan jumlah yang besar mereka mampu menghadapi berbagai ancaman dari pihak lain.

Kehidupan sehari-hari anak jalanan di Kabupaten Sleman sebagai pengemis dan pengamen menjadikan anak melupakan pendidikan. Sebenarnya ada kesempatan untuk sekolah, tetapi kemauan mereka yang sudah lenyap, akibat kondisi keluarga mereka yang kebanyakan tidak mampu menyekolahkan, beberapa anak jalanan tersebut bahkan dieksploitasi untuk membantu menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi tidak memiliki masa depan yang cerah, akibat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Anak-anak jalanan menjadi tulang punggung kehidupan keluarga akibat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang tua sengaja membiarkan anak-anaknya mengemis dan mengamen di jalanan, mereka lebih senang di jalanan ketimbang harus duduk dan belajar di sekolah.

Tidak semua anak jalanan di Kabupaten Sleman memiliki ijasah sekolah dasar, selain akibat terbatasnya ekonomi keluarga juga karena kemampuan belajar yang dimiliki rendah, lebih banyak kegiatan di jalanan sehingga tidak ada waktu belajar untuk pendidikan formal. Anak jalanan setiap hari sibuk mencari nafkah atau berada di jalanan sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Pekerjaan anak jalanan di Kabupaten Sleman beraneka ragam, laki-laki dan perempuan tidak berbeda, yaitu mengamen, menjual koran atau asongan, membersihkan kaca mobil, memulung, mencopet, memeras, mencuri, menemani orang berjudi dan menawarkan jasa seksual. Anak jalanan

tidak mengandalkan satu jenis pekerjaan atau kegiatan tertentu saja, untuk mendapatkan uang atau makanan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya atau melindungi diri dari berbagai ancaman. Anak jalanan rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan yang terjadi, baik di lingkungan jalanan maupun antaranak jalanan. Semua tindak kekerasan yang terjadi pada anak jalanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sosial anak tersebut.

Munculnya anak jalanan pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga yang rendah. Rendahnya pendapatan keluarga tersebut mendorong anak untuk masuk dalam dunia kerja. Keadaan ini diperburuk dengan besarnya jumlah anggota keluarga anak jalanan yang seringkali mendorong anak untuk bekerja di jalanan. Mereka mempunyai kewajiban untuk ikut membantu orang tua yang mempunyai pendapatan rendah. Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Sleman akibat adanya *pull factor* (faktor penarik) karena ajakan teman yang sudah lebih dahulu mengenal dunia jalanan untuk mendapatkan uang dengan mudah. *Push factor* (faktor pendorong) karena kondisi keluarga dengan ekonomi terbatas, kemiskinan memaksa anak memikul beban ekonomi keluarga sehingga harus bekerja di jalanan.

Secara keseluruhan timbulnya anak yang berkeliaran di jalanan akibat keterlantaran, ketidakharmonisan akibat perceraian, percekcokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua, baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya, dan diperparah adanya kekerasan fisik atau emosi terhadap anak. Mereka menjadi anak jalanan karena tidak sekolah dan tidak mendapatkan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga mengakibatkan *drop out* dari sekolah. Kondisi keluarga anak jalanan, yang dapat digolongkan dalam keadaan hidup miskin**,** membuat dan memaksa anak jalanan harus mampu bertahan dengan hidup di jalanan. Faktor umum yang menyebabkan anak hidup di jalanan akibat ketidakmampuan keluarga menghargai (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak anak, menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, hukum, dan sosial (Soetji Andari, 2004)

2. Masterplan Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman

Masalah anak jalanan di Kabupaten Sleman masih bersifat parsial, sehingga dinas sosial berupaya mencari jalan keluar, baik melalui kegiatan maupun program yang diharapkan mampu mengurangi jumlah anak jalanan, tujuannya mewujudkan kesejahteraan dengan melibatkan berbagai pihak, agar upaya penanganan tersebut menjadi upaya bersama. Upaya menangani anak jalanan, tidak bisa dilakukan secara parsial atau diserahkan sepenuhnya kepada dinas sosial semata, tetapi perlu penanganan dan kepedulian bersama dan kerjasama antarpemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. Freeman (1984) mengemukakan, bahwa *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. *Stakeholders* utama dalam pengananan anak jalanan selain pemerintah adalah perguruan tinggi. Perkembangan berarti penanganan anak jalanan melalui masterplan adalah dengan menempatkan Satpol Pamong Praja (PP) sebagai pihak penegak peraturan daerah (Perda) pada titik-titik keberadaan Anak jalanan. Namun demikian upaya tersebut efektif pada saat jam operasional satpol PP, Jam 08.00-16.00, di luar waktu tersebut anak jalanan kembali melakukan kegiatan di jalanan.

Sebagian dari anak jalanan di Kabupaten Sleman masih juga ada yang memiliki keluarga dan pulang ke rumah atau *children on the street*, mengenal sekolah. Mereka ada yang masih bersekolah, berada di jalanan usai sekolah, biasanya sore hari hingga malam. Mereka turun ke jalan untuk membantu orang tua termasuk membiayai sekolah, bahkan membantu menghidupi keluarganya karena orang tua tidak memiliki pekerjaan

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebagai daerah penyangga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan pendekatan kepada anak jalanan tidak lagi ditempuh menggunakan pendekatan represif, tetapi cara persuasif yang dilakukan sesuai dengan pendekatan hak anak. Pemerintah Kabupaten Sleman peduli terhadap kehidupan anak jalanan dengan membuat masterplan penanganan anak jalanan, yang merupakan langkah-langkah penanganan masalah anak jalanan bekerja sama dengan *stakeholders*. Penanganan anak jalanan dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dilakukan tidak hanya oleh unsur pemerintah daerah, tetapi dengan berbagai unsur yang peduli terhadap anak jalanan.

Analisis masterplan penanganan anak jalanan:

1. *Masterplan* penanganan anak jalanan dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua *stakeholders* dapat bekerja sama, artinya memiliki kejelasan tugas dan fungsinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan.
2. *Masterplan* dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua satuan kerja pemerintah daerah memiliki persepsi yang sama dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan.
3. Pelaksanaan *Masterplan* memerlukan sarana dan prasarana pendukung sehingga pendanaan melalui APBD Kabupaten Sleman yang harus dipahami oleh seluruh pelaksana di wilayah Kabupaten Sleman.

Bagan 1
Bagan Alur Penanganan Anak Jalanan

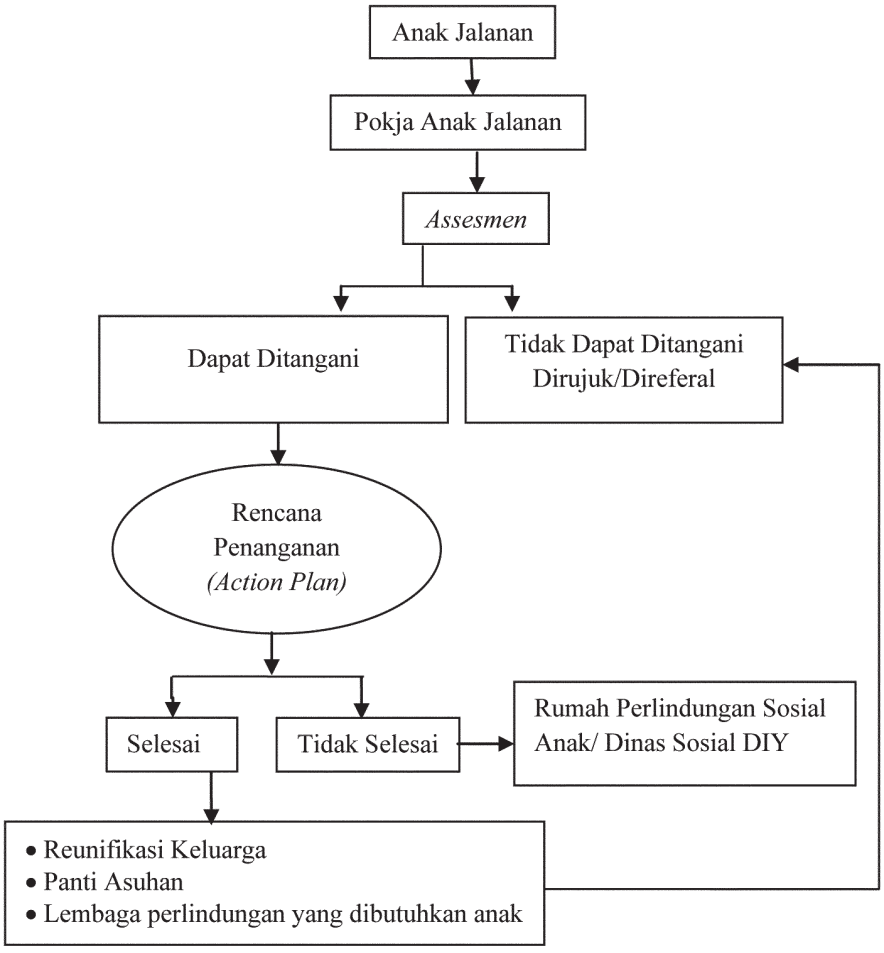

Bagan alur *masterplan* penanganan anak di atas merupakan upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai kabupaten layak anak untuk mengatasi anak jalanan, sehingga mampu melaksanakan keselarasan dan keserasian di bidang kesejahteraan sosial anak jalanan. Tujuan dari pembuatan *masterplan* agar mampu mengatasi dan menanganani anak jalanan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu, berbagai *stakeholder*s memiliki persepsi yang sama dalam menangani permasalahan anak jalanan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sleman. Penyusunan *masterplan* penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman melalui beberapa tahapan, pengadaan sumber daya manusia, pembiayaan dalam menyusun rencana induk penanganan anak jalanan.

Masterplan menjelaskan langkah-langkah atau proses yang perlu dilakukan dalam penanganan anak jalanan dalam hal: Mengatasi dan menangani masalah anak jalanan yang tersebar di berbagai tempat; Menciptakan kabupaten layak anak, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha, karena anak adalah investasi masa depan. Anak jalanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman dapat diberi perlindungan untuk kembali kepada keluarga

Bagan 2
Masterplan Penanganan Anak Jalanan Kabupaten Sleman

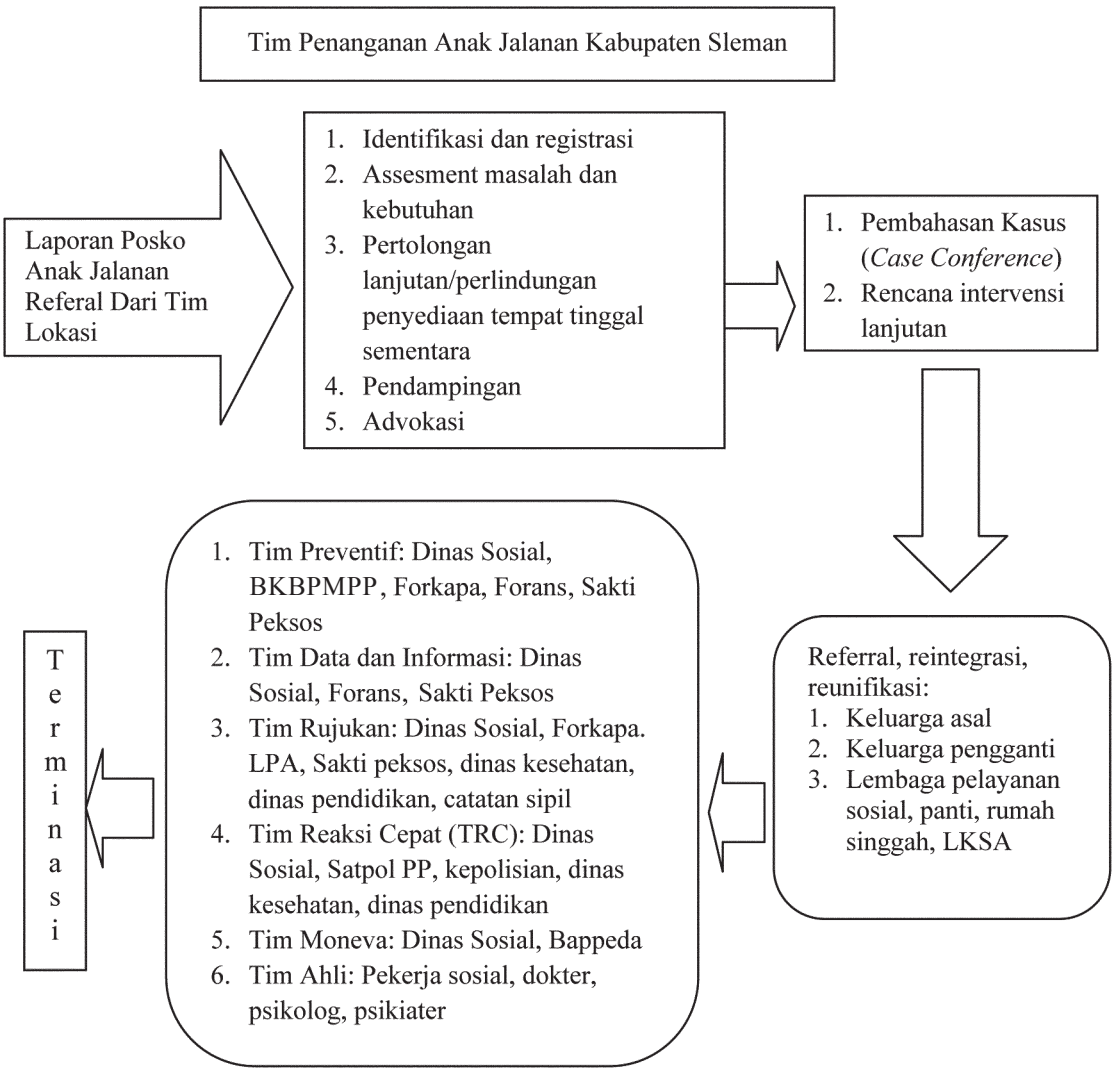

melalui pendekatan persuasif; Membagi tahapan penanganan anak jalanan melalui beberapa titik lokasi untuk diberikan *assesment*, penanganan lanjut, hingga terminasi; Mengupayakan Kabupaten Sleman bebas dari anak jalanan, sehingga anak mendapatkan kebutuhan dasar yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak, dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Ruang lingkup *masterplan* meliputi penanganan anak jalanan di berbagai titik lokasi yang dilakukan oleh berberapa *stakeholders,* penanganan yang terencana dan matang sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, standardisasi pelayanan anak jalanan agar pengananan sesuai dengan aturan yang berlaku. *Masterplan* juga berupaya mengentaskan permasalahan anak jalanan dari kemiskinan dan memperhatikan nasib anak-anak usia sekolah dan merupakan bentuk nyata dalam perlindungan anak jalanan dan sebagai kabupaten layak anak. *Masterplan* juga dibuta agar masyarakat mengetahui hak anak, cara pandang yang tidak diskriminatif terhadap anak. Tahapan proses penanganan anak jalanan melalui *masterplan* dilaksanakan dengan membentuk kegiatan seperti yang tersaji dalam bagan 2.

Zonasi Posko Lokasi: Membagi wilayah yang banyak ditempati anak jalanan di berbagai sudut wilayah di Kabupaten Sleman yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi ke dalam satu wilayah yang berdekatan dan saling berhubungan, tujuannya untuk memudahkan penanganan anak jalanan dan mengidentifikasi permasalahan anak jalanan berdasarkan wilayah, dan mempermudah pengawasan dan penanganan anak jalanan di sekitar Wilayah Kabupaten Sleman. Wilayah dengan menggunakan zonasi memudahkan dalam pembagian wilayah kerja: Posko Monjali meliputi wilayah Jombor, Jalan Kaliurang, Tempel, Denggung serta Makam Wahidin. Posko Kolombo meliputi wilayah Sagan, UIN, Mbarek, Mirota. Posko Janti meliputi wilayah UPN, Maguwo serta sekitar Bandara Adi Sutjipto. Posko Prambanan meliputi Kalasan dan Proliman serta Posko Demakijo.

Keanggotaan Posko: Merupakan titik yang ditentukan untuk menangani anak jalanan berdasarkan wilayah keberadaan anak jalanan, dan terdapat proses pelayanan yang dilakukan oleh beberapa instansi yang bekerja untuk menangani permasalahan anak jalanan di titik tersebut; Tim Penanganan Posko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi menangani anak jalanan di beberapa titik yang telah ditentukan di seputar wilayah Sleman, di bantu oleh aparat setempat, masyarakat, sakti peksos dan LSM peduli anak; Tim Penanganan Anak Jalanan menyelenggarakan penanganan anak jalanan secara paripurna, menyediakan pelayanan kebutuhan anak jalanan yang dirujuk dari posko anak jalanan, terdiri atas tim preventif, dinas sosial, BKBPMPP (*Badan Keluarga* Berencana, Pemberdayaan *Masyarakat* dan Pemberdayaan Perempuan), Forum Komunikasi Panti Asuhan (FORKAPA), Forum Anak Sleman (FORANS), serta Sakti Peksos; Tim Data dan Informasi: Dinas Sosial, FORANS, Sakti Peksos; Tim Rujukan: Dinas Sosial, FORKAPA, LPA (Lembaga Perlindungan Anak), Sakti Peksos, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Catatan Sipil; Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) : Dinas Sosial, Satpol PP, Polisi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan; Tim Moneva: Dinas Sosial, BAPEDA; Tim ahli: Dokter, Psikiater, Pendidik, Pekerja Sosial.

Kegiatan penanganan anak jalanan terdapat dua kelompok yang menjadi pusat penanganan: Posko anak jalanan, posko yang didirikan atas dasar tempat berkumpulnya anak jalanan di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman. Tim Penanganan Anak Jalanan, terdapat di ibukota kabupaten yang menampung berbagai rujukan dari posko anak jalanan yang berada di beberapa titik wilayah Kabupaten Sleman.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian tentang kehidupan anak jalanan di wilayah Sleman, disimpulkan bahwa banyak permasalah yang harus dihadapi. Anak hidup sebagai pengemis dan pengamen sehingga melupakan pendidikan,

meskipun ada kesempatan untuk sekolah tetapi kemauan mereka sudah lenyap, akibat kondisi keluarga tidak mampu menyekolahkan, beberapa keluarga dari anak jalan tersebut bahkan dieksploitasi untuk membantu menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Anak jalanan rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan yang terjadi baik di lingkungan jalanan maupun antaranak jalanan. Semua tindak kekerasan yang terjadi pada anak jalanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam lingkup keluarga dan lingkungan sosial anak tersebut. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, mengemis, mengamen, apabila tidak diatasi secara cepat, lambat laun akan mengarah pada perilaku kriminal seperti mencuri, mencopet bahkan terlibat dalam jaringan narkoba yang memanfaatkan anak jalanan.

Permasalahan sosial yang dialami anak jalanan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini bukan semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk, belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggar. Wujud kepedulian pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Sleman merupakan langkah aksi dengan melibatkan seluruh masyarakat. Ruang lingkup penyusunan *masterplan* meliputi penanganan anak jalanan di berbagai titik lokasi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholders* wilayah setempat. *Masterplan* sebagai kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melindungi hak anak dan cara pandang yang benar dan sama terhadap anak.

Rekomendasi: berdasarkan simpulan di atas, dapat direkomendasikan hal sebagai berikut. Kepada pemerintah Kabupaten Sleman agar *masterplan* dapat diimplementasi secara nyata dan maksimal, guna melindungi anak jalanan dari tindak kekerasan yang senantiasa menghantui mereka. Seluruh *stakeholder* Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu kerjasama terintegrasi berkesinambungan sebagai peran dan tanggung jawab negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial anak. Kepada Kementerian Sosial upaya perlindungan terhadap anak termasuk anak jalanan diperlukan koordinasi yang memadai mengenai sistem perlindungan anak dengan menetapkan standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Pustaka Acuan

Bajari, Atwar, (2012), Anak Jalanan: *Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*, Jakarta: Humaniora.

Biro Pusat Statistik Provinsi DIY, (2013), *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2013*, BPS Provinsi DI Yogyakarta

Faturochman dkk, (2002), *Lingkungan, Keluarga dan Anak*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Plan Indonesia.

Mulandar, Surya (ed.), (1996). *Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: AKATIGA-Gugus Anak.

RPJM (2005-2010) Kabupaten Sleman, http://slemanKabupatengo.id/wp-content/file/rpjm/bab2.pdf.

Saiful Arif, (2008), MelacakAkarKekerasan,http://www.puspek.averroes.or.id/2008/02/20/melacak-akar-kekerasan/.25 Jan 2011 22:03:41 GMT

Sanituti, S & Bagong Suyanto dkk, (1999) *Anak Jalanan di Jawa Timur (Masalah dan Upaya Penanganannya) Surabaya,* Airlangga University Press.

Santrock W. John, (2003), *Adolescence Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga

Save the Children. (2008). *The Child Development Index Holding Governments to Account for Children's Well-being.* London: The Save the Children Fund.

Shelter for All, *The Un-habitat Country Programme*, *ttp://www.unhabitat-indonesia.org/.*

Soetji Andari, (2004), "*Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Perempuan", Tesis*, Sosiologi Konsentrasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM .

Solahudin Odi, (2000), *Anak Jalanan dan Konvensi Hak anak*, Semarang: Yayasan Setara.

Sukardi. (2006). Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan. Yogyakarta: Usaha Keluarga.

Supartono, (2004), *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang: Yayasan Setara.

Suyanto Bagong, (2005), *Kemiskinan dan kesenjangan sosial: ketika pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin,* Surabaya: Airlangga University Press.

....., (2000). *Pekerja Anak, Masalah, Kebijakan dan upaya penanganannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Whitzman Carolyn, (2002), *Suburb Slum Urban Village*. Transformations in Toronto's Parkdale Neighbourhood, Canada, UBC Press.

Zuryawan Isvandiar Zoebir, (2009). *Perilaku Menyimpang Komunitas JalananMigran Pemukiman Kumuh Di Perkotaan, Http://Www.Scribd.Com/Doc/39044475/Perilaku-Menyimpang-Masyarakat-Migran-Pemukiman-Kumuh-Di,* 8 Jan 2014 02:00:45 GMT

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 15 Nomor 1 Maret 2016, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., B.SW., Ph. D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Drs. Doddy Sumbogo Singgih, M.Si. (Sosial Kemasyarakatan, Unair)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS